



Katalog: 4401002

# Statistik Kriminal 2018



BADAN PUSAT STATISTIK

# Statistik Kriminal 2018



# **Statistik Kriminal 2018**

## **Crime Statistics 2018**

ISSN : 2089-5291

No. Publikasi/Publication Number: 04330.1802

Katalog/Catalog: 4401002

Ukuran Buku/Book Size: 17,6 X 25 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xviii + 186 halaman/pages

Naskah/Manuscript:

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan

*Sub Directorate of Politic and Security Statistics*

Penyunting/Editor:

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan

*Sub Directorate of Politic and Security Statistics*

Desain Kover oleh/Cover Designed by:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

*Sub-directorate of Statistical Compilation and Publication*

Penerbit/Published by:

BPS RI/BPS-Statistics Indonesia

Pencetak/Printed by:

Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi/Graphics by:

[www.freepik.com](http://www.freepik.com)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia*

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Publikasi Statistik Kriminal 2018 ini menyajikan gambaran umum mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2015–2017. Informasi yang disajikan mencakup tiga pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku, pendekatan korban, dan pendekatan kewilayahan.

Data yang disajikan diperoleh dari dua sumber utama statistik kriminal, yaitu (1) Data berbasis registrasi (*administrative based data*) yakni data kriminal yang dihimpun oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan (2) Data berbasis survei (*survey based data*) yakni data kriminal yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Data registrasi Polri mencatat bahwa tingkat kejahatan (*crime rate*) selama periode tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Jumlah orang yang terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk pada tahun 2015 sekitar 140 orang, menjadi 140 orang pada tahun 2016, dan menurun menjadi 129 orang pada tahun 2017.

Data Susenas yang menggambarkan persentase penduduk menjadi korban kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2016–2017 juga memperlihatkan pola yang mirip. Persentase penduduk korban kejahatan mengalami penurunan dari 1,22 persen pada tahun 2016 menjadi 1,18 persen pada tahun 2017.

Berdasarkan data Podes periode tahun 2011-2018 jumlah desa/kelurahan yang menjadi ajang konflik massal cenderung meningkat, dari sekitar 2.500 desa pada tahun 2011 menjadi sekitar 2.700 desa/kelurahan pada tahun 2014, dan kembali meningkat menjadi sekitar 3.100 desa/kelurahan pada tahun 2018.

## **EXECUTIVE SUMMARY**

*The 2018 Criminal Statistics publication presents an overview of the level and trend of crime in Indonesia during the period 2015-2017. The information presented includes three main approaches to criminal statistics, namely the perpetrator's approach, the victim's approach, and the regional approach.*

*The data presented in this publication are obtained from two main sources of criminal statistics, (1) Administrative based data, namely criminal data collected by the Indonesian National Police (POLRI) and (2) Survey-based data, namely criminal data sourced from the National Socio-Economic Survey (Susenas) and Village Potential Data Collection (Podes) produced by the BPS-Statistics Indonesia.*

*Police registration data records that the crime rate for the period 2015-2017 has decreased. The number of people affected by crime in every 100,000 population in 2015 was around 140 people, to 140 people in 2016, and decreased to 129 in 2017.*

*the National Socio-Economic Survey (Susenas) data that illustrates the percentage of the population being victims of crimes in Indonesia during the period 2016-2017 also shows a similar pattern. The percentage of victims of crime has decreased from 1.22 percent in 2016 to 1.18 percent in 2017.*

*Based on the Village Potential Data Collection (Podes) data for the period 2011-2018 the number of villages / sub-district that became the scene of mass conflict tended to increase, from around 2,500 villages in 2011 to around 2,700 villages / kelurahan in 2014, and again increased to around 3,100 villages / sub-district in 2018.*

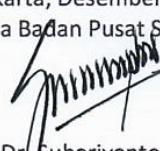
## KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Kriminal 2018 merupakan publikasi yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum terkait data kriminalitas di Indonesia. Publikasi ini juga menyajikan data statistik di bidang kriminal antar waktu. Penerbitan publikasi ini akan sangat bermanfaat untuk memonitor pelaksanaan, perkembangan dan pencapaian program-program pembangunan, khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Data yang disajikan pada publikasi ini merupakan data yang berasal dari tiga sumber, yaitu laporan registrasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan BPS.

Data registrasi Polri menggambarkan situasi keamanan berdasarkan pencatatan kejadian kejahatan yang dilaporkan masyarakat atau kejadian yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Data Susenas menggambarkan pengalaman menjadi korban kejahatan berdasarkan informasi dari rumah tangga/individu korban kejahatan. Data Podes menggambarkan situasi keamanan di wilayah desa/kelurahan yang bersumber dari keterangan kepala desa/lurah. Karena cara pendekatan pengumpulan data yang berbeda, ketiga jenis data tersebut tidak dapat secara langsung dibandingkan tetapi bisa saling melengkapi (komplementer).

Akhir kata, kami berharap agar publikasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pengambil keputusan sebagai acuan atau rujukan dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan pembangunan nasional terutama pembangunan di bidang keamanan. Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu berbagai masukan, kritik, dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik  
  
Dr. Suharyanto



**DAFTAR ISI**

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang .....	3
Maksud dan Tujuan .....	4
Ruang Lingkup .....	5
Sistematika Penyajian.....	5
<b>BAB 2 KEJADIAN KEJAHATAN .....</b>	<b>7</b>
Angka Kejahatan Secara Umum (Nasional) .....	9
Angka Kejahatan Secara Umum (Provinsi/Polda).....	10
Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi (Nasional) .....	13
Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan/Homicide).....	15
Kejahatan Terhadap Fisik/Badan ( <i>Violence</i> ).....	16
Kejahatan Terhadap Kesusilaan.....	16
Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang .....	17
Kejahatan Terhadap Hak/milik dengan Penggunaan Kekerasan.....	17
Kejahatan Terhadap Hak/milik tanpa Penggunaan Kekerasan .....	18
Kejahatan Terkait Narkotika .....	19
Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi.....	20
Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi .....	21
Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan/Homicide).....	21
Kejahatan Terhadap Fisik/Badan ( <i>Violence</i> ).....	22

Kejahatan Terhadap Kesusilaan.....	23
Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang .....	24
Kejahatan Terhadap Hak/milik dengan Penggunaan Kekerasan.....	25
Kejahatan Terhadap Hak/milik tanpa Penggunaan Kekerasan .....	26
Kejahatan Terkait Narkotika .....	28
Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi.....	29
Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayahana .....	30
Konflik Massal.....	38
<b>BAB 3 KORBAN KEJAHATAN .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB 4 PERSEPSI RASA AMAN MASYARAKAT DAN UPAYA MENJAGA KEAMANAN .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>CATATAN TEKNIS .....</b>	<b>67</b>
Jenis dan Sumber Data .....	67
Konsep dan Definisi .....	70
Penjelasan Teknis .....	74
<b>LAMPIRAN TABEL.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR GAMBAR

### **II. KEJADIAN KEJAHATAN**

Gambar 2. 1.	Jumlah Kejahatan (Crime Total) dan Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (Crime Rate), Tahun 2015 - 2017 .....	10
Gambar 2. 2.	Jumlah Kejahatan (Crime Total) yang dilaporkan Menurut Polda, Tahun 2017.....	11
Gambar 2. 3.	Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (Crime Rate), Menurut Polda, Tahun 2017.....	12
Gambar 2. 4.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, Tahun 2013 - 2017.....	15
Gambar 2. 5.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan, Tahun 2013 - 2017.....	16
Gambar 2. 6.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusailaan, Tahun 2013 - 2017.....	17
Gambar 2. 7.	Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, Tahun 2013 - 2017.....	17
Gambar 2. 8.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan, Tahun 2013 - 2017 .....	18
Gambar 2. 9.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan, Tahun 2013 - 2017 .....	19
Gambar 2. 10.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, Tahun 2013 – 2017.....	20
Gambar 2. 11.	Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, Tahun 2013 - 2017 .....	20
Gambar 2. 12.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut Polda, Tahun 2017.....	21
Gambar 2. 13.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan Menurut Polda, Tahun 2017.....	22
Gambar 2. 14.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusailaan Menurut Polda, Tahun 2017.....	23
Gambar 2. 15.	Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Menurut Polda, Tahun 2017 .....	24
Gambar 2. 16.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Polda, Tahun 2017 .....	26
Gambar 2. 17.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Polda, Tahun 2017 .....	27
Gambar 2. 18.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika Menurut Polda, Tahun 2017.....	28

Gambar 2. 19.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Menurut Polda, Tahun 2017 .....	29
Gambar 2. 20.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	30
Gambar 2. 21.	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018.....	32
Gambar 2. 22.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan P Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018 .....	33
Gambar 2. 23.	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018 .....	34
Gambar 2. 24.	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018.....	35
Gambar 2. 25.	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018.....	36
Gambar 2. 26.	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018 .....	37
Gambar 2. 27.	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal. Tahun 2011 - 2018 .....	40
Gambar 2. 28.	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Tipennya. Tahun 2014 dan 2018.....	41
Gambar 2. 29.	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya. Tahun 2014 dan 2018.....	43
Gambar 2. 30.	Jumlah Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal .....	44

### **III. KORBAN KEJAHATAN**

Gambar 3. 1.	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Tahun 2016–2017.....	47
Gambar 3. 2.	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016–2017.....	48
Gambar 3. 3.	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2016–2017.....	49

Gambar 3. 4.	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Provinsi, Tahun 2016–2017.....	50
Gambar 3. 5.	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan jenis Kelamin dan Provinsi, Tahun 2018.....	51
Gambar 3. 6.	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Usia dan Provinsi, Tahun 2018 .....	51
Gambar 3. 7.	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Tahun 2016–2017 .....	52

#### **IV. PERSEPSI RASA AMAN DAN UPAYA MENJAGA KEAMANAN**

Gambar 4. 1.	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, Tahun 2017.....	56
Gambar 4. 2.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	58
Gambar 4. 3.	Persentase Desa/Kelurahan yang terdapat Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2018.....	60

## DAFTAR TABEL LAMPIRAN

### **II. KEJADIAN KEJAHATAN**

#### **Sumber Data : Kepolisian RI**

Tabel 2. 1. 1.	Indikator Kriminalitas Nasional, Tahun 2015-2017 .....	78
Tabel 2. 1. 2.	Peringkat Polda Menurut Jumlah Kejahatan (Crime Total) dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (Crime Rate), Tahun 2017 .....	79
Tabel 2. 1. 3.	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total) Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2015-2017 .....	80
Tabel 2. 1. 4.	Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (Crime Cleared) Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2015-2017 .....	81
Tabel 2. 1. 5.	Percentase Penyelesaian Kejahatan (Clearance Rate) Menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2015-2017 .....	82
Tabel 2. 1. 6.	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (Crime Clock) Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2015-2017 .....	83
Tabel 2. 1. 7.	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (Crime Rate) per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2015-2017 ....	84
Tabel 2. 1. 8.	Banyaknya Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, Tahun 2015-2017 .....	85
Tabel 2. 1. 9.	Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan di Tahun 2017.....	86
Tabel 2. 1. 10.	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, Tahun 2015 .....	90
Tabel 2. 1. 11.	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, Tahun 2016.....	96
Tabel 2. 1. 12	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, Tahun 2017 .....	102

#### **Sumber Data : Potensi Daerah**

Tabel 2. 2. 1.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	110
Tabel 2. 2. 2.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	111
Tabel 2. 2. 3.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	112

Tabel 2. 2. 4.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	113
Tabel 2. 2. 5.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	114
Tabel 2. 2. 6.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014 , dan 2018 .....	115
Tabel 2. 2. 7.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	116
Tabel 2. 2. 8.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018 .....	117
Tabel 2. 2. 9.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018 .....	118
Tabel 2. 2. 10.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	119
Tabel 2. 2. 11.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	120
Tabel 2. 2. 12.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	121
Tabel 2. 2. 13.	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018 .....	122
Tabel 2. 2. 14.	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018 .....	123
Tabel 2. 2. 15.	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018 .....	124
Tabel 2. 2. 16.	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018 .....	125
Tabel 2. 2. 17.	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018 .....	126

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel 2. 2. 18. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/ Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	127
Tabel 2. 2. 19. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018 .....	128
Tabel 2. 2. 20. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	129
Tabel 2. 2. 21. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	130
Tabel 2. 2. 22. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	131

**Sumber Data : Potensi Daerah**

Tabel 2. 3. 1.	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	134
Tabel 2. 3. 2.	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	135
Tabel 2. 3. 3.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011.....	136
Tabel 2. 3. 4.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2014.....	138
Tabel 2. 3. 5.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2018.....	140
Tabel 2. 3. 6.	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011.....	142
Tabel 2. 3. 7.	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2014.....	144
Tabel 2. 3. 8.	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2018.....	146
Tabel 2. 3. 9.	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaiannya Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018 .....	148

**III. KORBAN KEJAHATAN****Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional**

Tabel 3. 1. 1.	Persentase Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang di Alami, Tahun 2016 dan 2017.....	150
Tabel 3. 1. 2.	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, Tahun 2016-2017 .....	151
Tabel 3. 1. 3.	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2016-2017 .....	152
Tabel 3. 1. 4.	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, Tahun 2016-2017 .....	153

Tabel 3. 1. 5.	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, Tahun 2016-2017.....	154
Tabel 3. 1. 6.	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Penganiayaan Menurut Provinsi, Tahun 2016-2017.....	155
Tabel 3. 1. 7.	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2016-2017.....	156
Tabel 3. 1. 8.	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dengan Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2016-2017.....	157
Tabel 3. 1. 9.	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Lainnya Menurut Provinsi, Tahun 2016-2017.....	158
Tabel 3. 1. 10.	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2016-2017 .....	159
Tabel 3. 1. 11.	Persentase Penduduk yang Pernah Melapor dan Mendapat Penanganan Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2016-2017 .....	160
Tabel 3. 1. 12.	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi Menurut Jenis Kejahatan dan Provinsi, Tahun 2018.....	161

#### **IV. PERSEPSI RASA AMAN DAN UPAYA MENJAGA KEAMANAN**

##### **Sumber Data : Modul Ketahanan Sosial - Survei Sosial Ekonomi Nasional**

Tabel 4. 1. 1.	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, Tahun 2017...	164
Tabel 4. 1. 2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kekhawatiran Ketika Melakukan Perjalanan dari dan Menuju Tempat Kerja/Aktivitas Menurut Provinsi, Tahun 2017.....	165
Tabel 4. 1. 3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kekhawatiran Ketika Meninggalkan Rumah dalam Keadaan Tidak Berpenghuni Menurut Provinsi, Tahun 2017.....	166
Tabel 4. 1. 4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Pengamanan yang Digunakan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, Tahun 2017 .....	167
Tabel 4. 1. 5.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Pengamanan yang Digunakan di Tempat Tinggal/Rumah, Tahun 2017 .....	169

##### **Sumber Data : Potensi Desa**

Tabel 4 .2. 1.	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	172
----------------	--	-----

Tabel 4. 2. 2.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga keamanan Tahun 2011.....	173
Tabel 4. 2. 3.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Tahun 2014.....	174
Tabel 4. 2. 4.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Tahun 2018.....	175
Tabel 4. 2. 5.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2011 .....	176
Tabel 4. 2. 6.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2014 .....	177
Tabel 4. 2. 7.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2018 .....	178
Tabel 4. 2. 8.	Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Menurut Provinsi, Tahun 2011,2014, dan 2018.....	179
Tabel 4. 2. 9.	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018	180
Tabel 4. 2. 10.	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Menambah Anggota Hansip/Linmas Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	181
Tabel 4. 2. 11.	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan*) Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	182
Tabel 4. 2. 12.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2014 .....	183
Tabel 4. 2. 13	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2018 .....	184
Tabel 4. 2. 14.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2014 .....	185
Tabel 4. 2. 15.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2018 .....	186



# BAB I

## PENDAHULUAN

**“Rasa aman  
merupakan salah satu  
hak asasi yang harus  
dinikmati setiap orang”**





# Bab I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (*Maslow, 1943*), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua dibawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluru tumpah darah Indonesia". Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

### Maksud dan Tujuan

Penulisan publikasi Statistik Kriminal 2018 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Indonesia.

### Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan gambaran kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Indonesia, baik pada level provinsi maupun level nasional. Khusus untuk data yang bersumber dari Mabes Polri disajikan menurut wilayah/daerah Kepolisian (Polda) dan nasional.

Sesuai dengan ketersediaan data, untuk keseluruhan statistik dan indikator mengenai kejadian tindak kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan disajikan selama tiga tahun terakhir berturut-turut, yaitu Tahun 2014, 2015, dan 2016. Untuk keseluruhan statistik dan indikator mengenai kejadian perkelahian massal disajikan selama tiga periode terakhir, yaitu tahun 2008, 2011, dan 2014.

### Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam beberapa bagian (Bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi, Bab II menyajikan gambaran umum dan perkembangan kejadian kejahatan termasuk kejadian kejahatan berdasarkan data polisi dan gambaran kejadian kejahatan dan konflik secara kewilayahan bersumber dari Podes. Bab III akan menyajikan data korban kejahatan berdasarkan karakteristik demografi dan sosial ekonomi. Bab IV menyajikan persepsi rasa aman masyarakat dan upaya masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. Catatan

BAB I  
PENDAHULUAN

teknis menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini, meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi, dan penjelasan mengenai statistik/indikator yang disajikan. Pada bagian terakhir terdapat daftar pustaka dan tabel lampiran.

*https://www.bps.go.id*

## BAB II

# KEJADIAN KEJAHATAN



Jumlah kejadian kejahatan  
**(Crime Total)** dan Tingkat risiko  
terkena kejahatan **(Crime Rate)**  
berada di tiga besar nasional

**1** *Crime Total*  
Sumatera Utara  
39.867

**3** *Crime Rate*  
Sumatera Utara  
280



# Bab 2

## KEJADIAN KEJAHATAN

### Angka Kejahatan Secara Umum (Nasional)

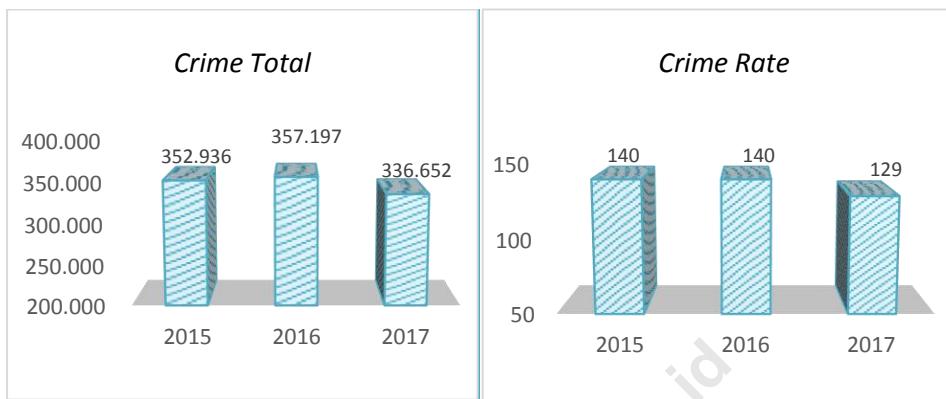
Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Meski demikian perlu kehatian-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmetika sederhana yang menggabung semua jenis kejahatan dalam perhitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya (Savitz, 1978).

Selama periode tahun 2015–2017, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung flukuatif. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.1, data Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2015 sebanyak 352.936 kasus, meningkat menjadi sebanyak 357.197 kasus pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 menjadi 336.652 kasus.

Pada 2017 dari setiap 100.000 orang, 129 diantaranya terkena tindak kejahatan (*crime rate*).

Sejalan dengan *crime total*, jumlah orang yang terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk juga mengalami penurunan pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 129 orang. Angka ini menurun dari 140 orang pada tahun 2015 dan 2016. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu

**Gambar 2. 1 Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*), Tahun 2015 - 2017**



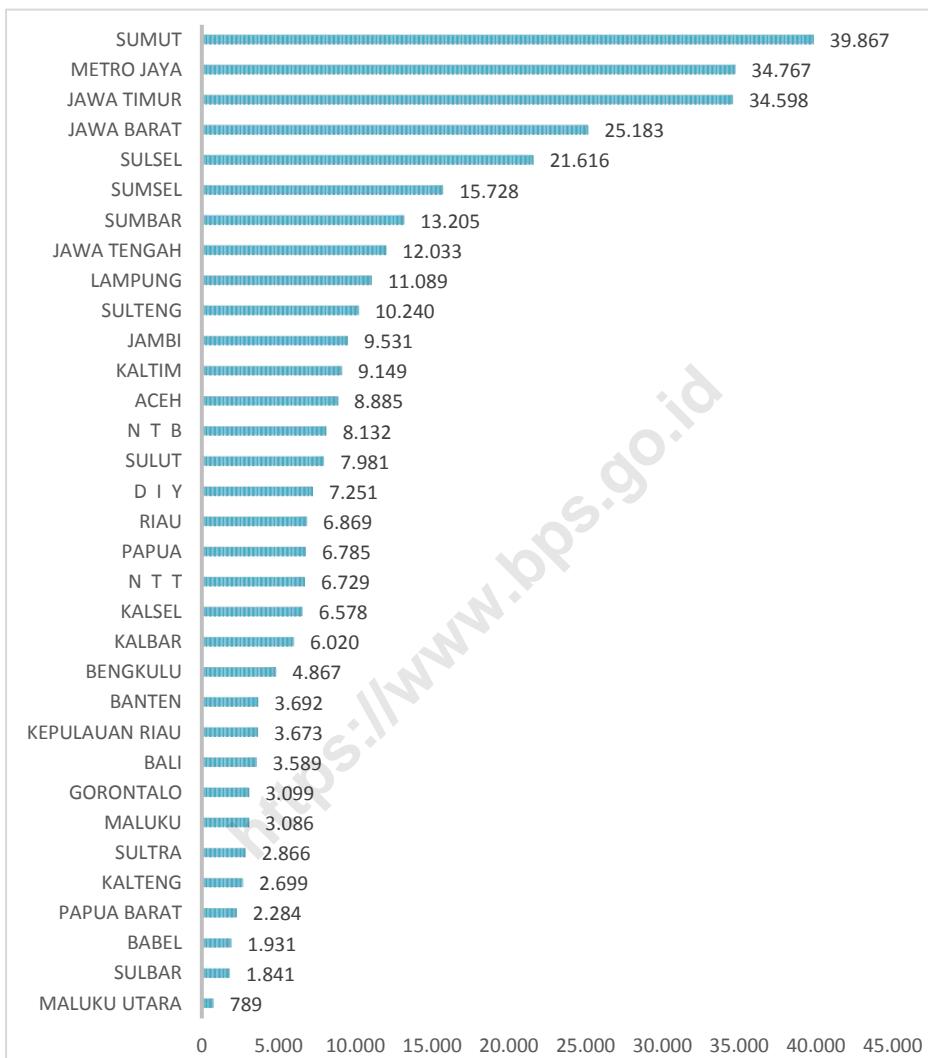
Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Indikator-indikator kriminalitas lainnya selama periode 2015-2017 juga menunjukkan pola perkembangan yang serupa. Selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) 00.01'29" (1 menit 29 detik) pada tahun 2015 dan menjadi sebesar 00.01'28" (1 menit 28 detik) pada tahun 2016. Kemudian intervalnya menjadi semakin panjang pada tahun 2017 menjadi sebesar 00.01'33" (1 menit 33 detik). Interval waktu yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun dan sebaliknya.

#### **Angka Kejahatan Secara Umum (Provinsi/Polda)**

Dari segi jumlah kejahatan untuk level provinsi/polda selama tahun 2017 Polda Sumatera Utara mencatat jumlah kejahatan terbanyak (39.867 kasus), disusul oleh Polda Metro Jaya (34.767 kasus), dan Polda Jawa Timur (34.598 kasus). Polda Maluku Utara, Sulawesi Barat dan Kep Bangka Belitung, merupakan tiga Polda dengan jumlah kejahatan paling sedikit dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 789; 1.841; dan 1.931, (lihat Gambar 2.2). Perlu menjadi catatan bahwa jumlah kejahatan bisa sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah.

**Gambar 2. 2 Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) yang dilaporkan Menurut Polda, Tahun 2017**

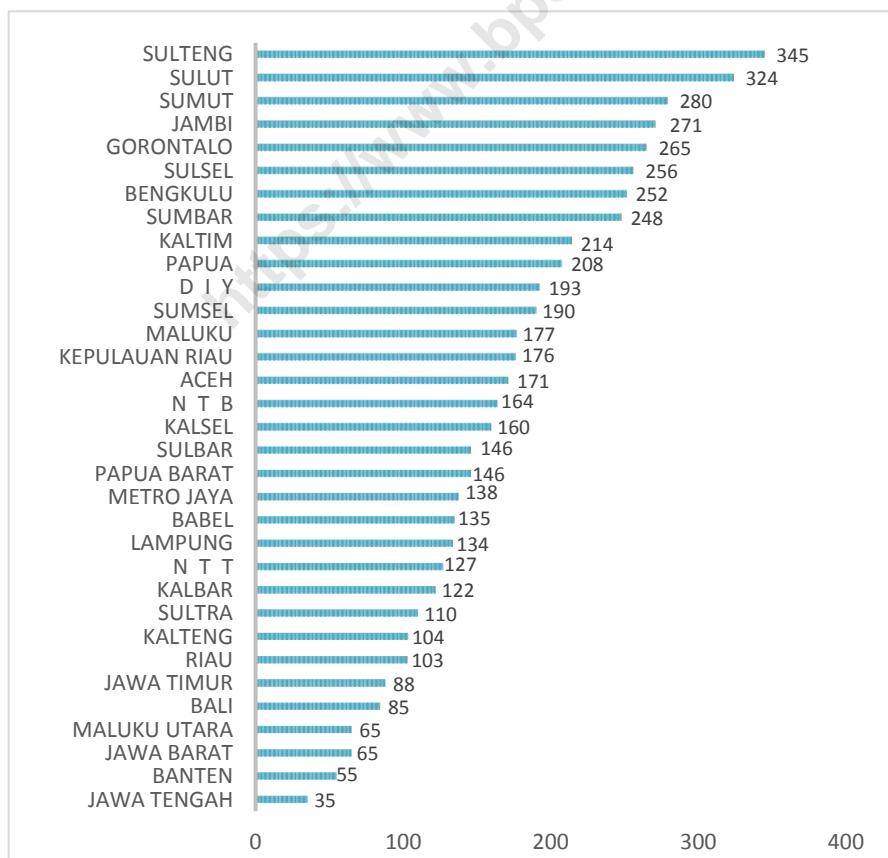


Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Meskipun Jawa Barat dan Jawa Timur dari sisi jumlah kejadian (*crime total*) termasuk kategori lima terbesar, tetapi dari sisi tingkat kejahatan (*crime rate*) termasuk kelompok lima terendah. Hal ini tentu karena pengaruh jumlah penduduk. Terkait *crime rate*, Polda Sulawesi Tengah mencatat tingkat kejahatan tertinggi yakni 345 (setiap 100.000 penduduk sebanyak 345 orang yang terkena tindak kejahatan), disusul oleh Polda Sulawesi Utara (324) dan Sumatera Utara (280).

Pada 2017, Polda Sumatera Utara, merupakan Polda yang jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) dan tingkat risiko terkena Kejahatan (*Crime Rate*) sama-sama berada tiga besar nasional.

**Gambar 2.3 Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*), Menurut Polda, Tahun 2017**



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

## Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi (Nasional)

Jumlah kejahatan (*crime total*) dan tingkat risiko terkena kejahatan (*crime rate*) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara umum. Angka kejahatan tersebut dapat lebih bermanfaat khususnya dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah apabila dilihat secara lebih detail. Publikasi ini mengelompokkan jenis kejahatan berdasarkan beberapa kriteria, yakni:

1. Target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, Negara, dan sebagainya).
2. Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya).
3. Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan, dan sebagainya).

Hal ini secara umum sejalan dengan pengelompokan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) yang digagas Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) (UNODC, 2015).

Jenis Kejahatan dapat dikelompokan berdasarkan tingkat keseriusan maupun targetnya (objek).

Berikut klasifikasi kejahatan yang terdapat di dalam publikasi ini :

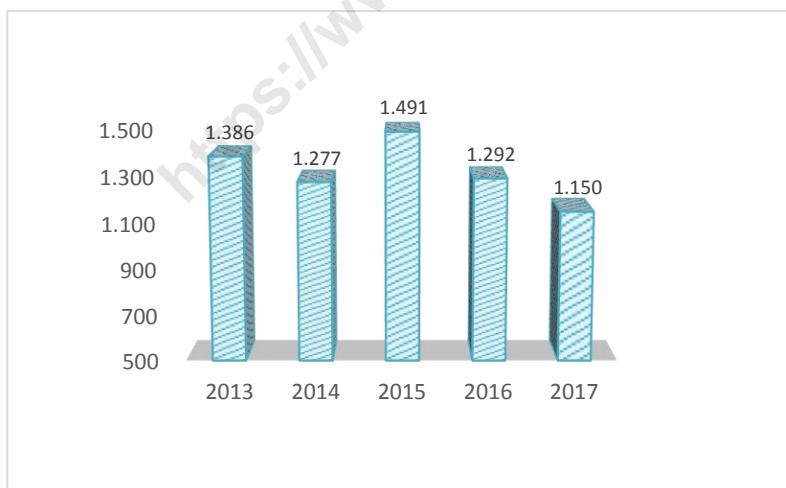
No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
1	Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan
2	Kejahatan terhadap Fisik/Badan	Penganiayaan Berat Penganiayaan Ringan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3	Kejahatan terhadap Kesusastraan	Perkosaan Pencabulan
4	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Penculikan Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
5	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)
6	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	Pencurian Pencurian dengan pemberatan Pencurian Kendaraan Bermotor Pengrusakan/Penghancuran Barang Pembakaran dengan Sengaja Penadahan
7	Kejahatan Terkait Narkotika	Narkotika dan Psikotropika
8	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Penipuan/Perbuatan Curang Penggelapan Korupsi
9	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	Terhadap Ketertiban Umum

## **Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan/Homicide)**

Selama periode lima tahun terakhir, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan/*homicide*) di Indonesia fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.4, memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa pada tahun 2013 hingga 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 melonjak menjadi 1.491 kasus (tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir). Angka ini kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 1.292 kasus dan tahun 2017 menurun kembali menjadi 1.150 kasus (jumlah kasus kejadian tidak mencerminkan jumlah korban karena pada satu kejadian bisa jadi lebih dari satu orang).

Tahun 2017, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan/*homicide*) di Indonesia menurun.

**Gambar 2.4 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, Tahun 2013 - 2017**



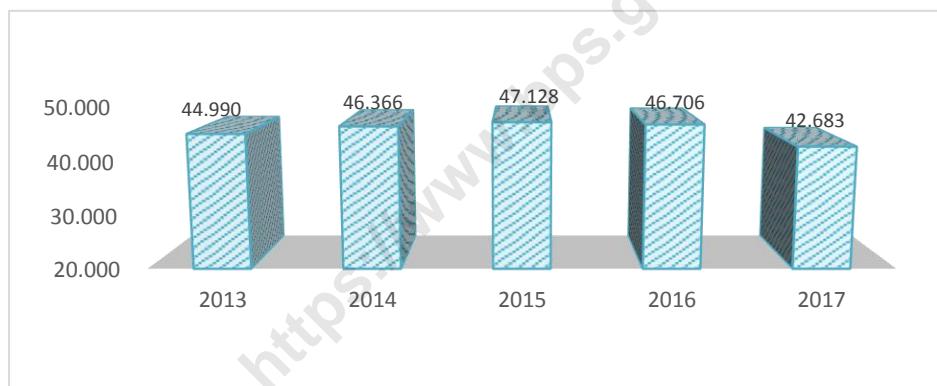
Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

### **Kejahatan Terhadap Fisik/Badan (*Violence*)**

Untuk kejadian kejahatan terhadap fisik/badan (*violence*) pada 2017 jumlah kejadian di Indonesia cenderung menurun. Berdasarkan Gambar 2.5 pada 2016 terjadi 46.706 kasus, pada tahun 2017 menurun menjadi 42.683. Kejahatan terhadap fisik termasuk didalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada 2017, jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik (*violence*) di Indonesia cenderung menurun.

**Gambar 2. 5 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan, Tahun 2013 - 2017**



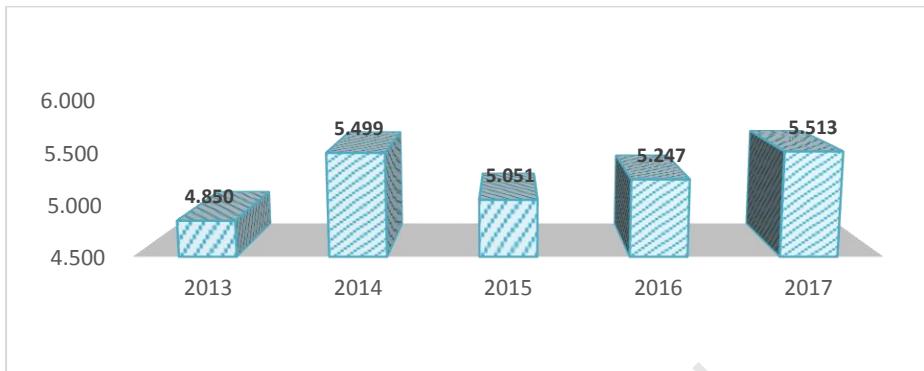
Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

### **Kejahatan Terhadap Kesusilaan**

Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan di Indonesia selama lima tahun terakhir tertinggi pada 2017.

Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) di Indonesia selama 2013-2017 berfluktuasi. Gambar 2.6 memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 tercatat sebanyak 5.051 kasus kejadian kejahatan terhadap kesusilaan, meningkat pada tahun 2016 meningkat menjadi 5.247 kasus. Kemudian jumlah kejadian meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 5.513 kasus.

**Gambar 2. 6 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusaiaan, Tahun 2013 - 2017**



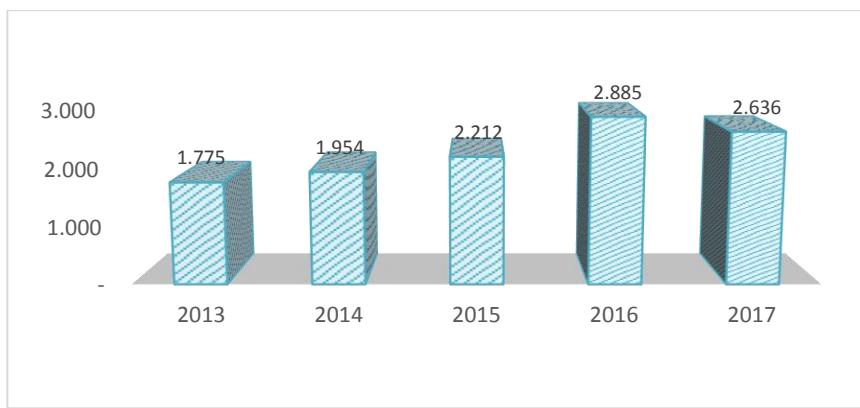
Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

### Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang

Untuk kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang, termasuk penculikan, pada 2017 cenderung menurun. Berdasarkan Gambar 2.7 pada 2016 terjadi 2.885 kasus, dan menurun menjadi 2.636 kasus pada 2017.

Pada 2017, jumlah kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan (termasuk penculikan) di Indonesia cenderung menurun.

**Gambar 2. 7 Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, Tahun 2013 - 2017**



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

### Kejahatan Terhadap Hak/milik dengan Penggunaan Kekerasan

Pada tahun 2017 jumlah kejadian kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan di Indonesia menurun. Termasuk dalam kejahatan tersebut adalah pencurian dengan kekerasan atau dengan menggunakan senjata tajam/senjata api. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.8, jumlah kejadian kejahatan terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan pada tahun 2017 sebanyak 10.692 kasus, menurun dibanding tahun 2016 yang sebanyak 12.095 kejadian.

Terjadi 10.692 kasus pencurian kekerasan selama 2017 (Mabes Polri)

**Gambar 2.8 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan, Tahun 2013 - 2017**



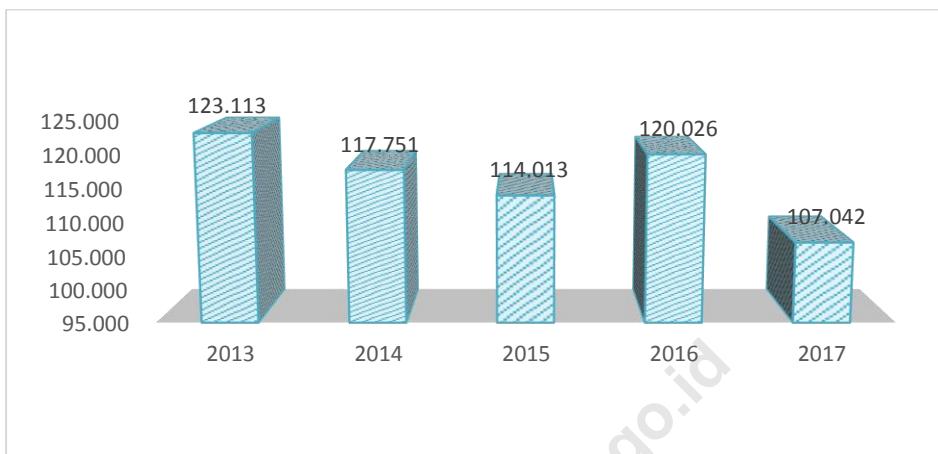
Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

#### Kejahatan Terhadap Hak/milik tanpa Penggunaan Kekerasan

Jumlah kejadian kejahatan terhadap hak/milik tanpa penggunaan kekerasan (*property crime without violence*) selama periode 2013–2017 cenderung menurun. Berdasarkan Gambar 2.9 pada 2016 terjadi 120.026 kasus, menurun menjadi 107.042 kasus pada 2017.

Pada 2017, Polri mencatat sekitar 107.042 kejadian Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang tanpa Kekerasan.

**Gambar 2.9 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan, Tahun 2013 - 2017**



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

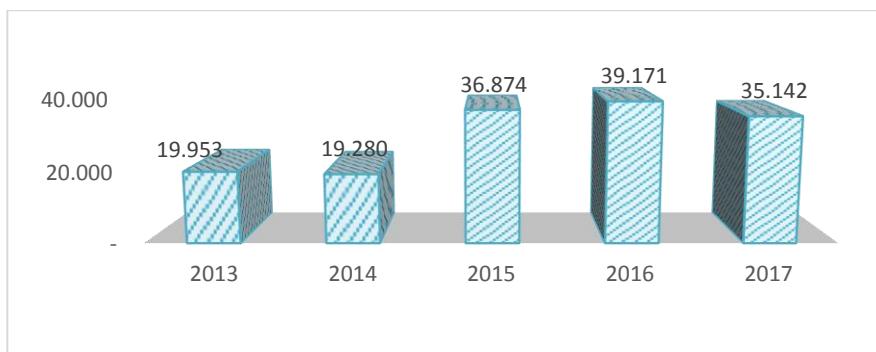
### Kejahatan Terkait Narkotika

Jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika (*drugs*) di Indonesia pada 2012 – 2016 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat.

Berdasarkan Gambar 2.10, jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika (*drugs*) di Indonesia pada 2012 – 2016 cenderung meningkat. Namun, pada 2017 angkanya menurun. Gambar tersebut

memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 39.171 kasus dan pada 2017 dengan jumlah kasus sebanyak 35.142 kasus.

**Gambar 2. 10 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, Tahun 2013 – 2017**



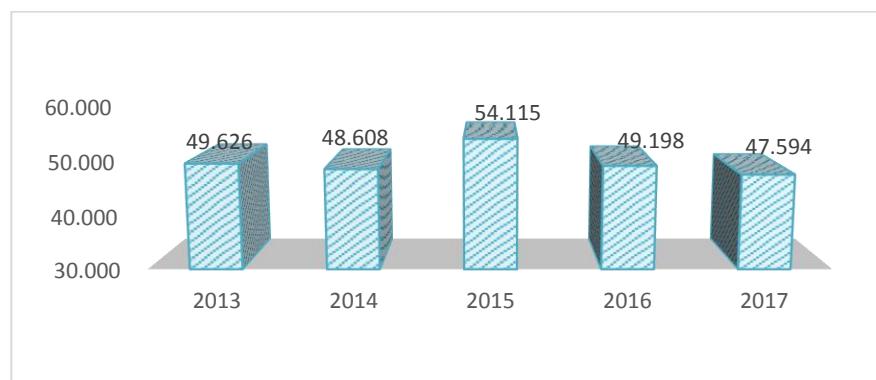
Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

#### **Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi**

Gambar 2.11 menunjukkan kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi yang tercatat di Polri selama periode 2013–2017 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada 2015 terjadi 54.115 kejadian, sementara pada 2016 tercatat 49.198 kejadian. Kemudian pada 2017 angka ini menurun menjadi 47.594.

Terjadi 47.594 kasus terkait penipuan, penggelapan dan korupsi selama 2017 (Mabes Polri).

**Gambar 2. 11 Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, Tahun 2013 - 2017**



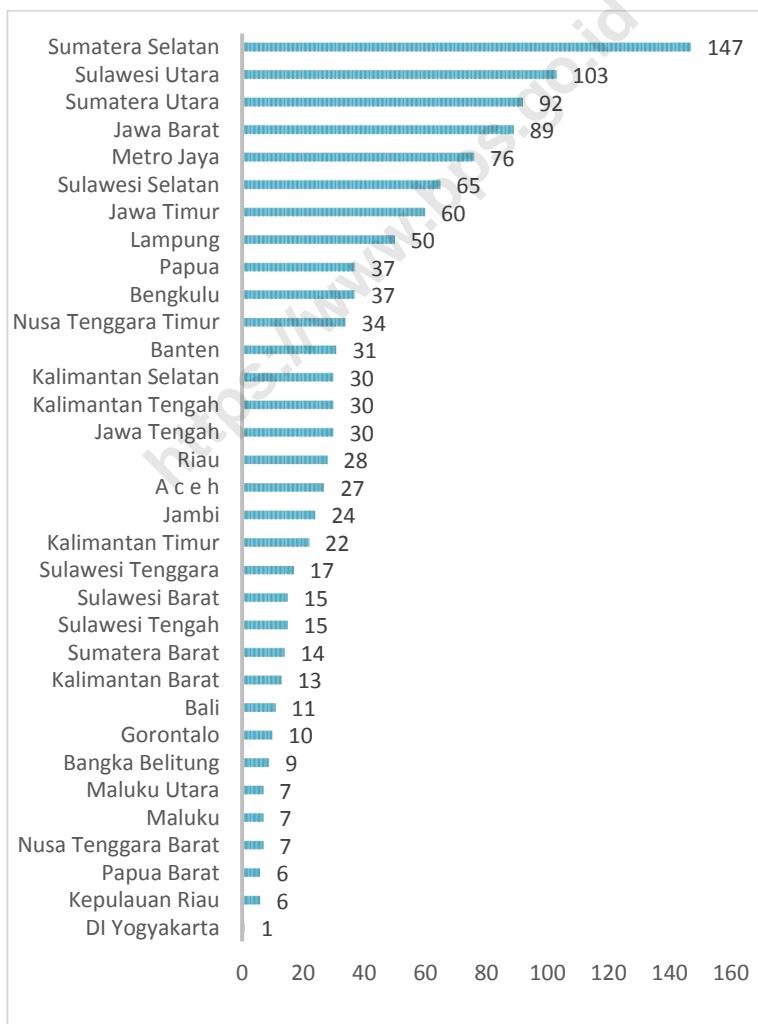
Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

## Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi

### Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan/Homicide)

Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan/Homicide) merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional, selain itu dari sisi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP Indonesia.

**Gambar 2. 12 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut Polda, Tahun 2017**

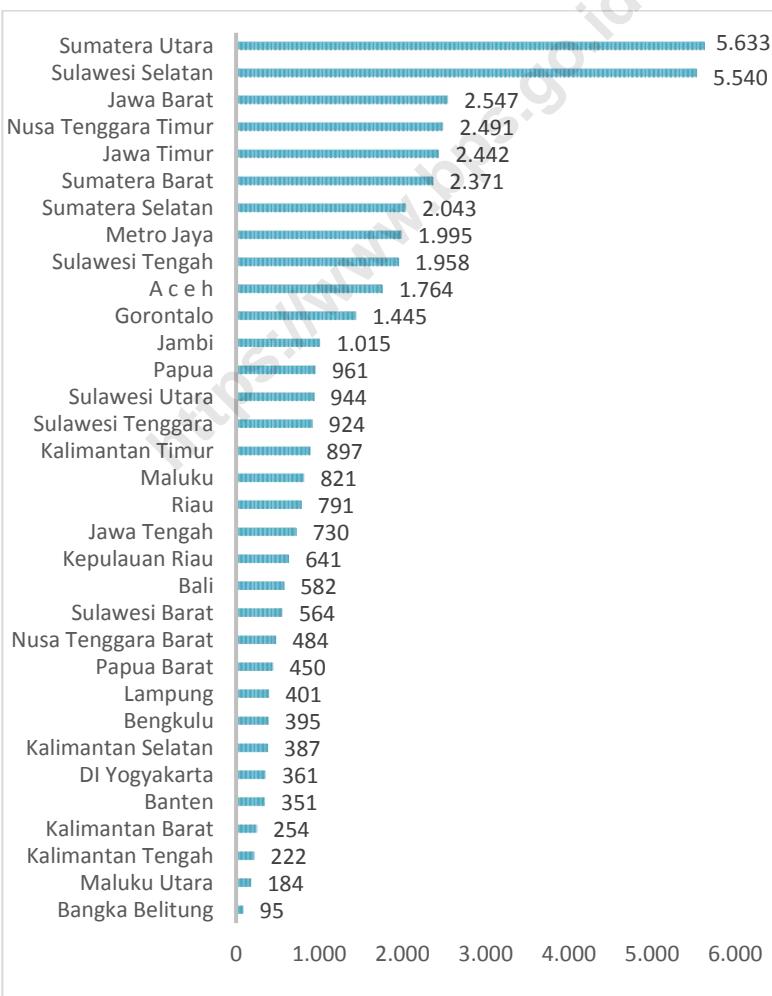


Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Berdasarkan Gambar 2.12 dapat dilihat bahwa tiga Polda yang memiliki jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa terbesar adalah Polda Sumatera Selatan (147 kejadian), Sulawesi Utara (103 kejadian), dan Sumatera Utara sebanyak 92 kejadian. Polda dengan jumlah kejadian paling sedikit terdapat di Papua Barat, Kepulauan Riau, dan DI Yogyakarta, dengan jumlah kejadian masing-masing sebanyak enam, enam dan satu kejadian.

### **Kejahatan Terhadap Fisik/Badan (*Violence*)**

**Gambar 2.13 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan Menurut Polda, Tahun 2017**

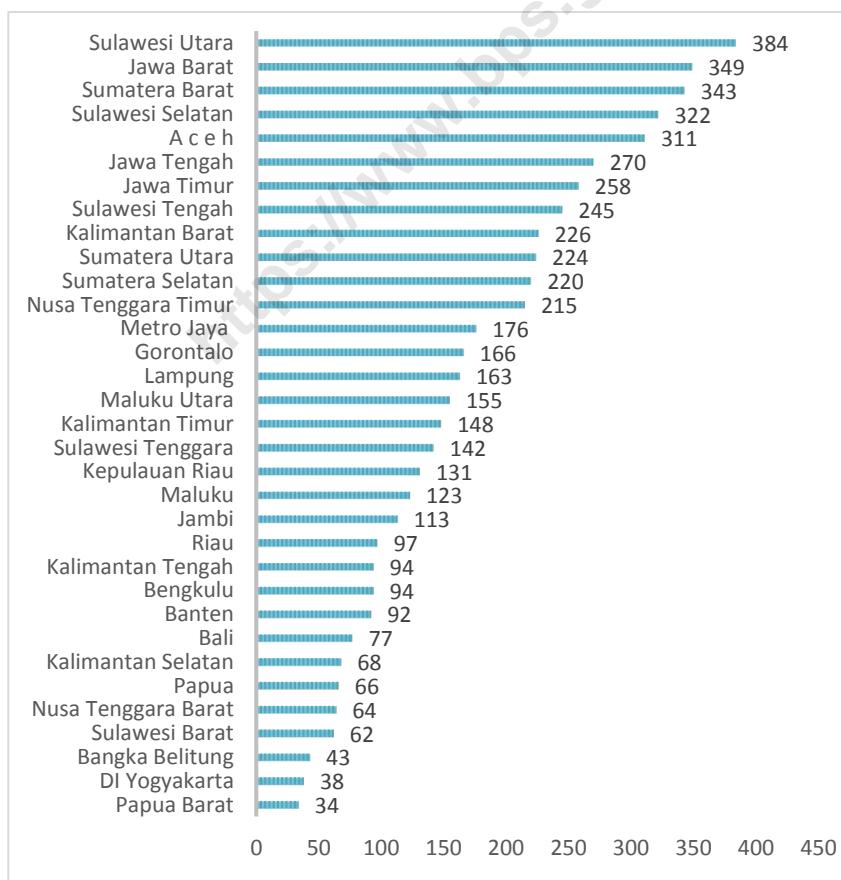


Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Dari Gambar 2.13 juga dapat dilihat bahwa jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan paling banyak terjadi di Polda Sumatera Utara dengan 5.633 kejadian. Polda dengan jumlah kejadian terbanyak kedua adalah Sulawesi Selatan, yaitu sebanyak 5.540 kejadian. Dua Polda yang terdapat kejadian kejahatan terhadap fisik paling sedikit adalah provinsi Maluku Utara dan Kepulauan Bangka Belitung, masing-masing sebanyak 184 dan 95 kejadian. Sebagai salah satu kejadian menonjol menurut Polri, kejadian terhadap fisik dapat dibagi menjadi dua jenis yakni kekerasan fisik ringan dan berat.

### **Kejahatan Terhadap Kesusailaan**

**Gambar 2. 14 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusailaan Menurut Polda, Tahun 2017**

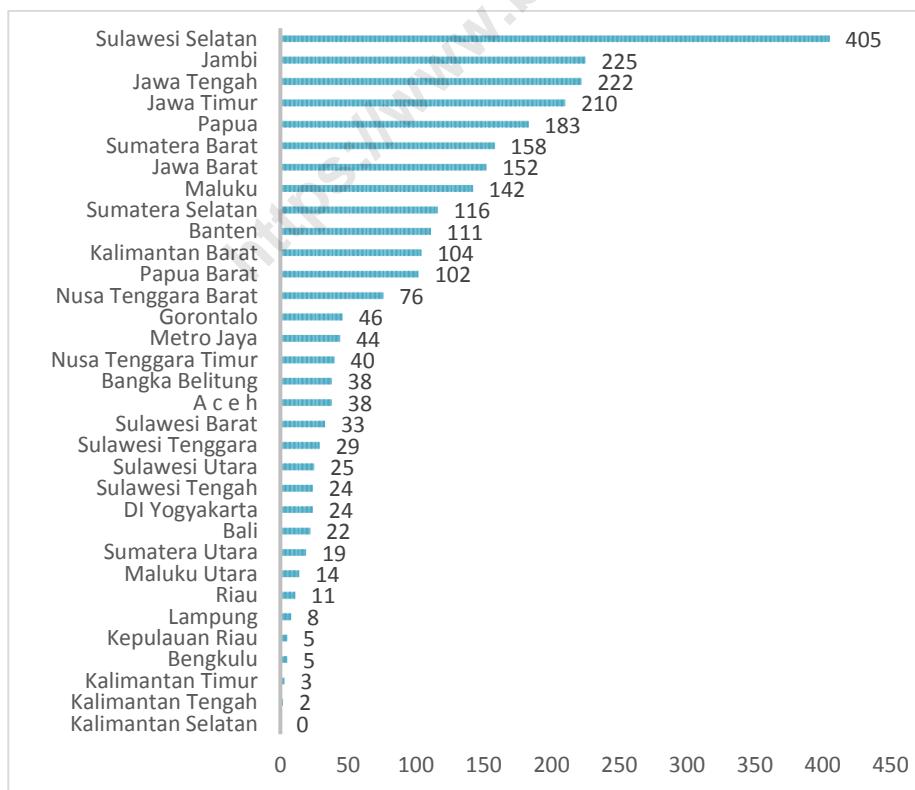


Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.14 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Polda Sulawesi Utara merupakan Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 384 kejadian. Di posisi kedua dan ketiga adalah Polda Jawa Barat dan Polda Sumatera Barat, masing-masing sebanyak 349 kejadian dan 342 kejadian. Wilayah dengan jumlah kejadian paling sedikit adalah Polda Bangka Belitung, DI Yogyakarta, dan Papua Barat. Jumlah kejadian di ketiga Polda tersebut masing-masing 43 kejadian, 38 kejadian dan 34 kejadian. Dalam klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan.

### Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang

**Gambar 2. 15 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Menurut Polda, Tahun 2017**



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

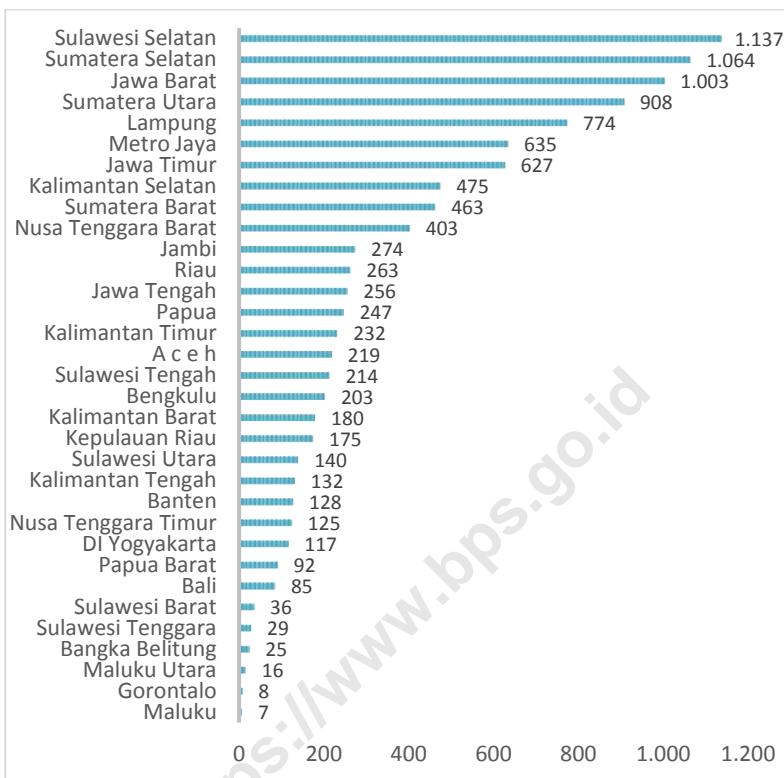
Gambar 2.15 juga menunjukkan jumlah kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang di tahun 2017. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa di Sulawesi Selatan terdapat kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang terbanyak yaitu sebanyak 405. Di posisi kedua terdapat Polda Jambi, yaitu sebanyak 225 kejadian. Sementara Polda Jawa Tengah berada di posisi ketiga dengan kasus sebanyak 222 kejadian. Kalimantan Selatan merupakan Polda di posisi terakhir karena di wilayah tersebut tidak tercatat kejadian kejahatan ini di tahun 2017. Dalam klasifikasi kejahatan terhadap kemerdekaan orang terdiri dari jenis kejahatan penculikan dan mempekerjakan anak dibawah umur.

### **Kejahatan Terhadap Hak/milik dengan Penggunaan Kekerasan**

Sebagai salah satu kejahatan yang dianggap penting dan dikategorikan menonjol oleh Polri, jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan kekerasan selalu menjadi perhatian utama Polri. Biasa disingkat dengan CURAS (Pencurian dengan Kekerasan) modus operandinya terbagi menjadi dua yakni dengan senjata tajam dan senjata api.

Gambar 2.16 menunjukkan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan kekerasan di tahun 2017. Wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak adalah Polda Sulawesi Selatan, yaitu sebanyak 1.137 kejadian. Di posisi kedua terbanyak adalah Sumatera Selatan dengan 1.064 kejadian. Dua wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan paling sedikit adalah Polda Gorontalo dan Maluku. Masing-masing terjadi sebanyak 8 dan 7 kejadian.

**Gambar 2. 16 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Polda, Tahun 2017**



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

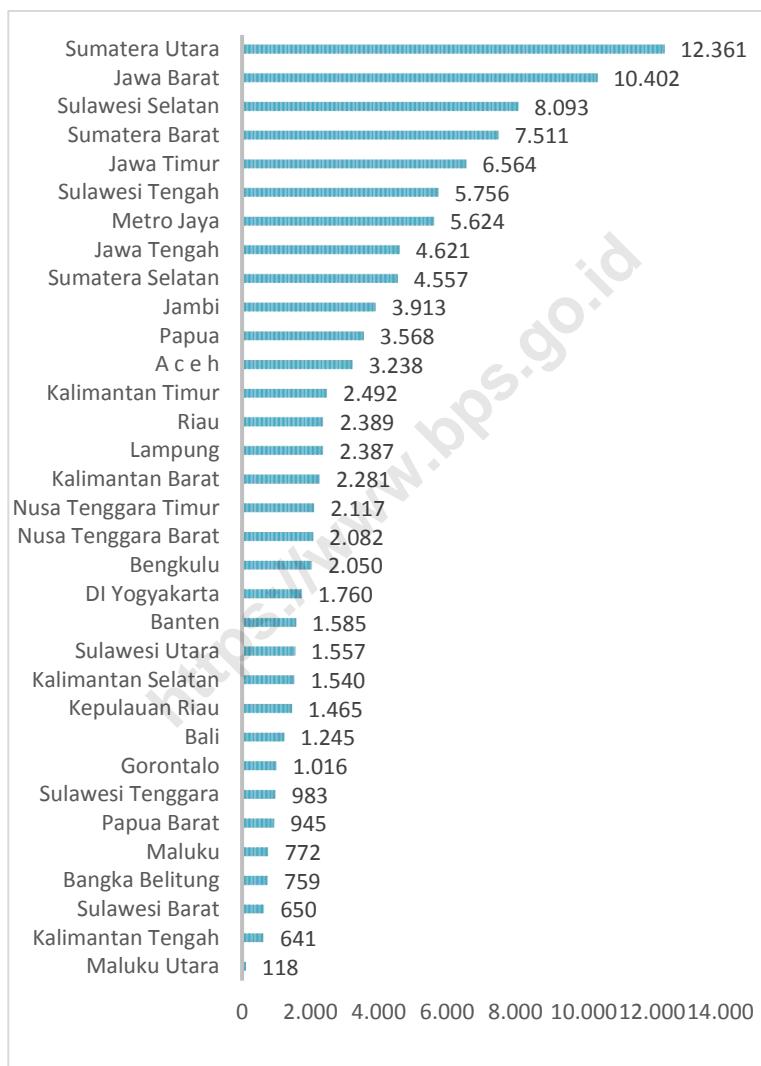
### **Kejahatan Terhadap Hak/milik tanpa Penggunaan Kekerasan**

Kejadian Kejahatan Pencurian Tanpa Penggunaan Kekerasan merupakan jenis kejahatan yang paling banyak dalam segi jumlah setiap tahunnya. Kejahatan ini banyak didominasi oleh kejahatan pencurian biasa dan pencurian kendaraan bermotor.

Gambar 2.17 menunjukkan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan. Polda Sumatera Utara menduduki peringkat pertama dengan 12.361 kejadian kejahatan. Di posisi kedua terdapat polda Jawa Barat dengan 10.402 kejadian. Wilayah dengan jumlah kejadian dua paling

sedikit adalah Polda Kalimantan Tengah dan Maluku Utara masing-masing sebanyak 641 dan 118 kejadian.

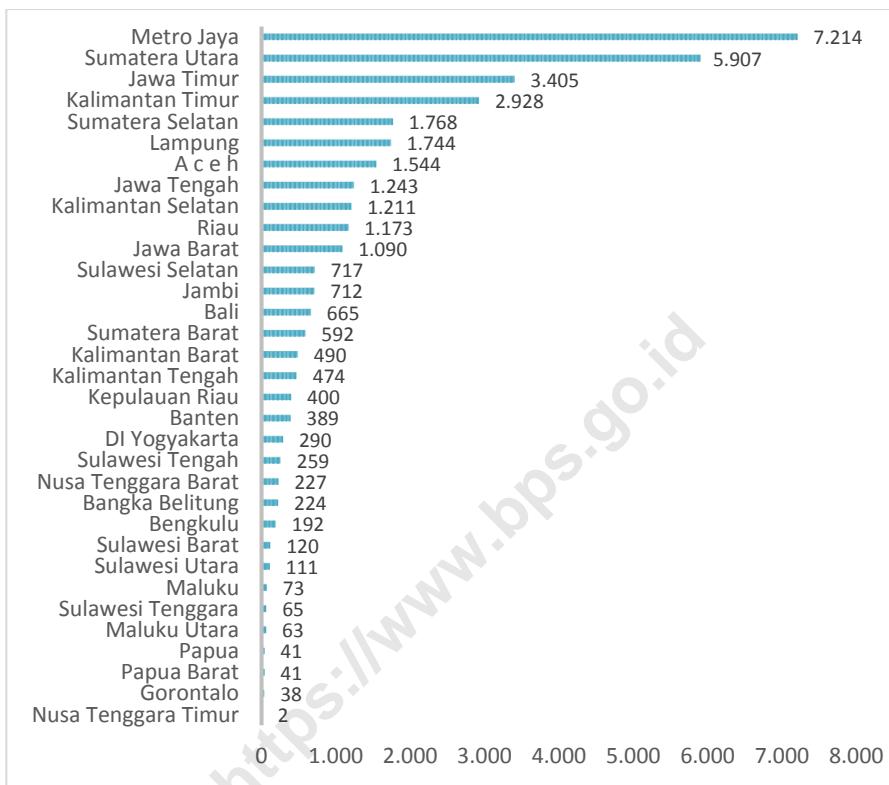
**Gambar 2. 17 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Polda, Tahun 2017**



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

## Kejahatan Terkait Narkotika

Gambar 2. 18 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika Menurut Polda, Tahun 2017



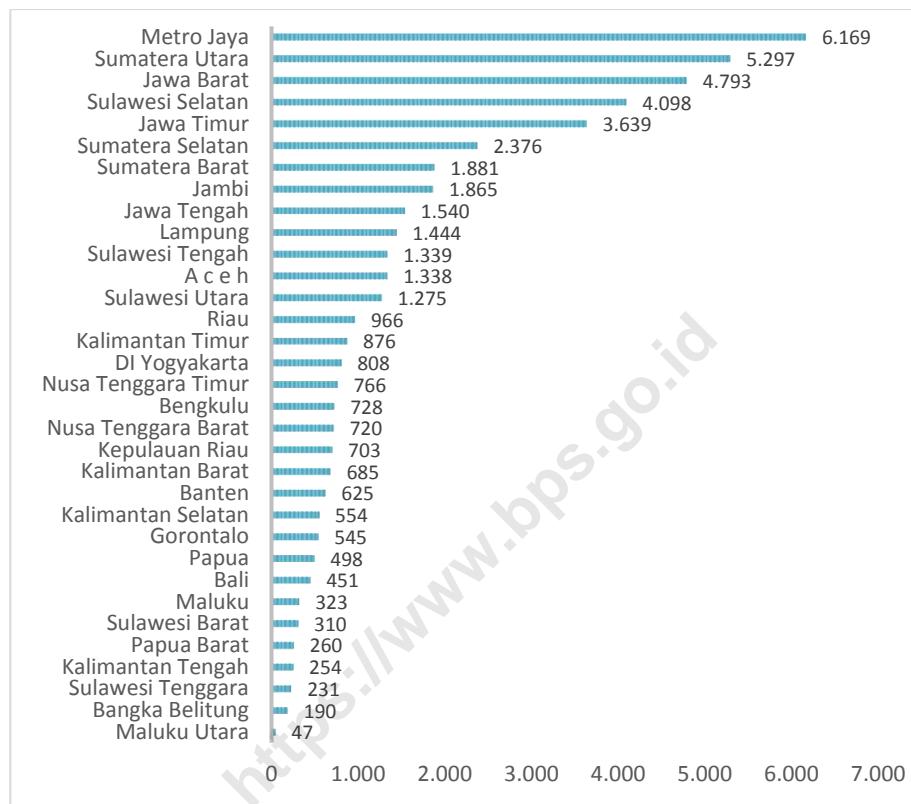
Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.18 menunjukkan bahwa jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika tahun 2017 paling banyak terdapat di Polda Metro Jaya dengan jumlah 7.214 kejadian, kedua adalah di Polda Sumatera Utara dengan jumlah 5.907 kejadian dan ketiga terdapat di Polda Jawa Timur dengan jumlah 3.405 kejadian.

Wilayah dengan jumlah kejadian terendah ada Polda Papua Barat, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur, masing-masing dengan 41 kejadian, 38 kejadian dan 2 kejadian. Termasuk dalam kejahatan terkait narkotika adalah kejahatan narkotika dan psikotropika.

## Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi

Gambar 2.19 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Menurut Polda, Tahun 2017



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

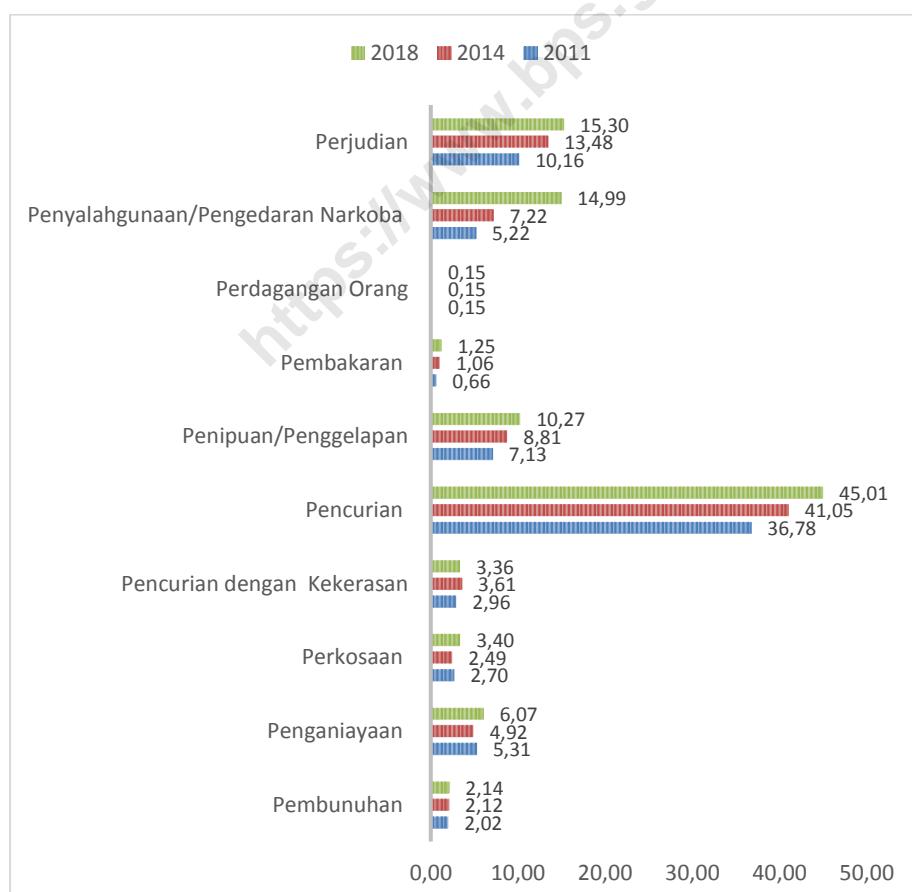
Gambar 2.19 menunjukkan bahwa Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi terbanyak adalah Metro Jaya, sejumlah 6.169 kejadian. Di posisi kedua terbanyak terdapat Polda Sumatera Utara sebanyak 5.297 kejadian.

Polda Bangka Belitung dan Maluku Utara adalah provinsi dengan jumlah kejadian kejahatan ini yang paling sedikit, yaitu masing-masing sebanyak 190 dan 47 kejadian. Dalam klasifikasi kejahatan ini yang paling banyak kejadiannya adalah penipuan dengan jumlah kejadian sebanyak 27.418 kasus.

## Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayah

Selain data kejadian kejahatan yang bersumber data Polri yang menggunakan pendekatan pelaku, kejadian kejahatan juga dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kewilayah/regional (desa/kelurahan). Bagian ini akan memperlihatkan gambaran situasi dan perkembangan kejadian kejahatan yang dialami oleh masyarakat berdasarkan cakupan jumlah desa/kelurahan yang pernah mengalami kejadian kejahatan. Data ini diperoleh dari Pendataan Potensi Desa yang dilakukan oleh BPS tiap tiga tahun.

**Gambar 2. 20 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2011, 2014, dan 2018**



Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

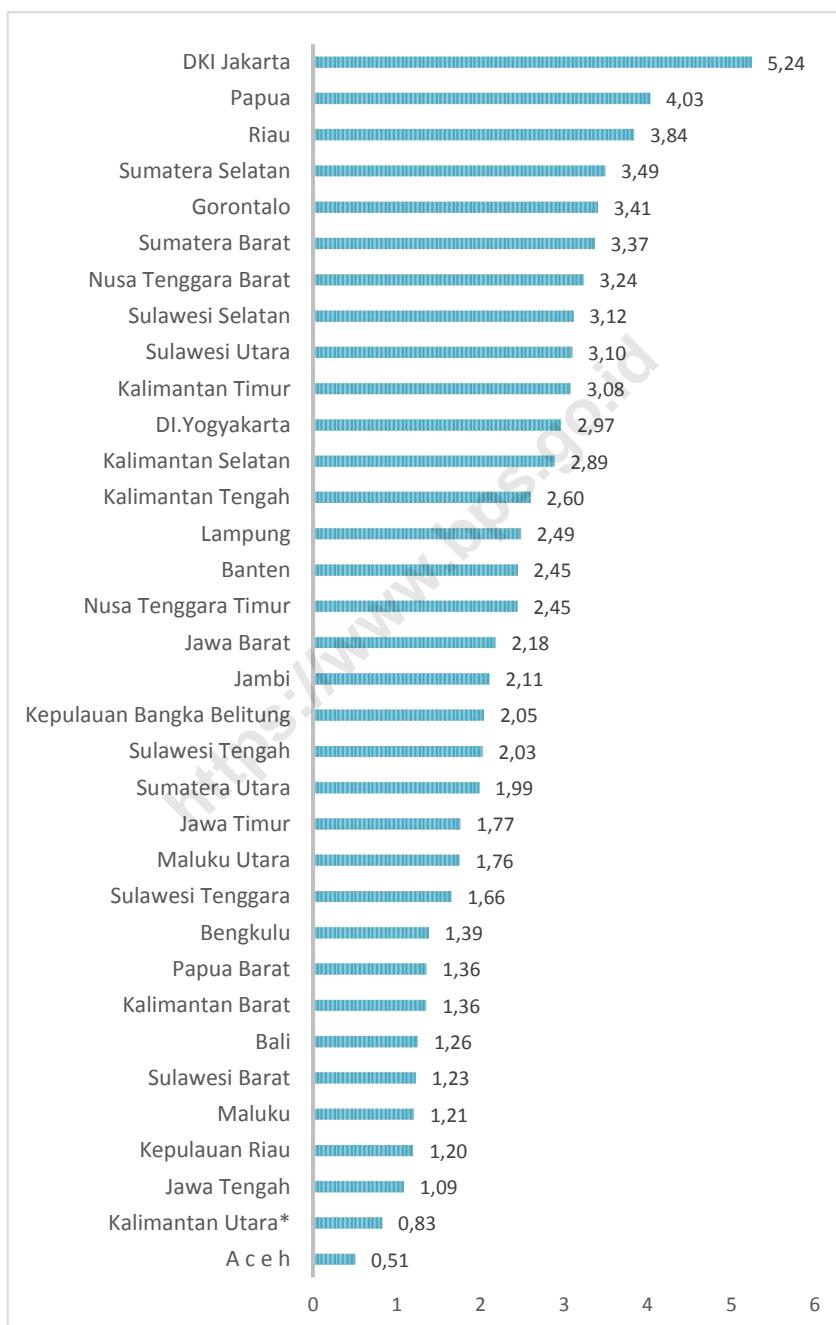
Kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi pada desa/kelurahan di Indonesia

Selama periode 2011 – 2018, seperti yang disajikan pada Gambar 2.20, jenis kejadian kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi pada desa/kelurahan di Indonesia, jumlahnya mencapai lebih dari 36 - 45 persen dari seluruh desa.

Persentase desa yang mengalami kejadian pencurian meningkat dari 2011 yang 36,78 persen menjadi 41,05 persen pada 2014. Pada 2018 meningkat kembali menjadi 45,01 persen. Selama tahun 2018 dari beberapa jenis kejahatan yang diukur terdapat enam jenis kejahatan yang mengalami peningkatan, yakni jenis kejahatan pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian, penipuan/penggelapan, pembakaran dengan sengaja, penyalahgunaan/pengedaran narkoba, dan perjudian.

Berdasarkan Gambar 2.21 nampak bahwa dari sisi jumlah, lima provinsi yang persentase desa/kelurahannya yang pernah terjadi kejahanan pembunuhan terbesar (perbandingan jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian dibagi total jumlah desa/kelurahan di satu provinsi), berturut-turut adalah DKI Jakarta (5,24 persen), Papua (4,03 persen), Riau (3,84 persen), dan Sumatera Selatan (3,49 persen).

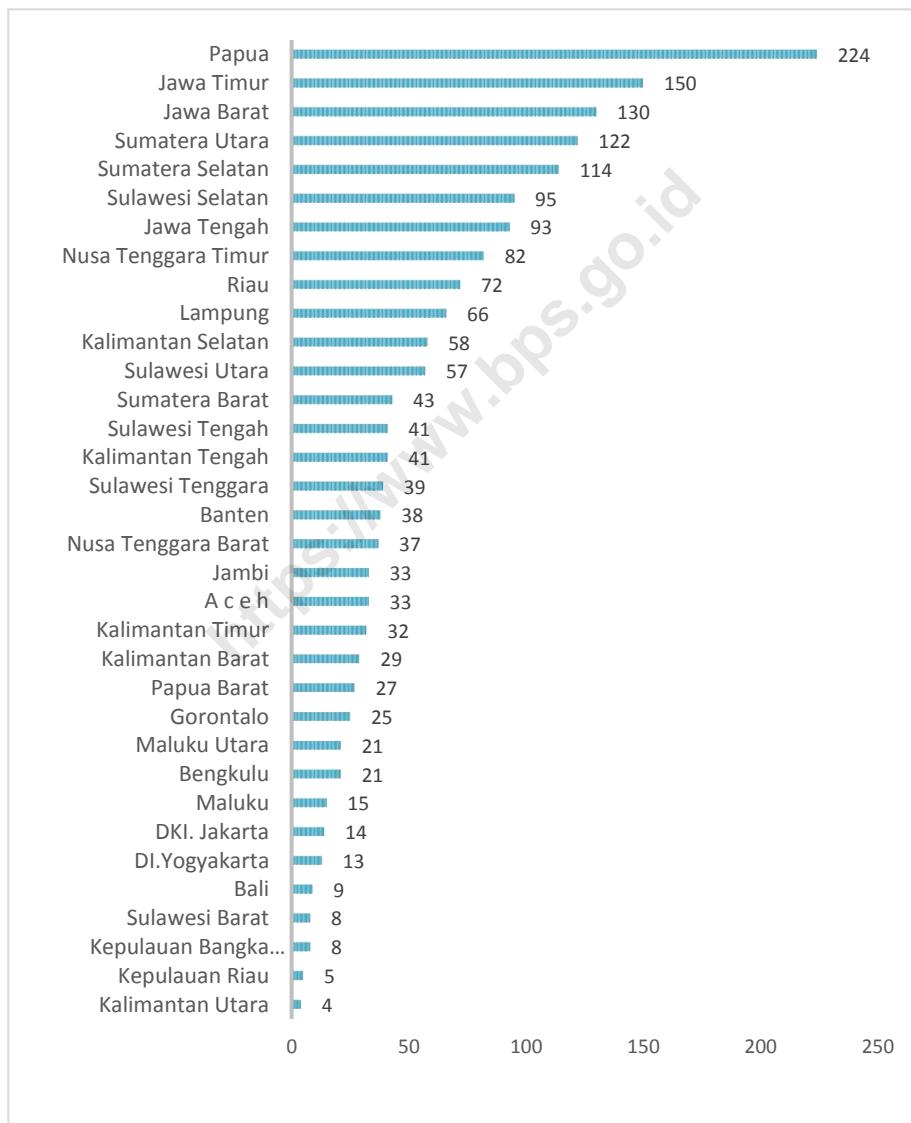
**Gambar 2.21 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018**



Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Apabila dilihat dari jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian kejahatan pembunuhan selama setahun terakhir (Gambar 2.22) maka Papua, Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan tiga provinsi yang paling besar.

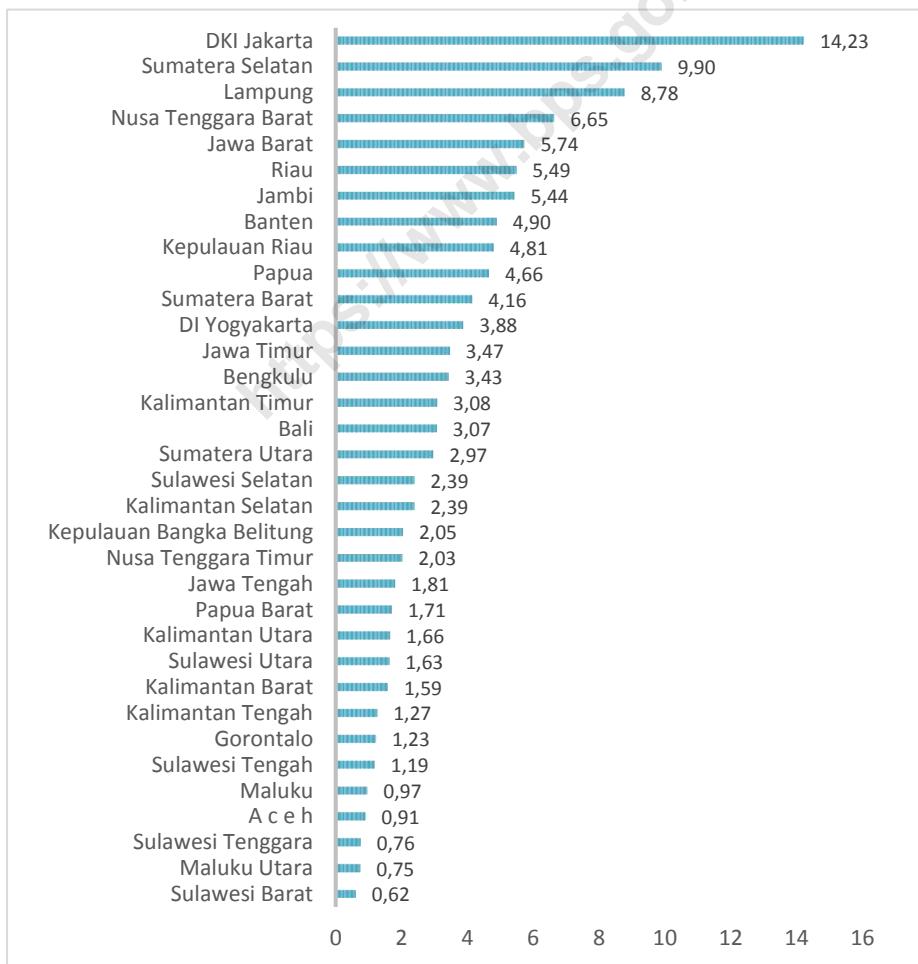
**Gambar 2.22 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan P Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018**



Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Berdasarkan Gambar 2.23, pada 2018 rentang persentase kejadian kejahatan pencurian dengan kekerasan pada 34 provinsi berkisar 0,62–14,23 persen. Tiga provinsi yang persentase desa/kelurahannya yang pernah terjadi kejahatan pembunuhan terbesar (perbandingan jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian dibagi total jumlah desa/kelurahan di satu provinsi), berturut-turut adalah DKI Jakarta (14,23 persen), Sumatera Selatan (9,90 persen), dan Lampung (8,78 persen).

**Gambar 2.23 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018**

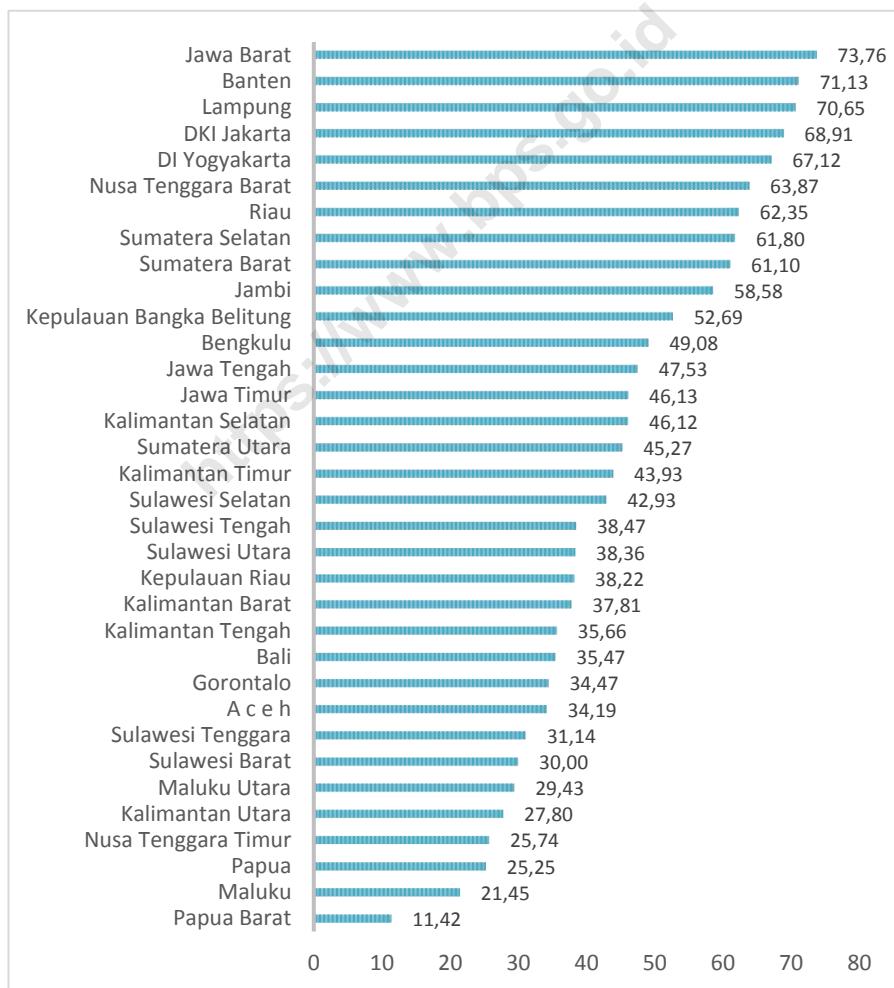


Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Untuk kejadian pencurian seperti yang disajikan pada Gambar 2.24, rentang persentase desa/kelurahan yang mengalami pencurian selama tahun 2018 berada pada kisaran 11,42 – 73,76 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi.

Pada 2014 lebih dari 73 persen desa/kelurahan di Jawa Barat pernah mengalami kejadian pencurian.

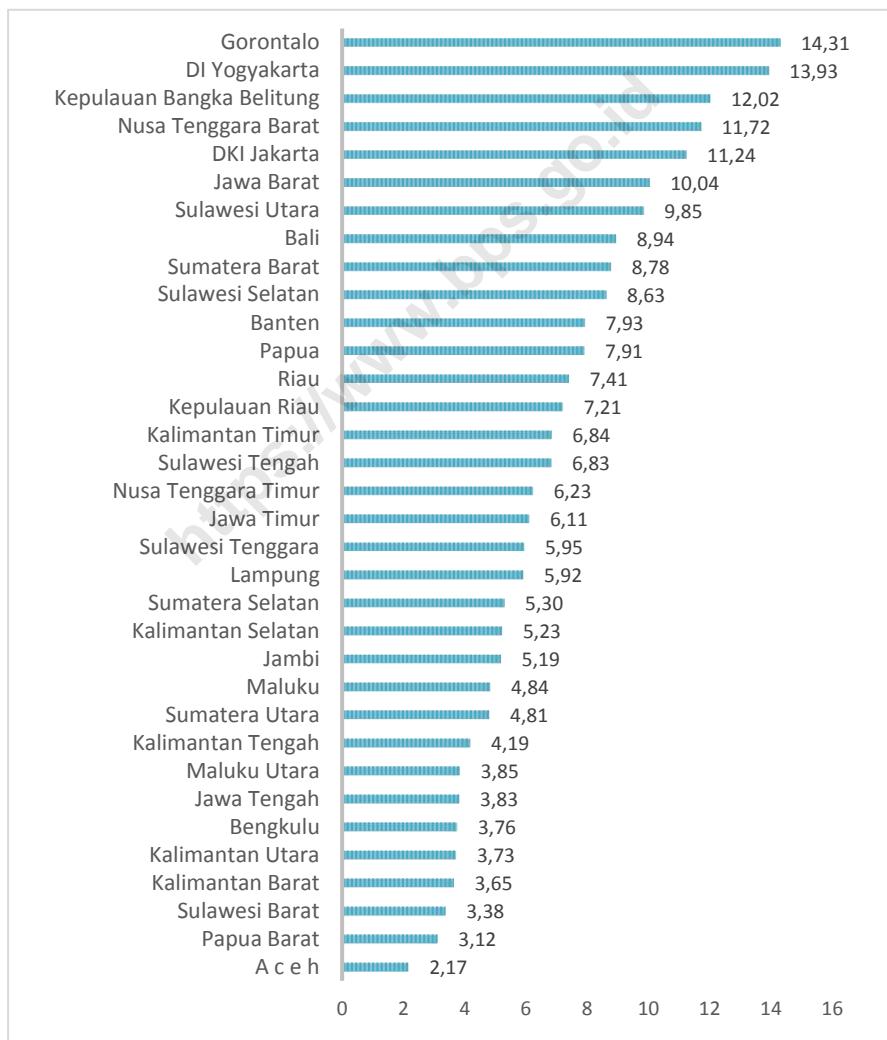
**Gambar 2. 24 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018**



Sumber Pendataan Potensi Desa, BPS

Tiga provinsi yang persentase desa/kelurahannya yang pernah terjadi kejahatan pencurian terbesar (perbandingan jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian dibagi total jumlah desa/kelurahan di satu provinsi), berturut-turut adalah Jawa Barat (73,76 persen), Banten (71,13 persen), dan Lampung (70,65 persen).

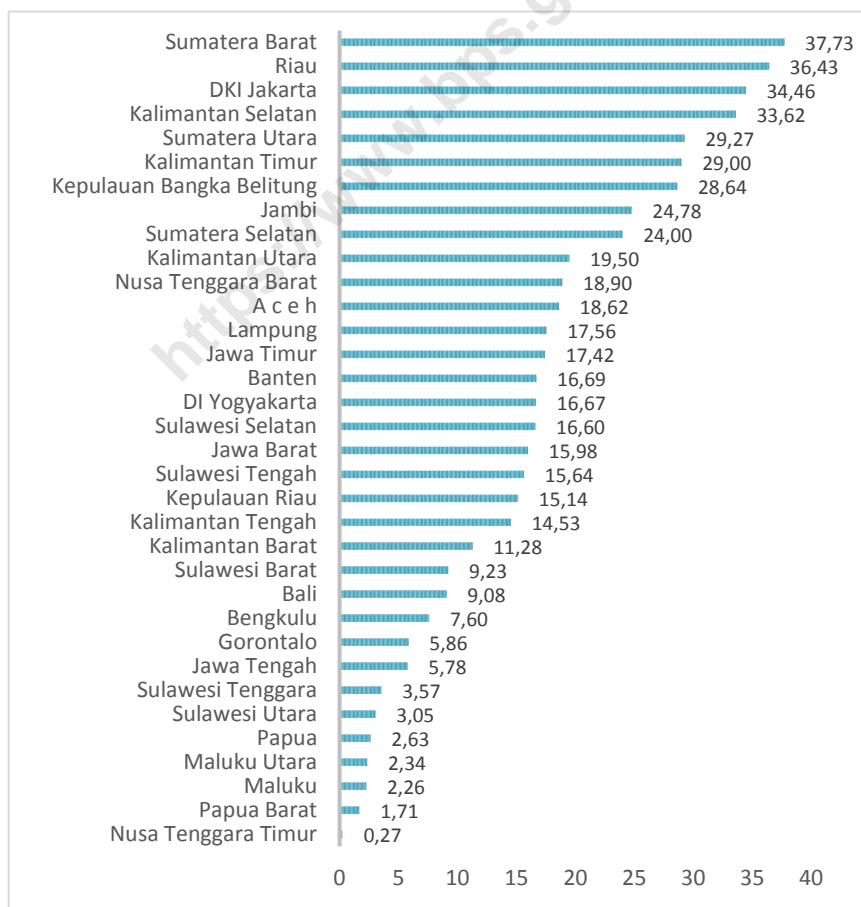
**Gambar 2.25 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018**



Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Untuk kejadian penganiayaan seperti yang disajikan pada Gambar 2.25, rentang persentase desa/kelurahan yang mengalami penganiayaan selama tahun 2018 berada pada kisaran 2,17 – 14,31 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi. Tiga provinsi yang persentase desa/kelurahannya yang pernah terjadi kejadian penganiayaan terbesar (perbandingan jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian dibagi total jumlah desa/kelurahan di satu provinsi), berturut-turut adalah Gorontalo (14,31 persen), DI Yogyakarta (13,93 persen), dan Kep Bangka Belitung (12,02 persen).

**Gambar 2. 26 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018**



Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Dari keseluruhan jenis kejahatan yang terjadi selama periode tahun 2018 di berbagai wilayah di Indonesia, salah satu jenis peristiwa yang mendapat perhatian khusus adalah kejadian penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.26, kejadiannya telah merebak di sejumlah desa/kelurahan pada semua provinsi di Indonesia, seperti halnya kejadian kejahatan pencurian dan penganiayaan.

Cakupan kejadian kejahatan narkoba pada hampir keseluruhan provinsi selama periode tahun 2018 berada pada kisaran 0,27 – 37,73 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi. Tiga provinsi yang persentase desa/kelurahannya yang pernah terjadi kejahanan penyalahgunaan dan peredaran narkoba terbesar (perbandingan jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian dibagi total jumlah desa/kelurahan di satu provinsi), berturut-turut adalah Sumatera Barat (37,73 persen), Riau (36,43 persen), dan DKI Jakarta (34,46 persen).

### Konflik Massal

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai fenomena konflik berupa perkelahian massal yang terjadi di Indonesia serta perkembangannya selama satu dekade terakhir. Aspek yang dilihat meliputi jenis dan cakupan kejadian perkelahian massal serta upaya penyelesaiannya. Selain dapat dikategorikan sebagai kejahatan, perkelahian massal dianggap sebagai suatu kondisi yang dapat menganggu keamanan.

Secara etimologi konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul (Hafidhuddin, 2001). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekohan, perselisihan, pertengangan. Secara terminologi, Soekanto (2005) mendefinisikan pertengangan atau pertikaian (konflik) adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha

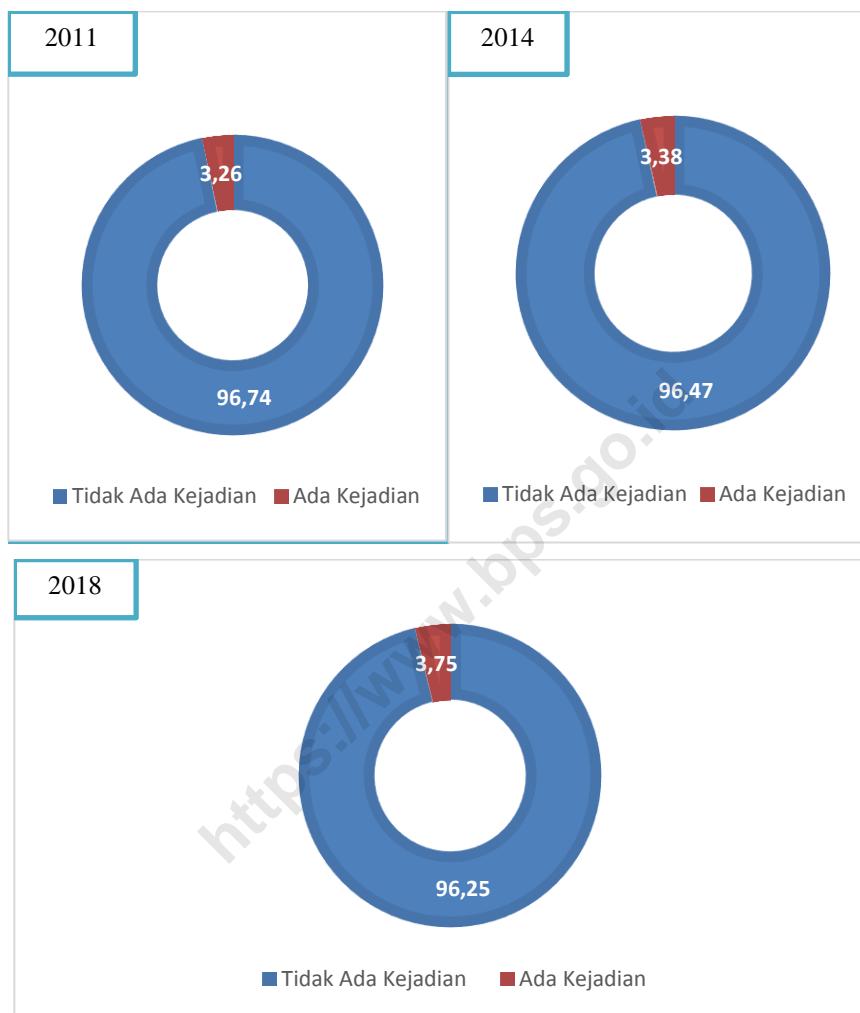
untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang ekstrim akan berujung pada kekerasan dan menimbulkan perkelahian massal.

Data yang menjadi sumber utama merupakan data kewilayahan (*spatial data*) yang diperoleh dari data Statistik Potensi Desa (Podes). Unit observasi dalam pengumpulan data statistik Podes adalah seluruh desa/kelurahan di wilayah Indonesia. Sejalan dengan itu, kajian mengenai perkelahian massal pada bagian ini secara umum akan dilihat dari cakupan jumlah atau persentase desa/kelurahan yang menjadi ajang atau lokasi kejadian tersebut.

Seperti yang disajikan pada Gambar 2.27, hasil Podes 2008, 2011, dan 2014 memperlihatkan kecenderungan peningkatan jumlah dan persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal. Jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir terus meningkat dari 3,26 persen desa/kelurahan pada tahun 2011 menjadi 3,38 persen desa/kelurahan pada tahun 2014, kemudian pada 2018 meningkat kembali menjadi 3,75 persen pada 2018.

Hasil Podes memperlihatkan kecenderungan peningkatan persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal.

**Gambar 2. 27 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal. Tahun 2011 - 2018**

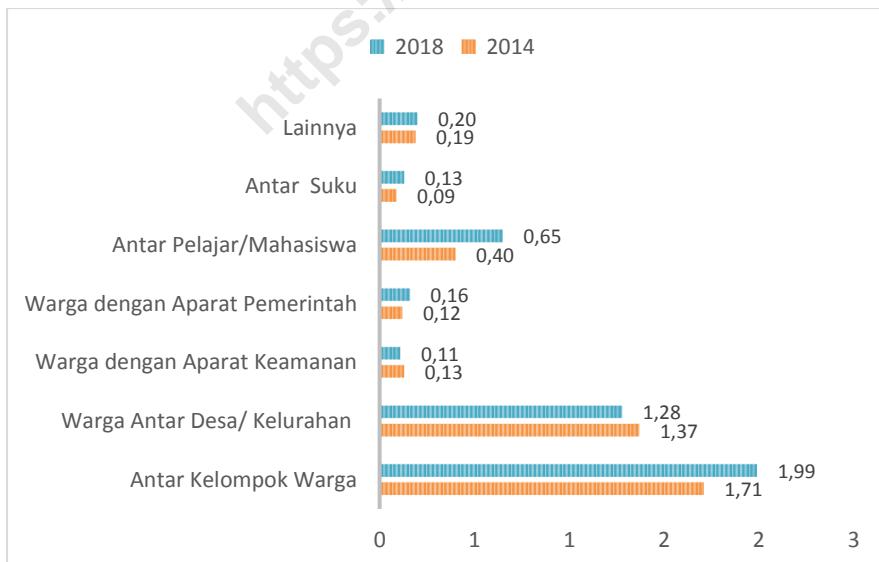


Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Perkelahian antar kelompok warga merupakan perkelahian massal yang paling sering terjadi, disusul oleh perkelahian warga antar desa/kelurahan.

Jenis kejadian perkelahian massal yang dicakup dalam Podes 2018 meliputi perkelahian antar kelompok warga, perkelahian warga antar desa/kelurahan, perkelahian warga dengan aparat keamanan, perkelahian warga dengan aparat pemerintah, perkelahian antar pelajar dan perkelahian antar suku. Dari Gambar 2.28 nampak bahwa dari hasil Podes 2018 perkelahian antar kelompok warga merupakan perkelahian massal yang paling sering terjadi, disusul oleh perkelahian warga antar desa/kelurahan. Persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian antar kelompok warga sebesar 1,71 persen di tahun 2014 meningkat menjadi 1,99 persen di tahun 2018.

**Gambar 2.28 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Tipennya. Tahun 2014 dan 2018**



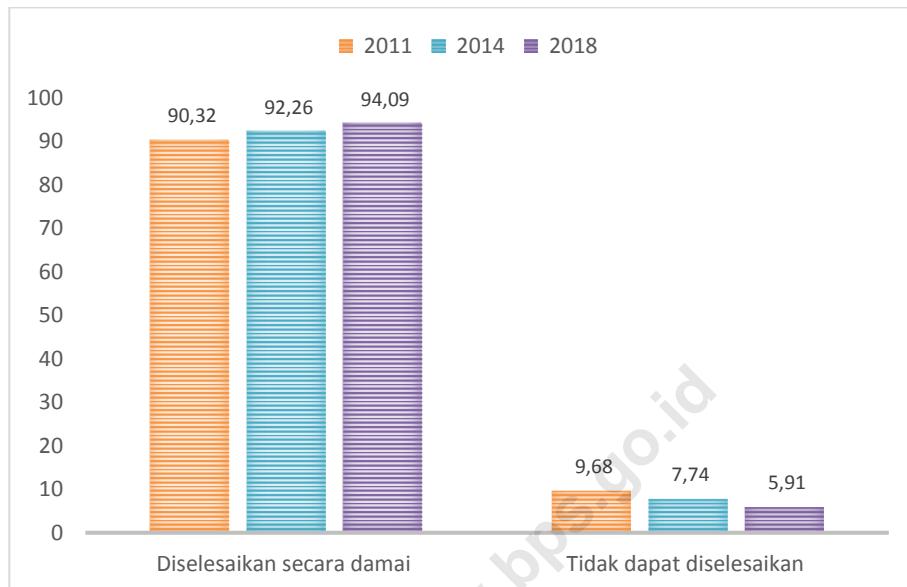
Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Pemerintah menyadari kerawanan konflik di Indonesia dapat menciptakan perpecahan. Oleh karena itu sebagai upaya menanggulangi isu konflik pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pemerintah berperan aktif dalam setiap penyelesaian segala bentuk konflik atau benturan fisik dan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang menganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Strategi yang dipandang lebih efektif dalam pengelolaan konflik meliputi (Gurr, dalam Soetopo, 2001): (1) konsistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuensi; (2) dengan mediasi (perantara). Jika konflik menemui jalan buntu, masing-masing bisa menunjuk pada pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.

Data Podes 2011, 2014, dan 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar (lebih dari 90 persen) dari insiden perkelahian massal yang sering terjadi sudah dapat diselesaikan (Gambar 2.29). Namun, masih terdapat kejadian dimana diperlukan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk segera menuntaskan konflik massal yang terjadi di wilayah desa/kelurahan tempat tinggalnya. Sehingga sekitar 5,91 persen konflik yang belum dapat diselesaikan segera menemukan solusinya.

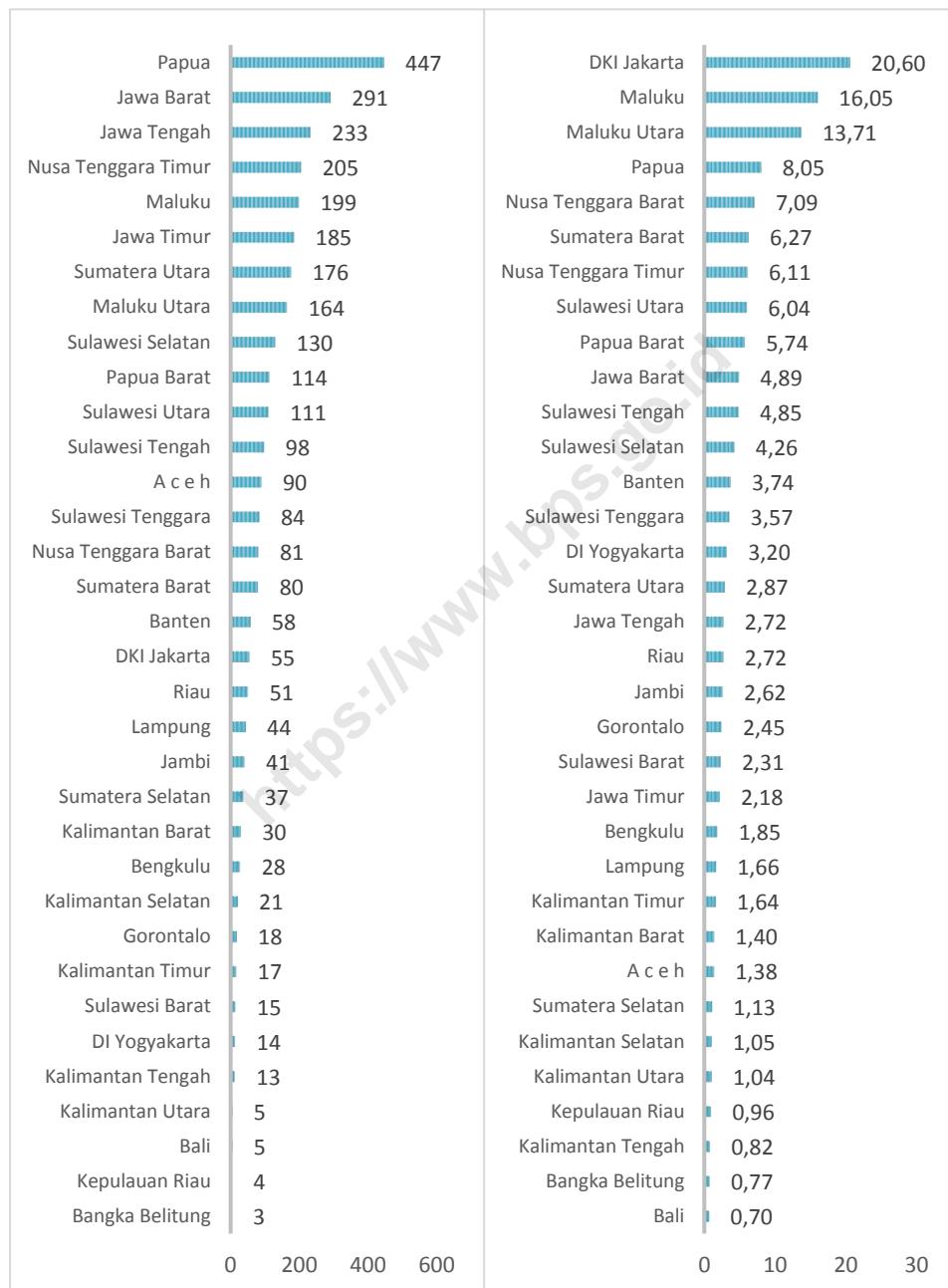
**Gambar 2. 29. Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya. Tahun 2014 dan 2018**



Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Apabila kita melihat lebih rinci ke provinsi, kita dapat melihat variasi dalam perkembangan kejadian perkelahian massal. Selama periode 2018, Provinsi DKI Jakarta, Maluku, dan Maluku Utara merupakan provinsi dengan persentase terbesar desa/kelurahan yang pernah mengalami perkelahian massal setahun terakhir. Sementara dari jumlahnya, provinsi dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yang pernah mengalami perkelahian adalah Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

**Gambar 2. 30. Jumlah Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, Tahun 2018**



## BAB III

# KORBAN KEJAHATAN

Tahun 2017, sekitar 1,08%  
penduduk Indonesia  
mengalami tindak kejahatan

Sebagian besar penduduk  
yang menjadi korban  
kejahatan adalah laki-laki



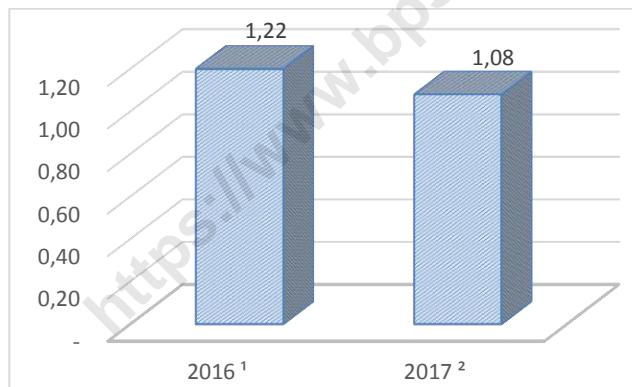


# Bab 3

## KORBAN KEJAHATAN

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai jumlah dan karakteristik korban kejahatan, kejadian kejahatan yang dialami serta perkembangannya selama periode dua tahun terakhir. Data yang diperoleh berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas, yang dalam hal ini bisa disebut survei korban (*victimization survey's*), dirancang khusus untuk mencatat perkiraan viktimasasi yang ditunjukkan oleh sampel representatif populasi (Hagan, 1989).

Gambar 3. 1. Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Tahun 2016-2017



Sumber : Susenas 2017 dan 2018

Keterangan :

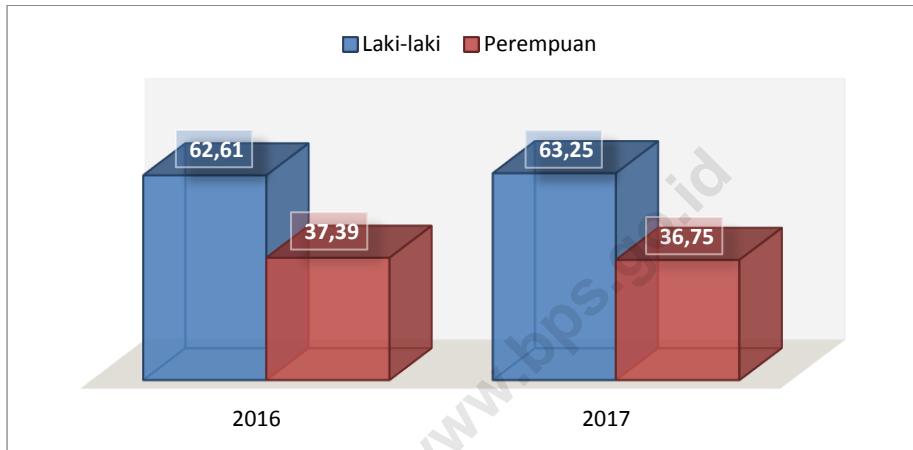
- 1) Data Susenas 2017 (tahun survei) menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu Maret 2016 – Februari 2017.
- 2) Data Susenas 2018 (tahun survei) menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari – 31 Desember 2017.

Gambar 3.1 menunjukkan pada kurun waktu tahun 2017, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan sebesar 1,08 persen dari populasi penduduk Indonesia. Persentase tersebut menurun dari pengalaman masyarakat pada kurun waktu 2016 sebesar 1,22 persen. Hal

Selama periode 2017, sekitar 1,08 persen dari total penduduk Indonesia mengalami tindak kejahatan

ini sejalan dengan jumlah kejahatan yang dicatat dalam registrasi Kepolisian Republik Indonesia yang mencatat adanya penurunan jumlah kejahatan (*crime total*) pada tahun 2017.

**Gambar 3. 2. Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2017**



Sumber : Susenas 2017 dan 2018

Keterangan: Populasi pada gambar ini adalah penduduk korban kejahatan

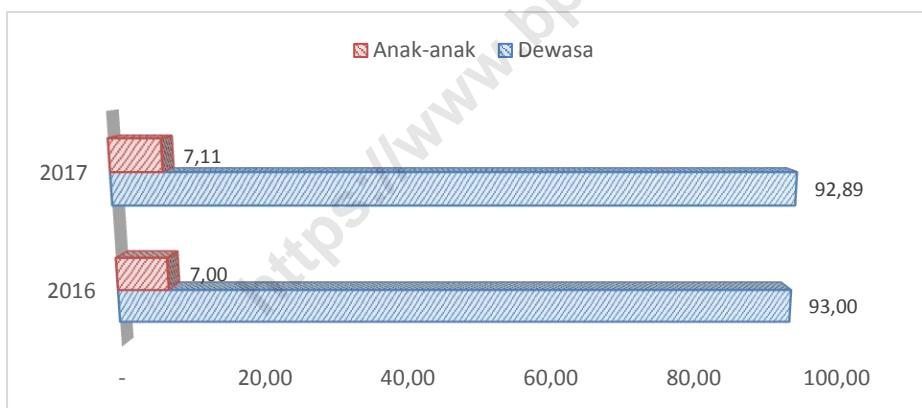
Dari 1,08 persen penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dapat dilihat polanya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Komposisi penduduk korban kejahatan menurut jenis kelamin seperti yang disajikan pada Gambar 3.2, menunjukkan pada 2016 dan 2017 mayoritas penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah kalangan laki-laki dengan persentase lebih dari 60 persen. Pada 2017, persentase perempuan yang mengalami kejahatan sedikit mengalami peningkatan.

Sebagian besar penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah laki-laki.

Selama periode 2016-2017, sebagian besar penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah kalangan dewasa.

Selama periode 2016-2017, sebagian besar penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah kalangan dewasa. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa perkembangan persentase penduduk korban kejahatan dari kelompok umur dewasa cenderung stabil, yakni sebesar 93,00 persen pada 2016. Kemudian pada tahun 2017 sedikit mengalami penurunan menjadi 92,89 persen.

**Gambar 3.3. Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2016-2017**



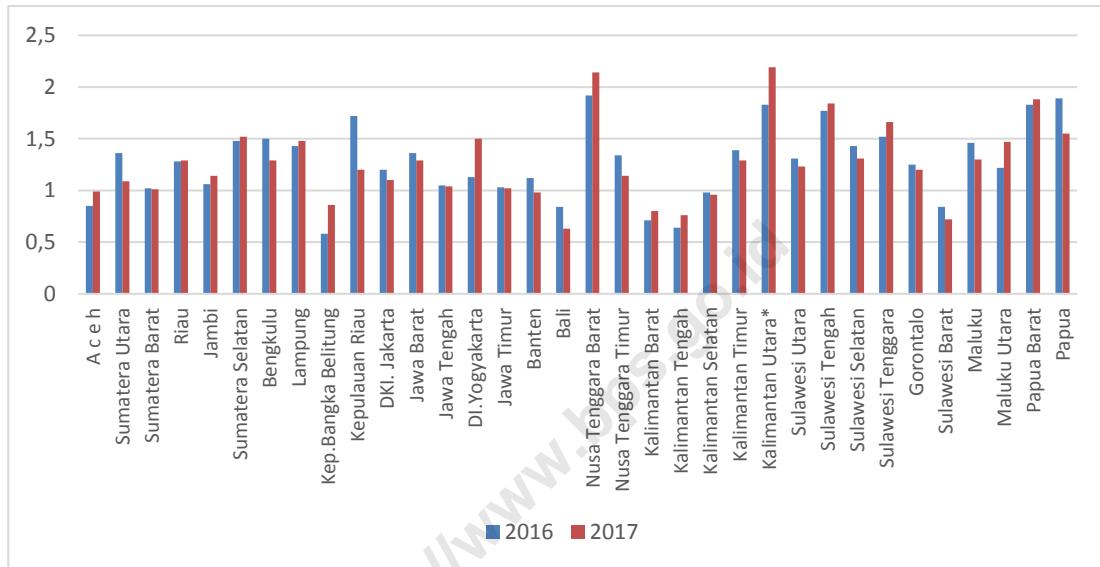
Sumber : Susenas 2017 dan 2018

Keterangan: Populasi pada gambar ini adalah penduduk korban kejahatan

Pada periode tahun 2016-2017, penduduk yang menjadi korban kejahatan persentasenya menurun pada 19 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua (lihat gambar 3.4). Dari seluruh

provinsi yang mengalami penurunan pada 2017, paling besar terjadi di provinsi Kepulauan Riau.

**Gambar 3.4. Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Provinsi, Tahun 2016-2017**

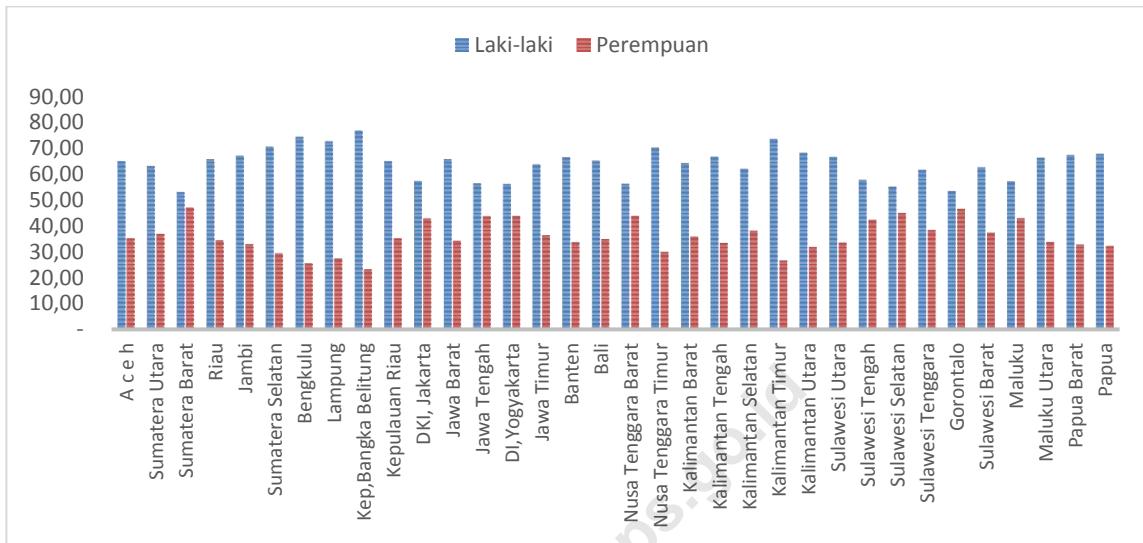


Sumber : Susenas 2017 dan Susenas 2018

Komposisi penduduk korban kejahatan selama periode tahun 2016–2017 pada setiap provinsi secara umum serupa dengan komposisi secara nasional. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan di sebagian besar provinsi lebih banyak laki-laki daripada perempuan.

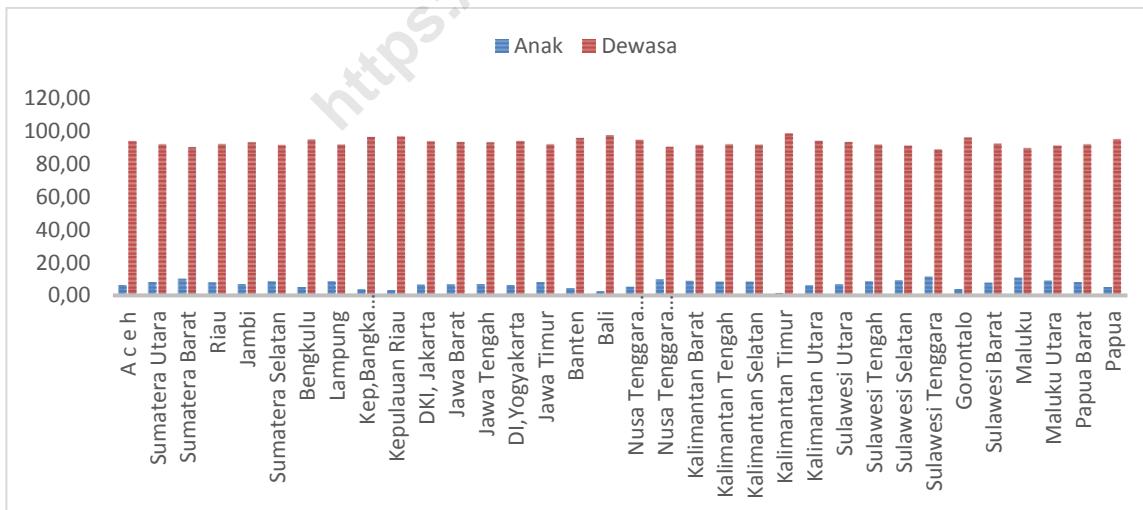
Pada tahun 2016, persentase penduduk korban kejahatan yang berjenis kelamin perempuan terbesar berturut-turut adalah provinsi Sumatera Barat (49,80 persen), DKI Jakarta (49,23 persen) dan Bali (48,66 persen). Sementara pada 2017, persentase penduduk korban kejahatan yang berjenis kelamin perempuan terbesar berturut-turut adalah provinsi Sumatera Barat (47,06 persen), Sulawesi Selatan (44,95 persen) dan Gorontalo (46,60 persen).

**Gambar 3. 5. Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan jenis Kelamin dan Provinsi, Tahun 2018**



Sumber : Susenas 2017 dan 2018

**Gambar 3. 6. Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Usia dan Provinsi, Tahun 2018**



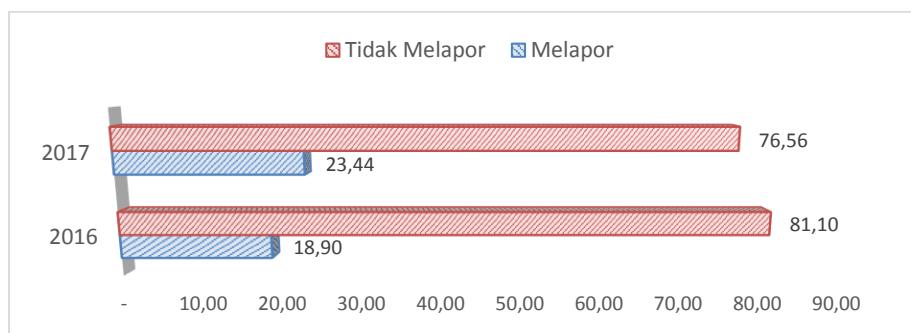
Sumber : Susenas 2017 dan 2018

Sementara itu, komposisi penduduk korban kejahatan menurut kelompok umur secara keseluruhan untuk semua provinsi menunjukkan bahwa persentase anak-anak yang menjadi korban kejahatan lebih kecil dari penduduk dewasa (lihat Gambar 3.6). Pada tahun 2017, persentase penduduk korban kejahatan yang termasuk kelompok anak-anak terbesar berturut-turut adalah provinsi Sulawesi Tenggara (11,13), Maluku (10,47), dan Sumatera Barat (9,89).

Data Susenas menunjukkan tingkat persentase melapor ke Polisi (*police report rate*) setiap tahun masih relatif rendah. Pada periode 2016–2017, secara total (Gambar 3.7) persentase penduduk Indonesia yang pernah mengalami kejadian kejahatan kemudian melaporkan ke polisi kejadian yang dialaminya tidak lebih dari 25 persen. Pada tahun 2016 sebesar 18,90 persen, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 23,44 persen. Jumlah masyarakat yang melapor ketika mengalami kejadian masih rendah. Dengan kata lain, data registrasi polisi masih belum menggambarkan keseluruhan kejadian kejahatan yang dialami oleh masyarakat. Data-data ini menunjukkan angka gelap kejahatan (*dark number*) masih relatif tinggi.

Pada 2017, kurang dari 25 persen masyarakat melaporkan ke Polisi kejadian kejahatan yang dialaminya.

**Gambar 3.7. Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Tahun 2016–2017**



Sumber : Susenas 2017 dan 2018

# BAB IV

# PERSEPSI RASA AMAN

<https://www.bps.go.id>



Pada 2018 hanya sekitar 11,63 persen dari keseluruhan Desa/Kelurahan yang di wilayahnya terdapat keberadaan Pos Polisi (termasuk Polsek, Polres, dan Polda)

*https://www.bps.go.id*

# Bab 4

## PERSEPSI RASA AMAN MASYARAKAT DAN UPAYA MENJAGA KEAMANAN

### Persepsi Rasa Aman Masyarakat

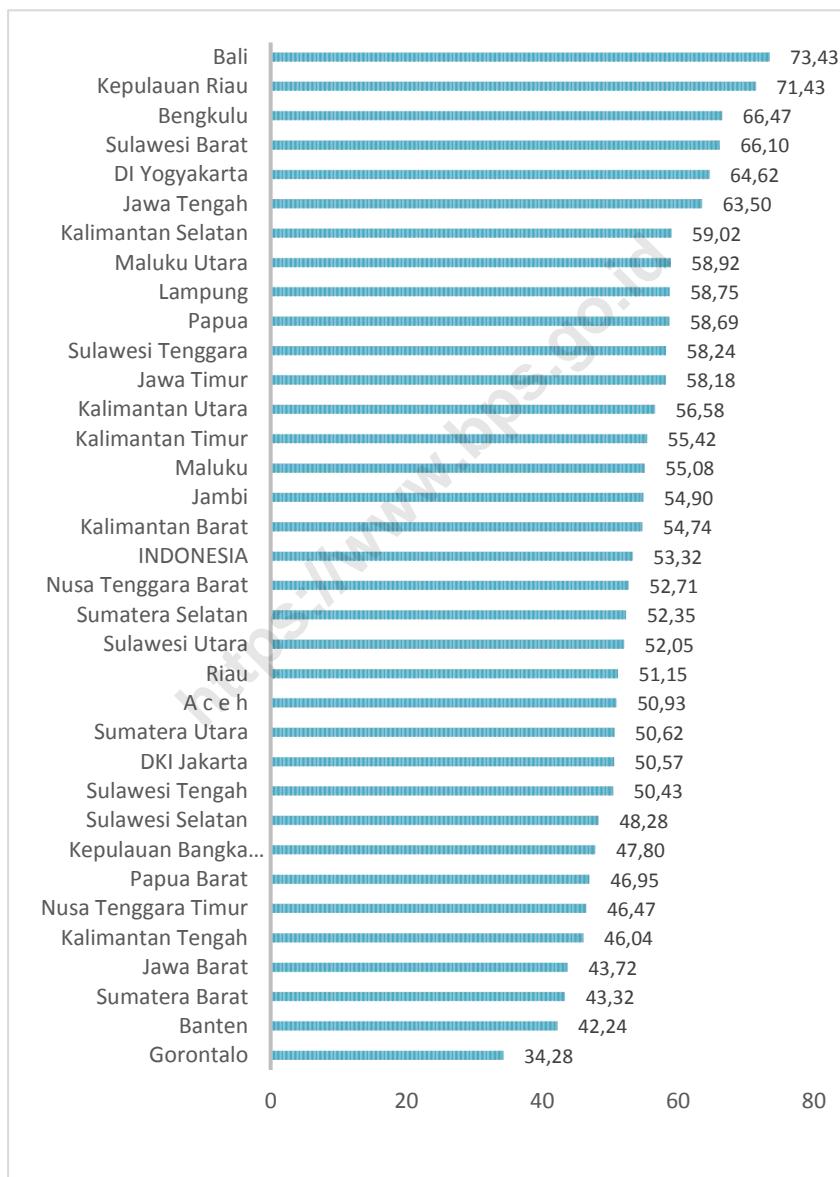
Rasa aman adalah kebutuhan dasar dan merupakan hak dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bahkan dalam *Universal Declaration of Human Rights* mencantumkan, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan hak akan kemerdekaan dan keamanan badan

Dalam *Sustainable Development Goals (SDG'S)* khususnya pada target 16.1.4 yakni proporsi rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Tujuannya adalah sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Rasa aman diukur dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga tahun, dimulai pada tahun 2014.

Berdasarkan Gambar 4.1. pada tahun 2017 menunjukkan persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya secara nasional sekitar 53,32 persen. Dengan kata lain, hampir separuh

masyarakat masih merasa khawatir ketika berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.

**Gambar 4. 1. Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, Tahun 2017**



Apabila kita melihat lebih rinci ke provinsi, kita dapat melihat variasi dalam persentase Rumah Tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya. Selama periode 2017, Provinsi Bali merupakan provinsi dengan persentase terbesar masyarakatnya yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya. Sementara provinsi dengan persentase terkecil adalah provinsi Gorontalo.

## Upaya Menjaga Keamanan

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai upaya dan partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan desa/kelurahan tempat tinggalnya dan perkembangannya selama satu dekade terakhir. Data yang digunakan merupakan data kewilayahan (*spatial data*) dengan unit observasi seluruh desa/kelurahan yang ada di wilayah Indonesia (pendataan Potensi Desa). Sejalan dengan itu, tingkat dan perkembangan upaya dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan pada bagian ini akan dilihat dari cakupan dan perkembangan jumlah desa/kelurahan yang melakukan upaya tersebut.

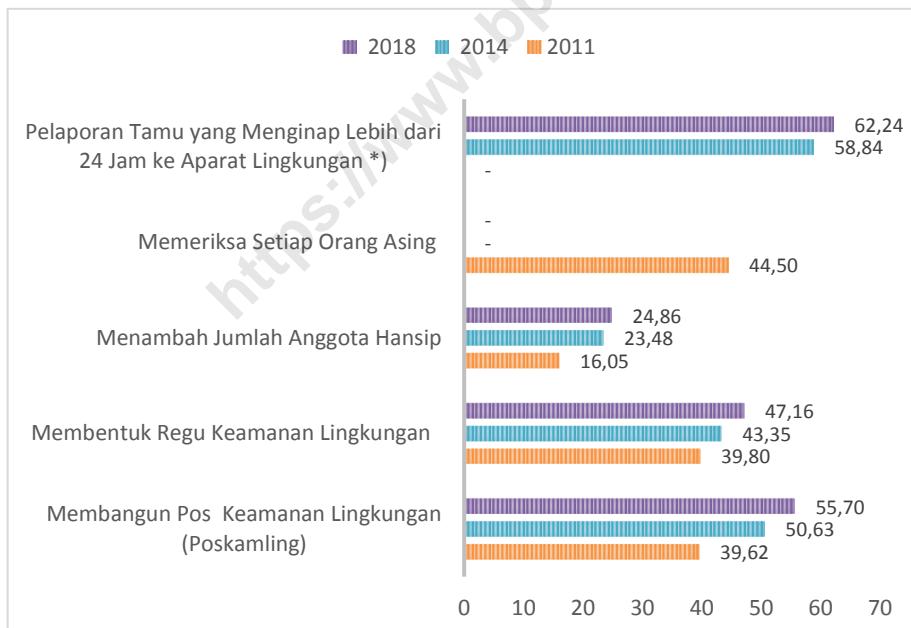
Pendataan Potensi Desa (Podes) menanyakan upaya warga desa untuk menjaga keamanan lingkungan dalam setahun terakhir, di antaranya dengan cara membangun poskamling, membentuk regu keamanan lingkungan (kamling), menambah jumlah anggota hansip/linmas, dan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan.

Apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2011 dan 2014, terjadi peningkatan jumlah dan persentase desa/kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan pada 2018. Dari Gambar 4.2 terlihat bahwa upaya yang paling banyak dilakukan oleh warga desa untuk menjaga keamanan selama tahun 2018 secara berturut-turut adalah melakukan pelaporan tamu

yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan, membangun pos keamanan lingkungan (poskamling), membentuk regu keamanan lingkungan, dan menambah jumlah anggota hansip/linmas. Pada 2018 lebih dari separuh Desa/Kelurahan di Indonesia melakukan kegiatan menjaga keamanan dengan menggiatkan pelaporan tamu dan membangun pos keamanan lingkungan (poskamling).

Lebih dari separuh Desa/Kelurahan di Indonesia melakukan kegiatan menjaga keamanan dengan menggiatkan pelaporan tamu (1x24 jam) dan membangun pos keamanan lingkungan

**Gambar 4.2. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2011, 2014, dan 2018**



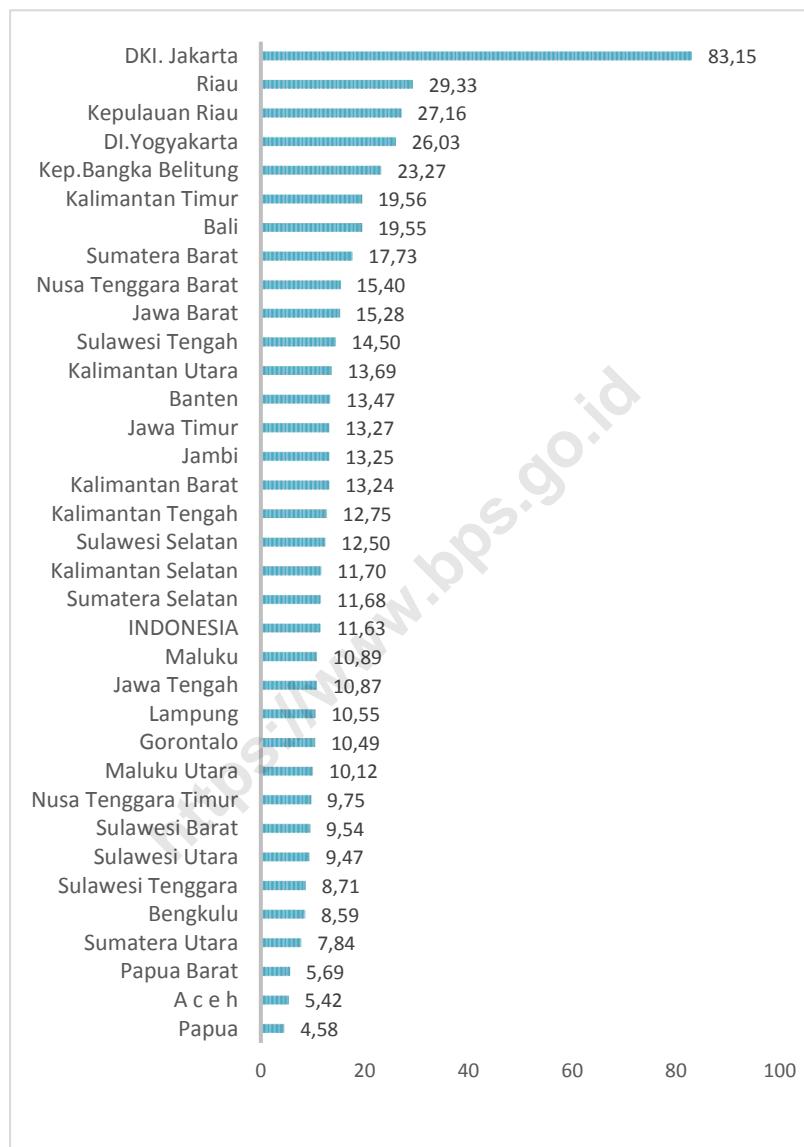
Sumber : Dolah dari Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018  
Keterangan : \*) Pada Podes 2014 pertanyaan Memeriksa Setiap Orang Asing diubah menjadi Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan

Gambaran upaya dan partisipasi masyarakat desa dalam menjaga keamanan dirinci menurut provinsi selama periode 2011-2018 disajikan pada tabel lampiran. Dari tabel-tabel tersebut terlihat bahwa upaya warga untuk menjaga keamanan dengan membangun pos keamanan lingkungan (poskamling) meningkat hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

Pada 2018 hanya sekitar 11,63 persen dari keseluruhan Desa/Kelurahan yang di wilayahnya terdapat keberadaan pos Polisi (termasuk Polsek, Polres, dan Polda).

Selain dari aspek warga, upaya menjaga keamanan dan ketertiban juga merupakan fungsi dari aparat berwenang dalam hal ini adalah Polisi. Data Podes juga menyajikan Desa/Kelurahan yang pada wilayahnya terdapat keberadaan pos Polisi. Seperti yang disajikan pada Gambar 4.4. menunjukkan hanya sekitar 11,63 persen dari keseluruhan Desa/Kelurahan di Indonesia yang di wilayahnya terdapat keberadaan pos Polisi (termasuk Polsek, Polres, dan Polda). Namun, dari sekitar 88,37 persen Desa/Kelurahan yang tidak ada pos polisi sekitar 80,75 persen diantaranya menyatakan akses ke Pos Polisi terdekat cenderung mudah dan mudah sekali.

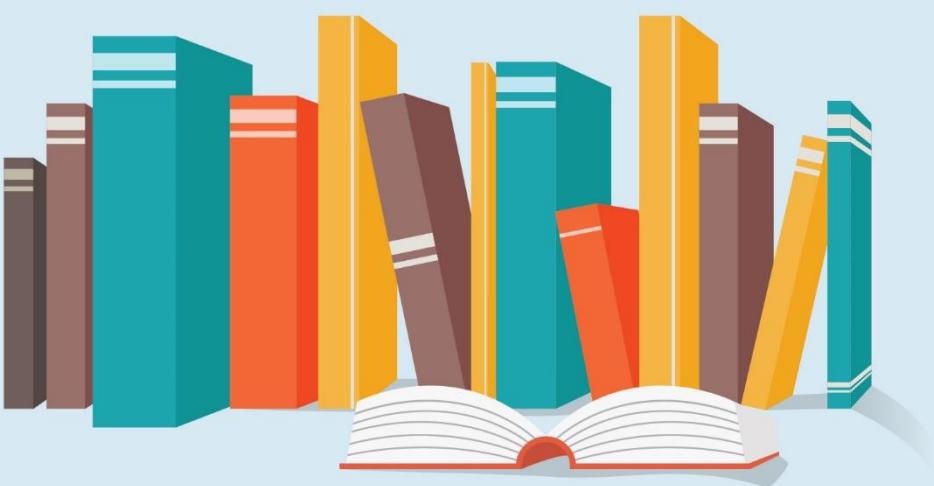
**Gambar 4. 3. Persentase Desa/Kelurahan yang terdapat Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2018**





# DAFTAR PUSTAKA

*https://www.bps.go.id*



*https://www.bps.go.id*

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dkk. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2011*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2014*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2018*. Jakarta : BPS.
- Hafidhuddin, Didin. et.al. (2001). *Berbangsa dan Bernegara Menurut Islam*. Jakarta: Pustaka Zaman.
- Hagan, Frank E. (1989). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Chicago: Nelson-Hall.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2013). Bandung: Citra Umbara.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2014). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2013. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2015). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2014. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2016). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2015. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2017). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2016. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2018). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2017. Jakarta: Mabes POLRI.
- Maslow, A.H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. New York: Psychological Review.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustofa, Muhammad. (2011). Kriminologi Edisi 2 (Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum). Bekasi: Sari Ilmu Pratama.
- Sianturi, L.M. (1985). Indikator Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Kumpulan Bahan-Bahan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: BPS.
- Soetopo, H. (2001). Manajemen Konflik. Malang : Universitas Negeri Malang.
- UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). International Classification Of Crimes For Statistical Purposes. Version 1.0.*



# CATATAN TEKNIS

*https://www.bps.go.id*



*https://www.bps.go.id*

## CATATAN TEKNIS

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini secara keseluruhan terdiri dari tiga jenis data yang masing-masing diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu:

1. Data karakteristik kejadian dan pelaku kejahatan yang bersumber dari Laporan dan Evaluasi Situasi Kamtibmas yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) Tahun 2015, 2016, dan 2017.
2. Data korban kejahatan yang bersumber dari Susenas Tahun 2017 dan 2018.
3. Data jumlah desa menurut kejadian kejahatan, kejadian konflik massal dan karakteristiknya, serta upaya dalam menjaga keamanan, bersumber dari Pendataan Potensi Desa (Podes) 2008, Podes 2011, dan Podes 2014.

### Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri

Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri merupakan laporan tahunan Mabes Polri yang menyajikan gambaran mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada level nasional dan provinsi. Laporan yang disajikan meliputi aspek kejahatan/kriminalitas dan bukan kejahatan. Data kriminalitas yang disajikan meliputi karakteristik kejadian kejahatan, pelaku, dan jumlah kerugian.

Data kriminalitas ini hanya mencakup seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat, atau aksi kriminalitas yang pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Mengingat masih tingginya keengganan masyarakat untuk melapor, diduga data yang dihasilkan cenderung "*under-estimate*". Artinya, kejadian kriminalitas yang sesungguhnya diduga lebih besar dari yang dilaporkan. Dengan kata lain, angka gelap (*dark number*) kejahatan masih relatif besar.

### **Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2017 dan 2018**

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan survei yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala setiap tahun. Data Susenas mencakup dua kelompok data, yaitu Kor dan Modul. Data Kor mencakup data pokok dari beberapa aspek kesejahteraan rakyat, termasuk kriminalitas. Data kriminalitas yang dikumpulkan adalah data jumlah dan karakteristik rumah tangga/individu yang menjadi korban kejahatan. Jumlah sampel Kor Susenas adalah sebanyak 300.000 rumah tangga, sehingga bisa dilakukan estimasi hingga level kabupaten/kota.

Data yang dikumpulkan dalam Modul Susenas hanya terfokus pada salah satu aspek kesejahteraan rakyat. Namun demikian, cakupannya lebih lengkap dan lebih rinci dibandingkan dengan data serupa yang dicakup dalam Kor. Modul Susenas umumnya diberi nama sesuai dengan aspek yang menjadi fokusnya, misalnya Modul Kesehatan, Modul Pendidikan, dan Modul Ketahanan Sosial. Data Modul Susenas dikumpulkan setiap tahun dan untuk modul yang sama akan berulang setiap tiga tahun sekali. Jumlah sampel Modul Susenas adalah sebanyak 75.000 rumah tangga, sehingga hanya dimungkinkan untuk menghasilkan estimasi hingga wilayah provinsi.

Sejak pertama kali kegiatan Susenas diselenggarakan, yaitu pada tahun 1963, Susenas telah memiliki modul kriminalitas. Modul ini mencakup data-data kriminal secara lengkap dan rinci dengan pendekatan korban rumah tangga/individu. Data yang dikumpulkan antara lain meliputi data jenis dan frekuensi kejahatan, pelaku kejahatan, akibat yang ditimbulkan secara fisik maupun psikis, kerugian yang diderita. Namun, karena beberapa hal, modul kriminalitas sejak tahun 1995 tidak dilakukan lagi.

Pada 2015, demi penyempurnaan alat ukur dan agar survei korban bisa semakin akurat dalam menangkap pengalaman individu, dilakukan perubahan instrumen dalam instrumen kor Susenas. Sebelumnya hanya terdapat empat jenis kejahatan yang terdapat di Susenas kor yakni pencurian, pencurian dengan kekerasan, penipuan, dan lainnya. Sementara pada 2015, BPS melakukan perluasan cakupan instrumen menjadi lima jenis

kejahatan yakni pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan lainnya.

Perubahan ini menjadikan data Susenas bisa menangkap lebih banyak pengalaman korban kejahatan. Namun, implikasinya pengguna data tidak bisa serta merta melakukan perbandingan antara data hasil Susenas 2015 dengan data tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada jumlah kejahatan berdasarkan jenisnya.

Data Susenas 2017 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu Maret 2016 – Februari 2017. Sedangkan Data Susenas 2018 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari – 31 Desember 2017.

#### **Statistik Podes (Potensi Desa) 2011, Podes 2014, dan Podes 2018**

Data Statistik Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS. Pendataan Podes dilakukan di seluruh desa/kelurahan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk desa persiapan, desa definitif, Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT), Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Pemukiman Masyarakat Terasing (SPMT). Responden untuk pendataan Podes adalah Kepala Desa/Lurah atau aparat desa/kelurahan lainnya dan narasumber lainnya, seperti petugas kesehatan yang bertugas di desa/kelurahan (dokter puskesmas/bidan desa), guru/kepala sekolah, petugas penyuluhan pertanian (PPL), dan petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Salah satu fungsi pendataan Podes adalah menyajikan data atau informasi tentang desa/kelurahan untuk memenuhi keperluan perencanaan kegiatan sensus. Data atau informasi tersebut antara lain adalah tentang luas wilayah, jumlah RW, jumlah RT, dan satuan lingkungan setempat (SLS) yang merupakan bagian wilayah desa/kelurahan beserta batas-batas wilayahnya, keadaan geografis, keadaan topografis, jumlah dan struktur

struktur perekonomian. Sejalan dengan fungsinya tersebut, pelaksanaan pendataan Podes biasanya dilakukan menjelang penyelenggaraan suatu sensus.

Data yang dikumpulkan dalam Podes juga mencakup data tentang jenis dan jumlah fasilitas umum yang ada di desa/kelurahan, baik fasilitas sosial seperti posyandu, puskesmas, sekolah, mesjid, gereja, dan tempat ibadat lainnya, maupun fasilitas ekonomi seperti pasar, pertokoan, supermarket, KUD, sarana transportasi, Bank, dan lembaga keuangan/perkreditan lainnya. Pendataan Podes juga mencakup pengumpulan data tentang jenis dan jumlah kejadian-kejadian penting yang sedang atau pernah terjadi di desa, seperti jenis dan jumlah bencana alam, wabah penyakit, kejadian kejahatan, dan konflik massal, baik antar warga desa maupun antar desa.

## Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, penjelasan mengenai konsep dan definisi pada bagian ini akan diuraikan sesuai dengan urutan sumber data.

## Konsep-Konsep Kriminalitas dalam Laporan Evaluasi Data Polri

### A. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran

a.1. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

- a.2. **Peristiwa yang dilaporkan** ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
- a.3. **Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian**, adalah :
- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
  - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
  - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid* (setiap tindakan polisi sudah dianggap sah berdasarkan atau bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum).
  - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
  - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
  - Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

## B. Pelaku Kejahatan

**Pelaku kejahatan** adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.

- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

### **C. Tahanan**

**Tahanan** adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

### **D. Kerugian**

**Kerugian** adalah hilang, rusak, atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

### **E. Korban**

**Korban kejahatan** adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha /percobaan tindak kejahatan

## **Konsep-Konsep Kejahatan dalam Susenas dan Podes**

### **A. Kejahatan**

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Susenas dan Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman, dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Susenas atau Podes lebih fokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya

perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

### B. Korban Kejahatan

Konsep korban kejahatan dalam Susenas adalah korban/sasaran dari tindak kejahatan yang terjadi dalam rentang waktu selama setahun yang lalu. Korban kejahatan dalam Susenas dikelompokkan menjadi dua klasifikasi, yaitu rumah tangga dan individu. Penentuan kriteria korban kejahatan ini hanya berdasarkan pada pengakuan responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya.

Klasifikasi korban kejahatan menurut umur :

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 18 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun dan lebih.

### C. Konflik Massal

Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:

**Perkelahian antar kelompok warga** adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.

**Perkelahian warga antar desa/kelurahan** adalah perkelahian antara warga desa /kelurahan/ nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.

**Perkelahian warga dengan aparat keamanan** adalah perkelahian antara warga desa/ kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.

**Perkelahian warga dengan aparat pemerintah** adalah perkelahian antara warga desa/ kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.

**Perkelahian antar pelajar/mahasiswa** adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.

**Perkelahian antar suku/etnis** adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/ kelurahan/nagari.

**Lainnya:** perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

### Penjelasan Teknis

#### 1. Angka Indeks Kejahatan ( $I_t$ )

$$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

dimana :

$t_0$  = tahun dasar

$t$  = tahun  $t$

#### 2. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate*)

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

#### 3. Skala Waktu Kejahatan Tahun $t$ (*crime clock*)

$$\text{Crime Clock} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times (\text{detik})$$

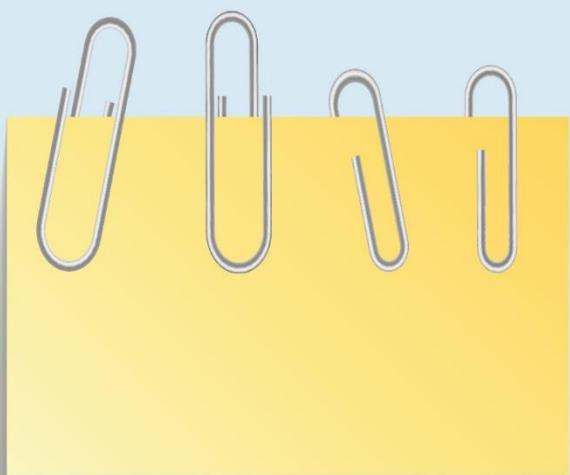
#### 4. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearance*)

$$\text{Crime Clearance} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100 ( )$$



# LAMPIRAN TABEL

*https://www.bps.go.id*





## DATA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

**Tabel 2.1. 1. Indikator Kriminalitas Nasional, Tahun 2015-2017**

Jenis Indikator (1)	Tahun		
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)
Jumlah Kejahatan ( <i>Crime Total</i> )	352 936	357 197	336 652
Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan ( <i>Crime Cleared</i> )	205 170	209 821	212 058
Persentase Penyelesaian Kejahatan ( <i>Clearance Rate</i> )	58,13	58,74	62,99
Selang Waktu Terjadinya Kejahatan ( <i>Crime Clock</i> )	00.01'29"	00.01'28"	0.01'33"
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan ( <i>Crime Rate</i> )	140	140	129

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1. 2 Peringkat Polda Menurut Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (*Crime Rate*), Tahun 2017**

No	Polda	Jumlah Kejahatan	No	Polda	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Sumatera Utara	39 867	1	Sulawesi Tengah	345
2	Metro Jaya <sup>1)</sup>	34 767	2	Sulawesi Utara	324
3	Jawa Timur	34 598	3	Sumatera Utara	280
4	Jawa Barat	25 183	4	Jambi	271
5	Sulawesi Selatan	21 616	5	Gorontalo	265
6	Sumatera Selatan	15 728	6	Sulawesi Selatan	256
7	Sumatera Barat	13 205	7	Bengkulu	252
8	Jawa Tengah	12 033	8	Papua Barat	250
9	Lampung	11 089	9	Sumatera Barat	248
10	Sulawesi Tengah	10 240	10	Kalimantan Timur	214
11	Jambi	9 531	11	Papua	208
12	Kalimantan Timur	9 149	12	DI Yogyakarta	193
13	Aceh	8 885	13	Sumatera Selatan	190
14	Nusa Tenggara Barat	8 132	14	Maluku	177
15	Sulawesi Utara	7 981	15	Kepulauan Riau	176
16	DI Yogyakarta	7 251	16	Aceh	171
17	Riau	6 869	17	Nusa Tenggara Barat	164
18	Papua	6 785	18	Kalimantan Selatan	160
19	Nusa Tenggara Timur	6 729	19	Sulawesi Barat	146
20	Kalimantan Selatan	6 578	20	Metro Jaya <sup>1)</sup>	138
21	Kalimantan Barat	6 020	21	Kep. Bangka Belitung	135
22	Bengkulu	4 867	22	Lampung	134
23	Banten	3 692	23	Nusa Tenggara Timur	127
24	Kepulauan Riau	3 673	24	Kalimantan Barat	122
25	Bali	3 589	25	Sulawesi Tenggara	110
26	Gorontalo	3 099	26	Kalimantan Tengah	104
27	Maluku	3 086	27	Riau	103
28	Sulawesi Tenggara	2 866	28	Jawa Timur	88
29	Kalimantan Tengah	2 699	29	Bali	85
30	Papua Barat	2 284	30	Maluku Utara	65
31	Kep. Bangka Belitung	1 931	31	Jawa Barat	65
32	Sulawesi Barat	1 841	32	Banten	55
33	Maluku Utara	789	33	Jawa Tengah	35
	INDONESIA	336 652		INDONESIA	129

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1)</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

**Tabel 2.1. 3 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2015-2017**

Kepolisian Daerah (1)	Tahun		
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)
A c e h	8 048	9 646	8 885
Sumatera Utara	35 248	37 102	39 867
Sumatera Barat	16 277	14 921	13 205
Riau	9 595	8 520	6 869
Jambi	10 564	5 904	9 531
Sumatera Selatan	20 575	9 124	15 728
Bengkulu	4 463	203 687	4 867
Lampung	9 218	10 485	11 089
Kep. Bangka Belitung	1 875	2 094	1 931
Kepulauan Riau	4 892	4 885	3 673
Metro Jaya <sup>1)</sup>	44 461	43 842	34 767
Jawa Barat	27 805	29 351	25 183
Jawa Tengah	15 958	14 353	12 033
DI Yogyakarta	9 692	8 348	7 251
Jawa Timur	35 437	28 902	34 598
Banten	5 002	4 570	3 692
Bali	5 032	4 764	3 589
Nusa Tenggara Barat	6 015	7 779	8 132
Nusa Tenggara Timur	6 709	8 713	6 729
Kalimantan Barat	6 669	7 311	6 020
Kalimantan Tengah	2 681	7 211	2 699
Kalimantan Selatan	6 809	3 712	6 578
Kalimantan Timur	8 764	8 896	9 149
Sulawesi Utara	7 837	9 923	7 981
Sulawesi Tengah	8 988	9 602	10 240
Sulawesi Selatan <sup>2)</sup>	16 088	15 071	21 616
Sulawesi Tenggara	3 655	3 756	2 866
Gorontalo	3 372	3 763	3 099
Sulawesi Barat	-	-	1 841
Maluku	1 873	2 559	3 086
Maluku Utara	814	1 096	789
Papua Barat	1 356	3 123	2 284
Papua	7 194	8 103	6 785
<b>INDONESIA</b>	<b>352 936</b>	<b>357 197</b>	<b>336 652</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

<sup>2</sup> Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

**Tabel 2.1. 4 Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2015-2017**

<b>Kepolisian Daerah</b>	<b>Tahun</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	2 539	4 134	2 416
Sumatera Utara	20 774	23 167	26 829
Sumatera Barat	7 451	6 433	5 662
Riau	5 388	4 565	3 732
Jambi	4 388	2 869	6 214
Sumatera Selatan	9 261	5 051	10 514
Bengkulu	1 997	8 853	2 420
Lampung	6 413	7 261	7 638
Kep. Bangka Belitung	825	883	1 252
Kepulauan Riau	2 511	2 295	2 068
Metro Jaya <sup>1)</sup>	30 823	27 983	28 075
Jawa Barat	11 968	13 629	14 375
Jawa Tengah	12 580	12 994	11 291
DI Yogyakarta	4 413	3 427	2 873
Jawa Timur	23 940	18 466	18 915
Banten	1 917	2 715	2 264
Bali	3 867	3 036	2 850
Nusa Tenggara Barat	3 230	6 334	4 257
Nusa Tenggara Timur	4 204	4 302	4 776
Kalimantan Barat	4 548	4 413	4 345
Kalimantan Tengah	1 714	5 666	2 306
Kalimantan Selatan	5 305	2 060	5 005
Kalimantan Timur	4 862	5 522	6 387
Sulawesi Utara	5 178	7 329	5 621
Sulawesi Tengah	4 444	3 885	4 787
Sulawesi Selatan <sup>2)</sup>	12 264	11 938	13 416
Sulawesi Tenggara	2 125	1 723	1 993
Gorontalo	1 419	1 391	2 830
Sulawesi Barat	-	-	1 029
Maluku	423	540	686
Maluku Utara	323	506	352
Papua Barat	372	1 296	231
Papua	3 704	5 155	4 649
<b>INDONESIA</b>	<b>205 170</b>	<b>209 821</b>	<b>212 058</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

<sup>2</sup> Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

**Tabel 2.1. 5 Persentase Penyelesaian Kejahatan (*Clearance Rate*) Menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2015-2017**

Kepolisian Daerah (1)	Tahun		
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)
Aceh	31,55	42,86	27,19
Sumatera Utara	58,94	62,44	67,30
Sumatera Barat	45,78	43,11	42,88
Riau	56,15	53,58	54,33
Jambi	41,54	48,59	65,20
Sumatera Selatan	45,01	53,60	66,85
Bengkulu	44,75	43,47	49,72
Lampung	69,57	69,25	68,88
Kep. Bangka Belitung	44,00	42,17	64,84
Kepulauan Riau	51,33	46,98	56,30
Metro Jaya <sup>1)</sup>	69,33	63,83	80,75
Jawa Barat	43,04	46,43	57,08
Jawa Tengah	78,83	90,53	93,83
DI Yogyakarta	45,53	41,05	39,62
Jawa Timur	67,56	63,89	54,67
Banten	38,32	59,41	61,32
Bali	76,85	63,73	79,41
Nusa Tenggara Barat	53,70	81,42	52,35
Nusa Tenggara Timur	62,66	55,06	70,98
Kalimantan Barat	68,20	60,36	72,18
Kalimantan Tengah	63,93	78,57	85,44
Kalimantan Selatan	77,91	55,50	76,09
Kalimantan Timur	55,48	62,07	69,81
Sulawesi Utara	66,07	73,86	70,43
Sulawesi Tengah	49,44	40,46	46,75
Sulawesi Selatan <sup>2)</sup>	76,23	79,21	62,07
Sulawesi Tenggara	58,14	45,87	69,54
Gorontalo	42,08	36,97	91,32
Sulawesi Barat	-	-	55,89
Maluku	22,95	21,10	22,23
Maluku Utara	39,68	46,17	44,61
Papua Barat	27,43	41,50	10,11
Papua <sup>2)</sup>	51,49	63,62	68,52
<b>INDONESIA</b>	<b>58,13</b>	<b>58,74</b>	<b>62,99</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

<sup>2</sup> Polda pada tahun 2014 s.d. 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua sebelum 2015 masih meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

**Tabel 2.1. 6 Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (*Crime Clock*) Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2015-2017**

Kepolisian Daerah (1)	Tahun		
	2015 (3)	2016 (4)	2017 (5)
Aceh	01.05'18"	00.54'29"	0.59'09"
Sumatera Utara	00.14'54"	00.14'09"	0.13'11"
Sumatera Barat	00.32'17"	00.35'13"	0.39'48"
Riau	00.54'46"	01.01'41"	1.16'31"
Jambi	00.49'45"	01.29'01"	0.55'08"
Sumatera Selatan	00.25'32"	00.55'46"	0.33'25"
Bengkulu	01.57'46"	00.25'48"	1.47'59"
Lampung	00.57'01"	00.50'07"	0.47'23"
Kep. Bangka Belitung	04.40'19"	04.11'00"	4.32'11"
Kepulauan Riau	01.47'26"	01.47'35"	2.23'05"
Metro Jaya <sup>1)</sup>	00.11'49"	00.11'59"	0.15'07"
Jawa Barat	00.18'54"	00.17'54"	0.20'52"
Jawa Tengah	00.32'56"	00.36'37"	0.43'40"
DI Yogyakarta	00.54'13"	01.02'57"	1.12'29"
Jawa Timur	00.14'49"	00.18'11"	0.15'11"
Banten	01.45'04"	01.55'00"	2.22'21"
Bali	01.44'27"	01.50'19"	2.26'26"
Nusa Tenggara Barat	01.27'22"	01.07'33"	1.04'38"
Nusa Tenggara Timur	01.18'20"	01.07'16"	1.18'06"
Kalimantan Barat	01.18'48"	01.11'53"	1.27'18"
Kalimantan Tengah	03.16'02"	01.12'53"	3.14'44"
Kalimantan Selatan	01.17'11"	02.21'35"	1.19'54"
Kalimantan Timur	00.59'58"	00.59'04"	0.57'26"
Sulawesi Utara	01.07'03"	00.52'58"	1.05'51"
Sulawesi Tengah	00.58'28"	00.54'44"	0.51'19"
Sulawesi Selatan <sup>2)</sup>	00.32'40"	00.34'52"	0.24'18"
Sulawesi Tenggara	02.23'48"	02.19'56"	3.03'23"
Gorontalo	02.35'52"	02.19'40"	2.49'36"
Sulawesi Barat	-	-	4.45'29"
Maluku	04.45'11"	03.25'23"	2.50'19"
Maluku Utara	10.45'42"	10.52'55"	11.06'09"
Papua Barat	06.27'36"	02.48'17"	3.50'07"
Papua	01.13'03"	01.04'51"	1.17'27"
<b>INDONESIA</b>	<b>00.01'29"</b>	<b>00.01'28"</b>	<b>0.01'33"</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

<sup>2</sup> Polda Sulsel pada tahun 2015 s.d. 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

**Tabel 2.1. 7 Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2015-2017**

Kepolisian Daerah (1)	Tahun		
	2015 (3)	2016 (4)	2017 (5)
A c e h	164	194	171
Sumatera Utara	256	258	280
Sumatera Barat	317	283	248
Riau	155	124	103
Jambi	316	298	271
Sumatera Selatan	259	274	190
Bengkulu	242	250	252
Lampung	115	131	134
Kep. Bangka Belitung	140	139	135
Kepulauan Riau	255	236	176
Metro Jaya <sup>1)</sup>	181	169	138
Jawa Barat	73	68	65
Jawa Tengah	48	39	35
DI Yogyakarta	266	211	193
Jawa Timur	92	52	88
Banten	101	87	55
Bali	123	106	85
Nusa Tenggara Barat	126	166	164
Nusa Tenggara Timur	133	146	127
Kalimantan Barat	141	147	122
Kalimantan Tengah	110	118	104
Kalimantan Selatan	174	166	160
Kalimantan Timur	221	252	214
Sulawesi Utara	328	343	324
Sulawesi Tengah	317	326	345
Sulawesi Selatan <sup>2)</sup>	166	166	256
Sulawesi Tenggara	149	135	110
Gorontalo	302	305	265
Sulawesi Barat	-	-	146
Maluku	111	122	177
Maluku Utara	71	69	65
Papua Barat	160	396	146
Papua	233	236	208
<b>INDONESIA</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>129</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

<sup>2</sup> Polda Sulsel pada tahun 2014 s.d. 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

**Tabel 2.1. 8 Banyaknya Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, Tahun 2015-2017**

Kelompok/Jenis Kejahatan (1)	Tahun		
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)
<b>Kejahatan terhadap Nyawa</b>			
Pembunuhan	1 491	1 292	1 150
<b>Kejahatan terhadap Fisik/Badan</b>			
Penganiayaan Berat	14 664	14 468	12 405
Penganiayaan Ringan	22 981	21 155	21 329
Kekerasan dalam Rumah Tangga	9 483	11 083	8 949
<b>Kejahatan terhadap Kesusailaan</b>			
Perkosaan	1 739	1 594	1 394
Pencabulan	3 312	3 653	4 119
<b>Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang</b>			
Penculikan	380	374	241
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	1 832	2 511	2 395
<b>Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan</b>			
Pencurian dengan Kekerasan	10 759	10 726	9 459
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	312	272	211
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	785	1 097	1 022
<b>Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang</b>			
Pencurian	26 298	26 636	28 313
Pencurian dengan Pemberatan	41 100	46 277	36 467
Pencurian Kendaraan Bermotor	38 389	37 871	35 226
Pengrusakan/Penghancuran Barang	6 968	7 926	5 954
Pembakaran dengan Sengaja	721	650	468
Penadahan	537	666	614
<b>Kejahatan Terkait Narkotika</b>			
Narkotika dan Psikotropika	36 874	39 171	35 412
<b>Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi</b>			
Penipuan/Perbuatan Curang	30 689	27 421	19 671
Penggelapan	21 646	20 459	27 418
Korupsi	1 780	1 318	505
<b>Kejahatan terhadap Ketertiban Umum</b>			
Terhadap Ketertiban Umum	4 227	4 297	4 084

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1. 9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan di Tahun 2017**

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan (2017)		
	Januari (1)	Februari (2)	Maret (3)
<b>Kejahatan terhadap Nyawa</b>			
Pembunuhan	119	122	124
<b>Kejahatan terhadap Fisik/Badan</b>			
Penganiayaan Berat	1 037	888	1 240
Penganiayaan Ringan	2 096	1 684	1 665
Kekerasan dalam Rumah Tangga	790	658	903
<b>Kejahatan terhadap Kesusailaan</b>			
Perkosaan	185	116	91
Pencabulan	377	355	364
<b>Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang</b>			
Penculikan	20	13	22
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	191	271	190
<b>Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan</b>			
Pencurian dengan Kekerasan	869	1 001	856
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	23	9	14
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	106	96	91
<b>Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang</b>			
Pencurian	2 685	2 361	2 565
Pencurian dengan Pemberatan	3 787	3 212	3 419
Pencurian Kendaraan Bermotor	3 513	3 346	3 381
Pengrusakan/Penghancuran Barang	547	482	526
Pembakaran dengan Sengaja	29	41	42
Penadahan	43	34	74
<b>Kejahatan Terkait Narkotika</b>			
Narkotika dan Psikotropika	2 935	3 547	3 093
<b>Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi</b>			
Penipuan/Perbuatan Curang	2 564	2 180	2 524
Penggelapan	1 906	1 759	1 778
Korupsi	66	55	49
<b>Kejahatan terhadap Ketertiban Umum</b>			
Terhadap Ketertiban Umum	432	352	349

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Lanjutan Tabel 2.1.9**

Kelompok/Jenis Kejahatan (1)	Bulan (2017)		
	April (5)	Mei (6)	Juni (7)
<b>Kejahatan terhadap Nyawa</b>			
Pembunuhan	116	113	101
<b>Kejahatan terhadap Fisik/Badan</b>			
Penganiayaan Berat	1 166	1 021	971
Penganiayaan Ringan	1 548	1 821	1 490
Kekerasan dalam Rumah Tangga	895	845	773
<b>Kejahatan terhadap Kesusailaan</b>			
Perkosaan	117	136	77
Pencabulan	348	342	386
<b>Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang</b>			
Penculikan	35	23	20
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	190	197	157
<b>Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan</b>			
Pencurian dengan Kekerasan	798	723	718
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	14	21	14
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	127	72	88
<b>Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang</b>			
Pencurian	2 373	2 419	2 273
Pencurian dengan Pemberatan	3 322	3 220	2 602
Pencurian Kendaraan Bermotor	2 887	3 113	2 748
Pengrusakan/Penghancuran Barang	523	551	439
Pembakaran dengan Sengaja	32	48	36
Penadahan	58	49	51
<b>Kejahatan Terkait Narkotika</b>			
Narkotika dan Psikotropika	2 944	3 145	2 293
<b>Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi</b>			
Penipuan/Perbuatan Curang	2 345	2 283	2 151
Penggelapan	1 456	1 649	1 490
Korupsi	46	53	35
<b>Kejahatan terhadap Ketertiban Umum</b>			
Terhadap Ketertiban Umum	296	299	309

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Lanjutan Tabel 2.1.9**

Kelompok/Jenis Kejahatan (1)	Bulan (2017)		
	Juli (8)	Agustus (9)	September (10)
	<b>Kejahatan terhadap Nyawa</b>		
Pembunuhan	74	75	76
<b>Kejahatan terhadap Fisik/Badan</b>			
Penganiayaan Berat	1 030	978	1 022
Penganiayaan Ringan	1 880	1 913	1 861
Kekerasan dalam Rumah Tangga	787	686	635
<b>Kejahatan terhadap Kesusailaan</b>			
Perkosaan	117	137	134
Pencabulan	324	312	378
<b>Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang</b>			
Penculikan	12	23	28
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	216	254	170
<b>Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan</b>			
Pencurian dengan Kekerasan	735	803	765
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	18	25	30
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	46	92	90
<b>Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang</b>			
Pencurian	2 269	2 369	2 276
Pencurian dengan Pemberatan	2 771	2 938	2 818
Pencurian Kendaraan Bermotor	2 914	2 749	2 925
Pengrusakan/Penghancuran Barang	464	500	469
Pembakaran dengan Sengaja	35	45	61
Penadahan	35	53	47
<b>Kejahatan Terkait Narkotika</b>			
Narkotika dan Psikotropika	2 658	3 468	2 817
<b>Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi</b>			
Penipuan/Perbuatan Curang	2 106	2 390	2 152
Penggelapan	1 598	1 659	1 602
Korupsi	53	36	30
<b>Kejahatan terhadap Ketertiban Umum</b>			
Terhadap Ketertiban Umum	335	320	350

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Lanjutan Tabel 2.1.9**

Kelompok/Jenis Kejahatan (1)	Bulan (2017)		
	Oktober (11)	November (12)	Desember (13)
<b>Kejahatan terhadap Nyawa</b>			
Pembunuhan	79	75	76
<b>Kejahatan terhadap Fisik/Badan</b>			
Penganiayaan Berat	1 030	1 064	958
Penganiayaan Ringan	1 979	1 580	1 812
Kekerasan dalam Rumah Tangga	718	641	618
<b>Kejahatan terhadap Kesusailaan</b>			
Perkosaan	103	87	94
Pencabulan	316	317	300
<b>Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang</b>			
Penculikan	19	14	12
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	196	175	140
<b>Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan</b>			
Pencurian dengan Kekerasan	789	775	627
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	13	15	15
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	94	45	75
<b>Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang</b>			
Pencurian	2 506	2 225	1 992
Pencurian dengan Pemberatan	3 030	2 690	2 658
Pencurian Kendaraan Bermotor	2 759	2 641	2 250
Pengrusakan/Penghancuran Barang	531	449	473
Pembakaran dengan Sengaja	39	31	29
Penadahan	59	62	49
<b>Kejahatan Terkait Narkotika</b>			
Narkotika dan Psikotropika	2 996	2 805	2 711
<b>Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi</b>			
Penipuan/Perbuatan Curang	2 472	2 334	1 917
Penggelapan	1 712	1 630	1 432
Korupsi	33	31	18
<b>Kejahatan terhadap Ketertiban Umum</b>			
Terhadap Ketertiban Umum	361	319	362

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1. 10 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, Tahun 2015**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa		Kejahatan terhadap Fisik		
	Pembunuhan	Penganiayaan Berat	Penganiayaan Ringan	KDRT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A c e h	40	217	1 418	440	
Sumatera Utara	118	2 953	2 629	-	
Sumatera Barat	18	498	2 523	325	
Riau	49	242	826	318	
Jambi	23	479	438	250	
Sumatera Selatan	161	1 558	526	650	
Bengkulu	19	221	30	129	
Lampung	29	124	94	148	
Kep. Bangka Belitung	11	93	9	62	
Kepulauan Riau	17	192	497	200	
Metro Jaya <sup>1)</sup>	75	1 848	93	1 027	
Jawa Barat	74	837	897	591	
Jawa Tengah	48	444	677	408	
DI Yogyakarta	9	76	200	136	
Jawa Timur	62	703	524	440	
Banten	2	91	367	65	
Bali	15	4	353	223	
Nusa Tenggara Barat	44	103	-	320	
Nusa Tenggara Timur	80	807	1 461	412	
Kalimantan Barat	14	42	-	220	
Kalimantan Tengah	29	46	178	52	
Kalimantan Selatan	59	323	196	103	
Kalimantan Timur	43	499	421	248	
Sulawesi Utara	104	866	249	254	
Sulawesi Tengah	49	73	1 594	395	
Sulawesi Selatan <sup>2)</sup>	102	201	3 555	1 051	
Sulawesi Tenggara	58	9	613	138	
Gorontalo	27	133	1 064	193	
Maluku	12	90	459	135	
Maluku Utara	4	176	-	33	
Papua Barat	1	105	146	55	
Papua	95	611	944	462	
<b>INDONESIA</b>	<b>1 491</b>	<b>14 664</b>	<b>22 981</b>	<b>9 483</b>	

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

<sup>2</sup> Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

**Lanjutan Tabel 2.1.10**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusilaan		Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	
	Perkosaan	Pencabulan	Penculikan	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
A c e h	61	174	38	26
Sumatera Utara	154	-	24	81
Sumatera Barat	67	302	3	124
Riau	284	-	3	1
Jambi	81	14	4	19
Sumatera Selatan	111	153	48	145
Bengkulu	13	44	-	-
Lampung	32	40	6	-
Kep. Bangka Belitung	6	41	2	46
Kepulauan Riau	36	131	7	1
Metro Jaya <sup>1)</sup>	61	180	56	-
Jawa Barat	102	178	33	103
Jawa Tengah	41	234	6	359
DI Yogyakarta	19	24	7	38
Jawa Timur	91	167	37	127
Banten	7	60	2	129
Bali	11	39	3	8
Nusa Tenggara Barat	46	-	12	34
Nusa Tenggara Timur	50	177	9	48
Kalimantan Barat	18	130	-	75
Kalimantan Tengah	21	112	-	20
Kalimantan Selatan	49	13	8	15
Kalimantan Timur	26	189	4	-
Sulawesi Utara	37	253	16	-
Sulawesi Tengah	33	181	21	-
Sulawesi Selatan <sup>2)</sup>	95	211	13	-
Sulawesi Tenggara	56	52	2	18
Gorontalo	20	82	3	15
Maluku	20	43	10	54
Maluku Utara	13	43	-	17
Papua Barat	8	4	1	50
Papua	70	41	2	279
<b>INDONESIA</b>	<b>1 739</b>	<b>3 312</b>	<b>380</b>	<b>1 832</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3<sup>2</sup> Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

**Lanjutan Tabel 2.1.10**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi)	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam)
(1)	(10)	(11)	(12)
A c e h	38	3	8
Sumatera Utara	1 587	4	-
Sumatera Barat	506	-	14
Riau	454	47	2
Jambi	382	5	-
Sumatera Selatan	1 776	55	82
Bengkulu	291	5	3
Lampung	759	73	9
Kep. Bangka Belitung	20	3	4
Kepulauan Riau	133	1	14
Metro Jaya <sup>1)</sup>	692	44	149
Jawa Barat	853	39	34
Jawa Tengah	365	5	78
DI Yogyakarta	215	-	-
Jawa Timur	747	6	12
Banten	117	2	2
Bali	43	1	19
Nusa Tenggara Barat	163	5	-
Nusa Tenggara Timur	44	-	1
Kalimantan Barat	190	3	1
Kalimantan Tengah	38	1	115
Kalimantan Selatan	132	1	-
Kalimantan Timur	141	4	109
Sulawesi Utara	24	1	1
Sulawesi Tengah	237	1	1
Sulawesi Selatan <sup>2)</sup>	422	2	125
Sulawesi Tenggara	110	-	-
Gorontalo	3	-	2
Maluku	-	-	-
Maluku Utara	2	-	-
Papua Barat	79	1	-
Papua	196	-	-
<b>INDONESIA</b>	<b>10 759</b>	<b>312</b>	<b>80</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3<sup>2</sup> Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

**Lanjutan Tabel 2.1.10**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	1 732	188	1 661	32
Sumatera Utara	2 004	5 709	4 934	43
Sumatera Barat	1 531	3 118	2 977	7
Riau	765	1 641	1 046	24
Jambi	752	2 188	1 406	-
Sumatera Selatan	668	3 895	1 723	5
Bengkulu	314	781	417	1
Lampung	280	2 142	276	2
Kep. Bangka Belitung	208	327	144	-
Kepulauan Riau	815	245	915	10
Metro Jaya <sup>1)</sup>	1 823	3 547	3 169	63
Jawa Barat	1 444	3 125	5 063	38
Jawa Tengah	1 041	2 860	2 053	39
DI Yogyakarta	821	704	569	16
Jawa Timur	901	3 707	1 273	45
Banten	219	1 006	988	12
Bali	378	406	400	5
Nusa Tenggara Barat	525	472	-	14
Nusa Tenggara Timur	808	216	247	79
Kalimantan Barat	974	702	821	8
Kalimantan Tengah	148	304	345	16
Kalimantan Selatan	375	597	569	21
Kalimantan Timur	832	969	1 481	13
Sulawesi Utara	625	72	202	8
Sulawesi Tengah	1 279	698	1 091	4
Sulawesi Selatan <sup>2)</sup>	2 306	686	2 489	11
Sulawesi Tenggara	474	202	289	4
Gorontalo	678	30	154	1
Maluku	399	8	93	1
Maluku Utara	83	10	22	2
Papua Barat	193	230	35	4
Papua	903	315	1 537	9
<b>INDONESIA</b>	<b>26 298</b>	<b>41 100</b>	<b>38 389</b>	<b>537</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3<sup>2</sup> Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

**Lanjutan Tabel 2.1.10**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		Kejahatan terkait Narkotika Narkotika dan Psikotropika (19)
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja (18)	
(1)	(17)		
A c e h	61	54	948
Sumatera Utara	1 012	78	4 711
Sumatera Barat	701	19	974
Riau	241	30	1 294
Jambi	205	21	371
Sumatera Selatan	320	63	1 443
Bengkulu	76	3	263
Lampung	126	3	1 257
Kep. Bangka Belitung	18	9	203
Kepulauan Riau	110	2	420
Metro Jaya <sup>1)</sup>	256	12	5 860
Jawa Barat	306	8	1 729
Jawa Tengah	111	20	1 350
DI Yogyakarta	107	3	466
Jawa Timur	344	30	8 021
Banten	47	-	234
Bali	52	2	981
Nusa Tenggara Barat	141	17	214
Nusa Tenggara Timur	302	44	24
Kalimantan Barat	94	32	379
Kalimantan Tengah	19	77	291
Kalimantan Selatan	26	20	1 899
Kalimantan Timur	86	26	1 059
Sulawesi Utara	465	11	872
Sulawesi Tengah	440	25	249
Sulawesi Selatan <sup>2)</sup>	540	43	977
Sulawesi Tenggara	274	5	158
Gorontalo	200	26	11
Maluku	14	22	21
Maluku Utara	8	-	46
Papua Barat	47	-	9
Papua	219	16	140
<b>INDONESIA</b>	<b>6 968</b>	<b>721</b>	<b>36 874</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3<sup>2</sup> Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Lanjutan Tabel 2.1.10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Ketertiban Umum Terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)
A c e h	417	444	50	4
Sumatera Utara	2 881	2 059	83	-
Sumatera Barat	1 279	1 379	84	300
Riau	819	389	59	9
Jambi	1 047	988	48	371
Sumatera Selatan	1 490	1 381	68	286
Bengkulu	356	355	33	14
Lampung	658	722	34	11
Kep. Bangka Belitung	68	78	24	-
Kepulauan Riau	294	351	22	-
Metro Jaya <sup>1)</sup>	2 595	5 823	69	331
Jawa Barat	1 247	3 608	78	462
Jawa Tengah	1 351	1 353	94	172
DI Yogyakarta	548	1 404	25	97
Jawa Timur	1 731	4 197	171	94
Banten	172	587	31	19
Bali	268	229	49	7
Nusa Tenggara Barat	181	194	45	4
Nusa Tenggara Timur	247	403	60	877
Kalimantan Barat	576	319	68	-
Kalimantan Tengah	142	64	48	-
Kalimantan Selatan	247	153	52	8
Kalimantan Timur	530	398	94	5
Sulawesi Utara	452	735	40	8
Sulawesi Tengah	647	785	24	14
Sulawesi Selatan <sup>2)</sup>	724	1 229	113	2
Sulawesi Tenggara	218	399	49	1
Gorontalo	280	350	29	8
Maluku	10	21	15	294
Maluku Utara	20	16	22	-
Papua Barat	58	91	5	175
Papua	93	185	94	654
<b>INDONESIA</b>	<b>21 646</b>	<b>30 689</b>	<b>1 780</b>	<b>4 227</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

<sup>2</sup> Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

**Tabel 2.1. 11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, Tahun 2016**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa		Kejahatan terhadap Fisik		KDRT
	Pembunuhan	Penganiayaan Berat	Penganiayaan Ringan	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A c e h	43	233	1 320	450	
Sumatera Utara	161	2 959	2 743	-	
Sumatera Barat	21	435	1 911	387	
Riau	20	172	661	366	
Jambi	27	387	519	237	
Sumatera Selatan	132	1 575	377	576	
Bengkulu	18	307	88	215	
Lampung	56	146	37	241	
Kep. Bangka Belitung	10	43	2	46	
Kepulauan Riau	8	243	371	196	
Metro Jaya <sup>1)</sup>	69	1 601	404	1 324	
Jawa Barat	113	753	1 032	686	
Jawa Tengah	33	310	513	258	
DI Yogyakarta	6	120	169	158	
Jawa Timur	49	688	496	491	
Banten	3	121	343	70	
Bali	13	5	398	186	
Nusa Tenggara Barat	22	33	-	454	
Nusa Tenggara Timur	44	959	1 250	456	
Kalimantan Barat	20	109	-	193	
Kalimantan Tengah	33	28	191	52	
Kalimantan Selatan	41	275	115	71	
Kalimantan Timur	23	470	319	341	
Sulawesi Utara	128	993	276	789	
Sulawesi Tengah	25	52	1 803	540	
Sulawesi Selatan <sup>2)</sup>	81	211	2 725	1 019	
Sulawesi Tenggara	10	9	836	204	
Gorontalo	12	70	950	245	
Maluku	9	71	383	138	
Maluku Utara	23	167	-	52	
Papua <sup>2)</sup>	25	670	512	492	
<b>INDONESIA</b>	<b>1 292</b>	<b>14 468</b>	<b>21 155</b>	<b>11 083</b>	

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1)</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

<sup>2)</sup> Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

**Lanjutan Tabel 2.1.11**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusilaan		Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	
	Perkosaan (1)	Pencabulan (6)	Penculikan (7)	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur (9)
A c e h	40	251	18	42
Sumatera Utara	186	-	79	133
Sumatera Barat	54	286	2	146
Riau	173	-	2	1
Jambi	93	18	3	79
Sumatera Selatan	115	96	17	166
Bengkulu	27	92	1	-
Lampung	80	18	24	-
Kep. Bangka Belitung	10	46	1	34
Kepulauan Riau	10	122	1	-
Metro Jaya <sup>1)</sup>	70	210	67	99
Jawa Barat	89	233	44	126
Jawa Tengah	15	259	4	314
DI Yogyakarta	3	53	14	45
Jawa Timur	56	195	17	151
Banten	8	70	1	123
Bali	27	66	2	29
Nusa Tenggara Barat	39	-	7	78
Nusa Tenggara Timur	55	143	5	16
Kalimantan Barat	27	120	1	155
Kalimantan Tengah	7	96	-	3
Kalimantan Selatan	59	-	-	-
Kalimantan Timur	31	199	3	9
Sulawesi Utara	41	285	17	1
Sulawesi Tengah	54	162	6	37
Sulawesi Selatan <sup>2)</sup>	60	243	10	182
Sulawesi Tenggara	40	94	-	93
Gorontalo	22	127	-	42
Maluku	15	48	17	96
Maluku Utara	18	64	2	15
Papua <sup>2)</sup>	49	37	2	149
<b>INDONESIA</b>	<b>1 594</b>	<b>3 653</b>	<b>374</b>	<b>2 511</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3<sup>2</sup> Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

**Lanjutan Tabel 2.1.11**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi)	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam)
(1)	(10)	(11)	(12)
A c e h	179	3	9
Sumatera Utara	1 153	7	-
Sumatera Barat	512	1	19
Riau	348	33	10
Jambi	368	7	-
Sumatera Selatan	1 406	37	83
Bengkulu	214	4	13
Lampung	720	27	14
Kep. Bangka Belitung	31	1	3
Kepulauan Riau	166	1	3
Metro Jaya <sup>1)</sup>	743	53	188
Jawa Barat	1 107	59	23
Jawa Tengah	247	1	45
DI Yogyakarta	171	1	-
Jawa Timur	406	3	17
Banten	139	4	-
Bali	41	-	14
Nusa Tenggara Barat	393	6	-
Nusa Tenggara Timur	89	1	1
Kalimantan Barat	305	1	-
Kalimantan Tengah	38	1	75
Kalimantan Selatan	105	4	355
Kalimantan Timur	133	5	122
Sulawesi Utara	28	-	3
Sulawesi Tengah	336	5	1
Sulawesi Selatan <sup>2)</sup>	646	1	85
Sulawesi Tenggara	43	1	11
Gorontalo	14	2	-
Maluku	16	-	-
Maluku Utara	4	-	1
Papua <sup>2)</sup>	363	3	-
<b>INDONESIA</b>	<b>10 726</b>	<b>272</b>	<b>1 097</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3<sup>2</sup> Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lanjutan Tabel 2.1.11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)
A c e h	1 568	481	1 688	38
Sumatera Utara	2 145	5 630	4 726	56
Sumatera Barat	1 632	3 034	2 975	7
Riau	662	1 584	704	25
Jambi	755	1 750	1 156	-
Sumatera Selatan	566	3 742	1 348	18
Bengkulu	560	1 082	725	18
Lampung	400	1 805	101	6
Kep. Bangka Belitung	189	671	135	3
Kepulauan Riau	864	501	542	7
Metro Jaya <sup>1)</sup>	1 642	3 302	2 941	109
Jawa Barat	1 059	3 652	5 234	29
Jawa Tengah	867	2 713	1 796	25
DI Yogyakarta	628	795	563	6
Jawa Timur	854	3 971	1 897	102
Banten	200	757	836	10
Bali	501	557	479	5
Nusa Tenggara Barat	638	945	-	18
Nusa Tenggara Timur	908	524	329	60
Kalimantan Barat	997	992	957	11
Kalimantan Tengah	184	693	329	18
Kalimantan Selatan	299	685	447	4
Kalimantan Timur	627	1 179	1 402	10
Sulawesi Utara	765	418	218	27
Sulawesi Tengah	2 100	663	1 581	1
Sulawesi Selatan <sup>2)</sup>	2 194	1 239	2 083	6
Sulawesi Tenggara	618	566	384	14
Gorontalo	697	287	161	-
Maluku	297	550	154	-
Maluku Utara	69	281	20	-
Papua <sup>2)</sup>	745	989	1 730	22
<b>INDONESIA</b>	<b>26 636</b>	<b>46 277</b>	<b>37 871</b>	<b>666</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3<sup>2</sup> Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

**Lanjutan Tabel 2.1.11**

Kepolisian Daerah (1)	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		Kejahatan terkait Narkotika (19) Narkotika dan Psikotropika
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang (17)	Pembakaran dengan Sengaja (18)	
A c e h	188	50	1 402
Sumatera Utara	804	165	5 591
Sumatera Barat	540	23	724
Riau	122	32	1 451
Jambi	163	15	462
Sumatera Selatan	1 724	34	1 640
Bengkulu	54	-	262
Lampung	131	-	949
Kep. Bangka Belitung	32	2	172
Kepulauan Riau	111	-	475
Metro Jaya <sup>1)</sup>	253	7	5 569
Jawa Barat	241	12	2 446
Jawa Tengah	92	9	1 774
DI Yogyakarta	116	4	427
Jawa Timur	151	19	7 523
Banten	28	2	399
Bali	71	10	856
Nusa Tenggara Barat	227	10	341
Nusa Tenggara Timur	334	50	32
Kalimantan Barat	87	3	529
Kalimantan Tengah	16	36	857
Kalimantan Selatan	25	-	1 916
Kalimantan Timur	88	14	1 457
Sulawesi Utara	427	31	1 344
Sulawesi Tengah	295	8	209
Sulawesi Selatan <sup>2)</sup>	515	30	62
Sulawesi Tenggara	139	10	50
Gorontalo	188	28	26
Maluku	79	18	24
Maluku Utara	18	-	27
Papua <sup>2)</sup>	553	22	164
<b>INDONESIA</b>	<b>7 926</b>	<b>650</b>	<b>39 171</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3<sup>2</sup> Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lanjutan Tabel 2.1.11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Ketertiban Umum  Terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)
Aceh	675	648	55	3
Sumatera Utara	2 068	3 009	56	2
Sumatera Barat	1 077	980	30	375
Riau	418	654	45	-
Jambi	896	866	28	351
Sumatera Selatan	1 296	1 493	39	300
Bengkulu	441	379	44	24
Lampung	797	779	38	-
Kep. Bangka Belitung	115	96	15	-
Kepulauan Riau	420	371	26	-
Metro Jaya <sup>1)</sup>	5 969	2 432	52	313
Jawa Barat	3 123	1 475	70	407
Jawa Tengah	1 090	1 022	60	275
DI Yogyakarta	881	417	19	91
Jawa Timur	1 693	666	112	55
Banten	422	190	25	3
Bali	178	267	32	2
Nusa Tenggara Barat	311	277	28	-
Nusa Tenggara Timur	324	223	39	926
Kalimantan Barat	282	590	43	4
Kalimantan Tengah	81	166	45	4
Kalimantan Selatan	207	273	35	-
Kalimantan Timur	384	686	58	4
Sulawesi Utara	689	383	27	7
Sulawesi Tengah	617	564	27	3
Sulawesi Selatan <sup>2)</sup>	1 574	760	61	-
Sulawesi Tenggara	207	121	36	-
Gorontalo	436	290	26	7
Maluku	123	71	24	243
Maluku Utara	36	16	35	-
Papua <sup>2)</sup>	353	188	68	523
<b>INDONESIA</b>	<b>27 421</b>	<b>20 459</b>	<b>1 318</b>	<b>4 297</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

<sup>2</sup> Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

**Tabel 2.1. 12 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, Tahun 2017**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa		Kejahatan terhadap Fisik		
	Pembunuhan	Penganiayaan Berat	Penganiayaan Ringan	KDRT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A c e h	27	226	1 208	330	
Sumatera Utara	92	2 791	2 842	-	
Sumatera Barat	14	329	1 744	298	
Riau	28	185	405	201	
Jambi	24	293	467	255	
Sumatera Selatan	147	1 239	282	522	
Bengkulu	37	186	63	146	
Lampung	50	152	124	125	
Kep. Bangka Belitung	9	50	3	42	
Kepulauan Riau	6	154	345	142	
Metro Jaya <sup>1)</sup>	76	990	251	754	
Jawa Barat	89	862	1 009	676	
Jawa Tengah	30	187	369	174	
DI Yogyakarta	1	93	144	124	
Jawa Timur	60	1 026	693	723	
Banten	31	106	208	37	
Bali	11	6	418	158	
Nusa Tenggara Barat	7	50	99	335	
Nusa Tenggara Timur	34	484	1 533	474	
Kalimantan Barat	13	79	-	175	
Kalimantan Tengah	30	50	133	39	
Kalimantan Selatan	30	221	112	54	
Kalimantan Timur	22	454	245	198	
Sulawesi Utara	103	585	-	359	
Sulawesi Tengah	15	32	1 487	439	
Sulawesi Selatan	65	228	3 964	1 348	
Sulawesi Tenggara	17	9	744	171	
Gorontalo	10	34	1 250	161	
Sulawesi Barat	15	15	451	98	
Maluku	7	576	121	124	
Maluku Utara	7	107	38	39	
Papua Barat	6	233	164	53	
Papua	37	373	413	175	
<b>INDONESIA</b>	<b>1 150</b>	<b>12 405</b>	<b>21 329</b>	<b>8 949</b>	

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

**Lanjutan Tabel 2.1.12**

Kepolisian Daerah <b>(1)</b>	Kejahatan terhadap Kesusastraan Perkosaan <b>(6)</b>	Pencabulan <b>(7)</b>	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Kejahatan	
			Penculikan <b>(8)</b>	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur <b>(9)</b>
A c e h	51	260	19	19
Sumatera Utara	216	8	19	-
Sumatera Barat	56	287	-	158
Riau	87	10	3	8
Jambi	107	6	3	222
Sumatera Selatan	90	130	12	104
Bengkulu	13	81	-	5
Lampung	91	72	2	6
Kep. Bangka Belitung	10	33	-	38
Kepulauan Riau	12	119	5	-
Metro Jaya <sup>1)</sup>	42	134	41	3
Jawa Barat	63	286	28	124
Jawa Tengah	21	249	3	219
DI Yogyakarta	7	31	6	18
Jawa Timur	38	220	7	203
Banten	3	89	2	109
Bali	6	71	1	21
Nusa Tenggara Barat	36	28	2	74
Nusa Tenggara Timur	47	168	7	33
Kalimantan Barat	35	191	1	103
Kalimantan Tengah	8	86	-	2
Kalimantan Selatan	18	50	-	-
Kalimantan Timur	23	125	3	-
Sulawesi Utara	56	328	24	1
Sulawesi Tengah	38	207	24	-
Sulawesi Selatan	70	252	7	398
Sulawesi Tenggara	28	114	2	27
Gorontalo	23	143	-	46
Sulawesi Barat	18	44	6	27
Maluku	26	97	8	134
Maluku Utara	3	152	1	13
Papua Barat	19	15	3	99
Papua	33	33	2	181
INDONESIA	1 394	4 119	241	2 395

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1)</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

**Lanjutan Tabel 2.1.12**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi)	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam)
(1)	(10)	(11)	(12)
A c e h	208	3	8
Sumatera Utara	900	8	-
Sumatera Barat	446	2	15
Riau	222	24	17
Jambi	265	9	-
Sumatera Selatan	989	31	44
Bengkulu	198	4	1
Lampung	718	31	25
Kep. Bangka Belitung	25	-	-
Kepulauan Riau	163	-	12
Metro Jaya <sup>1)</sup>	483	28	124
Jawa Barat	947	30	26
Jawa Tengah	198	15	43
DI Yogyakarta	117	-	-
Jawa Timur	611	3	13
Banten	124	4	-
Bali	63	2	20
Nusa Tenggara Barat	400	3	-
Nusa Tenggara Timur	124	1	-
Kalimantan Barat	180	-	-
Kalimantan Tengah	20	-	112
Kalimantan Selatan	109	1	365
Kalimantan Timur	121	5	106
Sulawesi Utara	133	-	7
Sulawesi Tengah	210	4	-
Sulawesi Selatan	1 094	2	41
Sulawesi Tenggara	27	-	2
Gorontalo	8	-	-
Sulawesi Barat	11	-	25
Maluku	7	-	-
Maluku Utara	3	-	13
Papua Barat	89	-	3
Papua	246	1	-
<b>INDONESIA</b>	<b>9 459</b>	<b>211</b>	<b>1 022</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1)</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

**Lanjutan Tabel 2.1.12**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)
A c e h	1 351	664	968	34
Sumatera Utara	2 282	5 066	4 030	22
Sumatera Barat	1 604	2 521	2 910	2
Riau	541	1 078	676	20
Jambi	995	1 683	1 048	-
Sumatera Selatan	508	2 771	1 050	5
Bengkulu	466	810	665	28
Lampung	455	1 504	271	11
Kep. Bangka Belitung	128	479	126	3
Kepulauan Riau	715	271	416	9
Metro Jaya <sup>1)</sup>	1 324	2 180	1 796	151
Jawa Barat	960	3 727	5 414	40
Jawa Tengah	821	2 035	1 665	25
DI Yogyakarta	521	604	573	1
Jawa Timur	1 366	2 822	2 072	59
Banten	153	580	810	9
Bali	447	405	328	10
Nusa Tenggara Barat	649	930	281	5
Nusa Tenggara Timur	1 069	276	349	24
Kalimantan Barat	970	684	560	16
Kalimantan Tengah	136	288	170	12
Kalimantan Selatan	393	594	494	26
Kalimantan Timur	584	767	1 059	7
Sulawesi Utara	809	70	250	20
Sulawesi Tengah	2 378	778	2 357	4
Sulawesi Selatan	3 440	1 633	2 192	46
Sulawesi Tenggara	440	167	279	2
Gorontalo	711	15	134	-
Sulawesi Barat	359	106	133	-
Maluku	413	99	145	4
Maluku Utara	76	8	11	-
Papua Barat	568	224	74	-
Papua	681	628	1 920	19
<b>INDONESIA</b>	<b>28 313</b>	<b>36 467</b>	<b>35 226</b>	<b>614</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

**Lanjutan Tabel 2.1.12**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		Kejahatan terkait Narkotika Narkotika dan Psikotropika
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	
(1)	(17)	(18)	(19)
A c e h	186	35	1 544
Sumatera Utara	876	85	5 907
Sumatera Barat	451	23	592
Riau	61	13	1 173
Jambi	163	24	712
Sumatera Selatan	192	31	1 768
Bengkulu	80	1	192
Lampung	145	1	1 744
Kep. Bangka Belitung	20	3	224
Kepulauan Riau	54	-	400
Metro Jaya <sup>1)</sup>	173	-	7 214
Jawa Barat	251	10	1 090
Jawa Tengah	63	12	1 243
DI Yogyakarta	61	0	290
Jawa Timur	216	29	3 405
Banten	33	-	389
Bali	53	2	665
Nusa Tenggara Barat	210	7	227
Nusa Tenggara Timur	359	40	2
Kalimantan Barat	48	3	490
Kalimantan Tengah	12	23	474
Kalimantan Selatan	27	6	1 211
Kalimantan Timur	73	2	2 928
Sulawesi Utara	402	6	111
Sulawesi Tengah	234	5	259
Sulawesi Selatan	765	17	717
Sulawesi Tenggara	86	9	65
Gorontalo	138	18	38
Sulawesi Barat	48	4	120
Maluku	92	19	73
Maluku Utara	23	-	63
Papua Barat	79	-	41
Papua	280	40	41
<b>INDONESIA</b>	<b>5 954</b>	<b>468</b>	<b>35 412</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1)</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

**Lanjutan Tabel 2.1.12**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Ketertiban Umum Terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)
A c e h	674	643	21	9
Sumatera Utara	2 434	2 831	32	-
Sumatera Barat	967	910	4	360
Riau	323	624	19	2
Jambi	942	905	18	312
Sumatera Selatan	1 127	1 237	12	282
Bengkulu	365	342	21	35
Lampung	710	707	27	1
Kep. Bangka Belitung	108	80	2	-
Kepulauan Riau	404	288	11	-
Metro Jaya <sup>1)</sup>	4 236	1 921	12	227
Jawa Barat	3 345	1 429	19	398
Jawa Tengah	785	726	29	293
DI Yogyakarta	510	296	2	76
Jawa Timur	2 602	981	56	133
Banten	421	193	11	-
Bali	203	235	13	1
Nusa Tenggara Barat	385	316	19	2
Nusa Tenggara Timur	486	274	6	892
Kalimantan Barat	223	446	16	1
Kalimantan Tengah	73	160	21	-
Kalimantan Selatan	261	275	18	-
Kalimantan Timur	357	491	28	178
Sulawesi Utara	691	576	8	8
Sulawesi Tengah	667	662	10	4
Sulawesi Selatan	2 831	1 241	26	3
Sulawesi Tenggara	149	70	12	1
Gorontalo	302	239	4	15
Sulawesi Barat	173	134	3	-
Maluku	219	98	6	298
Maluku Utara	18	22	7	4
Papua Barat	154	103	3	143
Papua	273	216	9	406
<b>INDONESIA</b>	<b>27 418</b>	<b>19 671</b>	<b>505</b>	<b>4 084</b>

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : <sup>1</sup> Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3



**DATA POTENSI DESA  
(KEJADIAN KEJAHATAN)**

**Tabel 2.2. 1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

<b>Provinsi</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>2018</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	6 483	6 512	6 508
Sumatera Utara	5 797	6 104	6 132
Sumatera Barat	1 033	1 145	1 275
Riau	1 655	1 835	1 875
Jambi	1 372	1 551	1 562
Sumatera Selatan	3 186	3 237	3 262
Bengkulu	1 509	1 532	1 514
Lampung	2 464	2 632	2 654
Kep. Bangka Belitung	361	381	391
Kepulauan Riau	353	415	416
DKI Jakarta	267	267	267
Jawa Barat	5 905	5 962	5 957
Jawa Tengah	8 577	8 578	8 559
DI Yogyakarta	438	438	438
Jawa Timur	8 502	8 502	8 496
Banten	1 535	1 551	1 552
Bali	716	716	716
Nusa Tenggara Barat	1 084	1 141	1 143
Nusa Tenggara Timur	2 966	327	3 353
Kalimantan Barat	1 967	2 109	2 137
Kalimantan Tengah	1 528	1 569	1 576
Kalimantan Selatan	2	2 008	2 008
Kalimantan Timur	1 465	1 026	1 038
Kalimantan Utara*	-	479	482
Sulawesi Utara	1 693	1 836	1 838
Sulawesi Tengah	1 815	1 986	2 020
Sulawesi Selatan	2 982	303	3 049
Sulawesi Tenggara	2 121	2 272	2 354
Gorontalo	731	736	734
Sulawesi Barat	638	648	650
Maluku	1 024	1 088	1 240
Maluku Utara	1 079	1 196	1 196
Papua Barat	1 439	1 567	1 987
Papua	3 924	4 871	5 552
<b>INDONESIA</b>	<b>78 609</b>	<b>82 190</b>	<b>83 931</b>

Catatan: Desa pada tabel ini termasuk nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.

\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Sumber : Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018

**Tabel 2.2. 2 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

<b>Jenis Kejahatan</b>	<b>Jumlah</b>			<b>Percentase</b>		
	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>2018</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>2018</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
Pembunuhan	1 585	1 739	1 799	2,02	2,12	2,14
Penganiayaan	4 171	4 047	5 092	5,31	4,92	6,07
Perkosaan	2 122	2 050	2 851	2,70	2,49	3,40
Pencurian dengan Kekerasan	233	2 963	2 821	2,96	3,61	3,36
Pencurian	28 912	33 739	37 778	36,78	41,05	45,01
Penipuan/Penggelapan	5 603	7 244	8 620	7,13	8,81	10,27
Pembakaran	518	874	1 050	0,66	1,06	1,25
Perdagangan Orang	119	122	124	0,15	0,15	0,15
Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba	4 103	5 931	12 579	5,22	7,22	14,99
Perjudian	7 984	11 079	12 842	10,16	13,48	15,30

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

**Tabel 2.2. 3 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	30	26	33
Sumatera Utara	118	130	122
Sumatera Barat	29	39	43
Riau	57	56	72
Jambi	26	30	33
Sumatera Selatan	98	140	114
Bengkulu	24	27	21
Lampung	59	50	66
Kep. Bangka Belitung	19	14	8
Kepulauan Riau	14	14	5
DKI Jakarta	17	29	14
Jawa Barat	124	142	130
Jawa Tengah	103	86	93
DI Yogyakarta	7	16	13
Jawa Timur	138	163	150
Banten	31	32	38
Bali	11	17	9
Nusa Tenggara Barat	32	37	37
Nusa Tenggara Timur	93	80	82
Kalimantan Barat	39	41	29
Kalimantan Tengah	27	51	41
Kalimantan Selatan	57	64	58
Kalimantan Timur	32	31	32
Kalimantan Utara*	-	8	4
Sulawesi Utara	47	61	57
Sulawesi Tengah	34	41	41
Sulawesi Selatan	87	99	95
Sulawesi Tenggara	31	26	39
Gorontalo	16	17	25
Sulawesi Barat	13	8	8
Maluku	25	17	15
Maluku Utara	11	13	21
Papua Barat	18	22	27
Papua	118	112	224
<b>INDONESIA</b>	<b>1 585</b>	<b>1 739</b>	<b>1 799</b>

Sumber : Statistik Podes 20011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan : \* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 4 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	97	99	141
Sumatera Utara	267	264	295
Sumatera Barat	79	107	112
Riau	58	74	139
Jambi	49	50	81
Sumatera Selatan	169	168	173
Bengkulu	59	46	57
Lampung	116	110	157
Kep. Bangka Belitung	54	50	47
Kepulauan Riau	16	20	30
DKI Jakarta	22	66	30
Jawa Barat	452	425	598
Jawa Tengah	321	274	328
DI Yogyakarta	57	54	61
Jawa Timur	439	429	519
Banten	100	84	123
Bali	47	54	64
Nusa Tenggara Barat	131	107	134
Nusa Tenggara Timur	239	166	209
Kalimantan Barat	56	85	78
Kalimantan Tengah	59	68	66
Kalimantan Selatan	95	110	105
Kalimantan Timur	52	52	71
Kalimantan Utara*	-	11	18
Sulawesi Utara	201	161	181
Sulawesi Tengah	100	102	138
Sulawesi Selatan	261	261	263
Sulawesi Tenggara	118	158	140
Gorontalo	73	64	105
Sulawesi Barat	22	17	22
Maluku	64	50	60
Maluku Utara	26	48	46
Papua Barat	41	21	62
Papua	231	192	439
<b>INDONESIA</b>	<b>4 171</b>	<b>4 047</b>	<b>5 092</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 5 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	57	91	93
Sumatera Utara	131	115	178
Sumatera Barat	60	66	106
Riau	44	59	95
Jambi	27	35	54
Sumatera Selatan	66	78	72
Bengkulu	47	57	39
Lampung	63	57	96
Kep. Bangka Belitung	25	16	19
Kepulauan Riau	15	19	13
DKI Jakarta	4	25	9
Jawa Barat	208	175	206
Jawa Tengah	187	148	159
DI Yogyakarta	22	11	15
Jawa Timur	257	215	210
Banten	30	39	52
Bali	12	9	9
Nusa Tenggara Barat	39	39	54
Nusa Tenggara Timur	113	104	111
Kalimantan Barat	48	63	65
Kalimantan Tengah	29	32	30
Kalimantan Selatan	25	25	44
Kalimantan Timur	40	23	45
Kalimantan Utara*	-	9	14
Sulawesi Utara	73	54	95
Sulawesi Tengah	47	56	67
Sulawesi Selatan	42	47	90
Sulawesi Tenggara	26	40	51
Gorontalo	29	36	58
Sulawesi Barat	9	5	15
Maluku	37	27	40
Maluku Utara	38	26	35
Papua Barat	19	23	41
Papua	253	226	571
<b>INDONESIA</b>	<b>2 122</b>	<b>2 050</b>	<b>2 851</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 6 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi	Tahun		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (4)
Aceh	63	47	59
Sumatera Utara	93	141	182
Sumatera Barat	55	71	53
Riau	79	101	103
Jambi	57	76	85
Sumatera Selatan	221	430	323
Bengkulu	33	40	52
Lampung	186	255	233
Kep. Bangka Belitung	16	15	8
Kepulauan Riau	13	17	20
DKI Jakarta	35	73	38
Jawa Barat	287	344	342
Jawa Tengah	146	176	155
DI Yogyakarta	28	20	17
Jawa Timur	290	419	295
Banten	54	49	76
Bali	13	23	22
Nusa Tenggara Barat	107	146	76
Nusa Tenggara Timur	54	67	68
Kalimantan Barat	33	37	34
Kalimantan Tengah	41	27	20
Kalimantan Selatan	85	73	48
Kalimantan Timur	25	37	32
Kalimantan Utara*	-	9	8
Sulawesi Utara	27	21	30
Sulawesi Tengah	24	23	24
Sulawesi Selatan	54	47	73
Sulawesi Tenggara	23	16	18
Gorontalo	4	3	9
Sulawesi Barat	7	7	4
Maluku	9	20	12
Maluku Utara	2	7	9
Papua Barat	13	13	34
Papua	153	113	259
<b>INDONESIA</b>	<b>233</b>	<b>2 963</b>	<b>2 821</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 7 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi	Tahun		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (4)
A c e h	1 101	1 744	2 225
Sumatera Utara	1 713	2 116	2 776
Sumatera Barat	420	574	779
Riau	726	942	1 169
Jambi	534	661	915
Sumatera Selatan	1 473	1 939	2 016
Bengkulu	599	635	743
Lampung	1 402	1 621	1 875
Kep. Bangka Belitung	174	203	206
Kepulauan Riau	115	133	159
DKI Jakarta	199	229	184
Jawa Barat	4 157	439	4 394
Jawa Tengah	3 628	4 064	4 068
DI Yogyakarta	275	283	294
Jawa Timur	3 767	4 122	3 919
Banten	978	1 079	1 104
Bali	200	202	254
Nusa Tenggara Barat	641	782	730
Nusa Tenggara Timur	612	724	863
Kalimantan Barat	517	648	808
Kalimantan Tengah	374	409	562
Kalimantan Selatan	820	889	926
Kalimantan Timur	348	354	456
Kalimantan Utara*	-	62	134
Sulawesi Utara	554	676	705
Sulawesi Tengah	407	578	777
Sulawesi Selatan	111	1 206	1 309
Sulawesi Tenggara	361	489	733
Gorontalo	114	179	253
Sulawesi Barat	150	171	195
Maluku	148	225	266
Maluku Utara	176	297	352
Papua Barat	113	149	227
Papua	1 006	964	1 402
<b>INDONESIA</b>	<b>28 912</b>	<b>33 739</b>	<b>37 778</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 8 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi	Tahun		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (4)
A c e h	147	229	356
Sumatera Utara	227	378	512
Sumatera Barat	84	138	204
Riau	123	204	235
Jambi	72	109	180
Sumatera Selatan	150	334	287
Bengkulu	74	77	106
Lampung	216	284	422
Kep. Bangka Belitung	77	62	55
Kepulauan Riau	25	39	45
DKI Jakarta	30	100	62
Jawa Barat	925	1 111	1 187
Jawa Tengah	817	952	986
DI Yogyakarta	112	96	121
Jawa Timur	766	1 001	1 100
Banten	228	227	292
Bali	37	42	54
Nusa Tenggara Barat	134	136	178
Nusa Tenggara Timur	86	163	154
Kalimantan Barat	84	141	153
Kalimantan Tengah	41	95	72
Kalimantan Selatan	126	150	172
Kalimantan Timur	58	84	91
Kalimantan Utara*	-	10	28
Sulawesi Utara	92	89	138
Sulawesi Tengah	95	107	143
Sulawesi Selatan	219	305	458
Sulawesi Tenggara	43	87	157
Gorontalo	31	35	56
Sulawesi Barat	27	27	62
Maluku	41	52	49
Maluku Utara	22	49	52
Papua Barat	26	37	55
Papua	368	294	398
<b>INDONESIA</b>	<b>5 603</b>	<b>7 244</b>	<b>8 620</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 9 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	16	48	32
Sumatera Utara	53	53	61
Sumatera Barat	24	18	27
Riau	17	78	60
Jambi	9	26	28
Sumatera Selatan	22	30	54
Bengkulu	12	15	8
Lampung	9	11	20
Kep. Bangka Belitung	8	6	2
Kepulauan Riau	4	10	13
DKI Jakarta	6	10	3
Jawa Barat	26	54	57
Jawa Tengah	20	39	37
DI Yogyakarta	-	5	5
Jawa Timur	27	68	65
Banten	5	13	6
Bali	2	7	9
Nusa Tenggara Barat	12	14	13
Nusa Tenggara Timur	56	98	100
Kalimantan Barat	14	23	38
Kalimantan Tengah	3	34	34
Kalimantan Selatan	13	18	32
Kalimantan Timur	8	11	12
Kalimantan Utara*	-	10	10
Sulawesi Utara	11	17	11
Sulawesi Tengah	15	21	16
Sulawesi Selatan	20	32	28
Sulawesi Tenggara	2	9	15
Gorontalo	3	5	9
Sulawesi Barat	2	6	5
Maluku	7	9	19
Maluku Utara	5	7	22
Papua Barat	5	8	17
Papua	82	61	182
<b>INDONESIA</b>	<b>518</b>	<b>874</b>	<b>1050</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 10 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	1	2	3
Sumatera Utara	7	11	5
Sumatera Barat	-	-	1
Riau	6	2	6
Jambi	-	-	3
Sumatera Selatan	1	5	6
Bengkulu	1	2	1
Lampung	2	1	6
Kep. Bangka Belitung	2	2	4
Kepulauan Riau	4	2	2
DKI Jakarta	-	2	0
Jawa Barat	33	25	17
Jawa Tengah	12	11	3
DI Yogyakarta	1	-	0
Jawa Timur	16	11	14
Banten	1	2	6
Bali	-	1	0
Nusa Tenggara Barat	2	2	3
Nusa Tenggara Timur	7	14	27
Kalimantan Barat	3	7	0
Kalimantan Tengah	-	3	1
Kalimantan Selatan	1	-	1
Kalimantan Timur	3	-	1
Kalimantan Utara*	-	1	0
Sulawesi Utara	8	6	6
Sulawesi Tengah	-	1	0
Sulawesi Selatan	1	4	2
Sulawesi Tenggara	-	1	0
Gorontalo	-	1	0
Sulawesi Barat	-	-	0
Maluku	1	1	1
Maluku Utara	-	-	0
Papua Barat	-	-	0
Papua	6	2	5
<b>INDONESIA</b>	<b>119</b>	<b>122</b>	<b>124</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 11 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

<b>Provinsi</b>	<b>Tahun</b>		
	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>2018</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
A c e h	465	508	1 212
Sumatera Utara	543	1 033	1 795
Sumatera Barat	172	168	481
Riau	170	315	683
Jambi	67	167	387
Sumatera Selatan	220	409	783
Bengkulu	39	74	115
Lampung	124	186	466
Kep. Bangka Belitung	40	58	112
Kepulauan Riau	24	27	63
DKI Jakarta	74	126	92
Jawa Barat	507	558	952
Jawa Tengah	246	263	495
DI Yogyakarta	59	37	73
Jawa Timur	545	639	1 480
Banten	126	155	259
Bali	19	34	65
Nusa Tenggara Barat	50	93	216
Nusa Tenggara Timur	13	18	9
Kalimantan Barat	60	61	241
Kalimantan Tengah	38	81	229
Kalimantan Selatan	191	312	675
Kalimantan Timur	88	148	301
Kalimantan Utara*	-	32	94
Sulawesi Utara	9	25	56
Sulawesi Tengah	54	144	316
Sulawesi Selatan	84	128	506
Sulawesi Tenggara	8	25	84
Gorontalo	11	21	43
Sulawesi Barat	8	20	60
Maluku	16	15	28
Maluku Utara	12	21	28
Papua Barat	2	8	34
Papua	19	22	146
<b>INDONESIA</b>	<b>4 103</b>	<b>5 931</b>	<b>12 579</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 12 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	242	401	598
Sumatera Utara	1 423	1 665	1 947
Sumatera Barat	239	267	458
Riau	236	329	510
Jambi	122	157	297
Sumatera Selatan	325	683	662
Bengkulu	52	67	107
Lampung	229	393	546
Kep. Bangka Belitung	57	71	60
Kepulauan Riau	21	31	48
DKI Jakarta	34	83	35
Jawa Barat	498	692	776
Jawa Tengah	644	770	1 153
DI Yogyakarta	70	59	74
Jawa Timur	1 227	1 502	1 295
Banten	169	180	231
Bali	154	81	67
Nusa Tenggara Barat	135	198	205
Nusa Tenggara Timur	176	293	389
Kalimantan Barat	210	303	416
Kalimantan Tengah	114	250	217
Kalimantan Selatan	209	283	230
Kalimantan Timur	112	129	145
Kalimantan Utara*	-	39	44
Sulawesi Utara	171	377	300
Sulawesi Tengah	240	337	297
Sulawesi Selatan	260	377	458
Sulawesi Tenggara	109	126	235
Gorontalo	60	116	115
Sulawesi Barat	36	95	60
Maluku	105	165	125
Maluku Utara	70	147	93
Papua Barat	32	57	61
Papua	203	356	588
<b>INDONESIA</b>	<b>7 984</b>	<b>11 079</b>	<b>12 842</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 13 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
Aceh	0,46	0,40	0,51
Sumatera Utara	2,04	2,13	1,99
Sumatera Barat	2,81	3,41	3,37
Riau	3,44	3,05	3,84
Jambi	1,90	1,93	2,11
Sumatera Selatan	3,08	4,32	3,49
Bengkulu	1,59	1,76	1,39
Lampung	2,39	1,90	2,49
Kep. Bangka Belitung	5,26	3,67	2,05
Kepulauan Riau	3,97	3,37	1,20
DKI Jakarta	6,37	10,86	5,24
Jawa Barat	2,10	2,38	2,18
Jawa Tengah	1,20	1,00	1,09
DI Yogyakarta	1,60	3,65	2,97
Jawa Timur	1,62	1,92	1,77
Banten	2,02	2,06	2,45
Bali	1,54	2,37	1,26
Nusa Tenggara Barat	2,95	3,24	3,24
Nusa Tenggara Timur	3,14	2,45	2,45
Kalimantan Barat	1,98	1,94	1,36
Kalimantan Tengah	1,77	3,25	2,60
Kalimantan Selatan	2,85	3,19	2,89
Kalimantan Timur	2,18	3,02	3,08
Kalimantan Utara*	-	1,67	0,83
Sulawesi Utara	2,78	3,32	3,10
Sulawesi Tengah	1,87	2,06	2,03
Sulawesi Selatan	2,92	3,27	3,12
Sulawesi Tenggara	1,46	1,14	1,66
Gorontalo	2,19	2,31	3,41
Sulawesi Barat	2,04	1,23	1,23
Maluku	2,44	1,56	1,21
Maluku Utara	1,02	1,09	1,76
Papua Barat	1,25	1,40	1,36
Papua	3,01	2,30	4,03
<b>INDONESIA</b>	<b>2,02</b>	<b>2,12</b>	<b>2,14</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 14 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	1,50	1,52	2,17
Sumatera Utara	4,61	4,33	4,81
Sumatera Barat	7,65	9,34	8,78
Riau	3,50	4,03	7,41
Jambi	3,57	3,22	5,19
Sumatera Selatan	5,30	5,19	5,30
Bengkulu	3,91	3,00	3,76
Lampung	4,71	4,18	5,92
Kep. Bangka Belitung	14,96	13,12	12,02
Kepulauan Riau	4,53	4,82	7,21
DKI Jakarta	8,24	24,72	11,24
Jawa Barat	7,65	7,13	10,04
Jawa Tengah	3,74	3,19	3,83
DI Yogyakarta	13,01	12,33	13,93
Jawa Timur	5,16	5,05	6,11
Banten	6,51	5,42	7,93
Bali	6,56	7,54	8,94
Nusa Tenggara Barat	12,08	9,38	11,72
Nusa Tenggara Timur	8,06	5,08	6,23
Kalimantan Barat	2,85	4,03	3,65
Kalimantan Tengah	3,86	4,33	4,19
Kalimantan Selatan	4,75	5,48	5,23
Kalimantan Timur	3,55	5,07	6,84
Kalimantan Utara*	-	2,30	3,73
Sulawesi Utara	11,87	8,77	9,85
Sulawesi Tengah	5,51	5,14	6,83
Sulawesi Selatan	8,75	8,61	8,63
Sulawesi Tenggara	5,56	6,95	5,95
Gorontalo	9,99	8,70	14,31
Sulawesi Barat	3,45	2,62	3,38
Maluku	6,25	4,60	4,84
Maluku Utara	2,41	4,01	3,85
Papua Barat	2,85	1,34	3,12
Papua	5,89	3,94	7,91
<b>INDONESIA</b>	<b>5,31</b>	<b>4,92</b>	<b>6,07</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 15 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi	Tahun		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (4)
A c e h	0,88	1,40	1,43
Sumatera Utara	2,26	1,88	2,90
Sumatera Barat	5,81	5,76	8,31
Riau	2,66	3,22	5,07
Jambi	1,97	2,26	3,46
Sumatera Selatan	2,07	2,41	2,21
Bengkulu	3,11	3,72	2,58
Lampung	2,56	2,17	3,62
Kep. Bangka Belitung	6,93	4,20	4,86
Kepulauan Riau	4,25	4,58	3,13
DKI Jakarta	1,50	9,36	3,37
Jawa Barat	3,52	2,94	3,46
Jawa Tengah	2,18	1,73	1,86
DI Yogyakarta	5,02	2,51	3,42
Jawa Timur	3,02	2,53	2,47
Banten	1,95	2,51	3,35
Bali	1,68	1,26	1,26
Nusa Tenggara Barat	3,60	3,42	4,72
Nusa Tenggara Timur	3,81	3,18	3,31
Kalimantan Barat	2,44	2,99	3,04
Kalimantan Tengah	1,90	2,04	1,90
Kalimantan Selatan	1,25	1,25	2,19
Kalimantan Timur	2,73	2,24	4,34
Kalimantan Utara*	-	1,88	2,90
Sulawesi Utara	4,31	2,94	5,17
Sulawesi Tengah	2,59	2,82	3,32
Sulawesi Selatan	1,41	1,55	2,95
Sulawesi Tenggara	1,23	1,76	2,17
Gorontalo	3,97	4,89	7,90
Sulawesi Barat	1,41	0,77	2,31
Maluku	3,61	2,48	3,23
Maluku Utara	3,52	2,17	2,93
Papua Barat	1,32	1,47	2,06
Papua	6,45	4,64	10,28
<b>INDONESIA</b>	<b>2,70</b>	<b>2,49</b>	<b>3,40</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 16 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	0,97	0,72	0,91
Sumatera Utara	1,60	2,31	2,97
Sumatera Barat	5,32	6,20	4,16
Riau	4,77	5,50	5,49
Jambi	4,15	4,90	5,44
Sumatera Selatan	6,94	13,28	9,90
Bengkulu	2,19	2,61	3,43
Lampung	7,55	9,69	8,78
Kep. Bangka Belitung	4,43	3,94	2,05
Kepulauan Riau	3,68	4,10	4,81
DKI Jakarta	13,11	27,34	14,23
Jawa Barat	4,86	5,77	5,74
Jawa Tengah	1,70	2,05	1,81
DI Yogyakarta	6,39	4,57	3,88
Jawa Timur	3,41	4,93	3,47
Banten	3,52	3,16	4,90
Bali	1,82	3,21	3,07
Nusa Tenggara Barat	9,87	12,80	6,65
Nusa Tenggara Timur	1,82	2,05	2,03
Kalimantan Barat	1,68	1,75	1,59
Kalimantan Tengah	2,68	1,72	1,27
Kalimantan Selatan	4,25	3,64	2,39
Kalimantan Timur	1,71	3,61	3,08
Kalimantan Utara*	-	1,88	1,66
Sulawesi Utara	1,59	1,14	1,63
Sulawesi Tengah	1,32	1,16	1,19
Sulawesi Selatan	1,81	1,55	2,39
Sulawesi Tenggara	1,08	0,70	0,76
Gorontalo	0,55	0,41	1,23
Sulawesi Barat	1,10	1,08	0,62
Maluku	0,88	1,84	0,97
Maluku Utara	0,19	0,59	0,75
Papua Barat	0,90	0,83	1,71
Papua	3,90	2,32	4,66
<b>INDONESIA</b>	<b>2,96</b>	<b>3,61</b>	<b>3,36</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 17 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	16,98	26,78	34,19
Sumatera Utara	29,55	34,67	45,27
Sumatera Barat	40,66	50,13	61,10
Riau	43,87	51,34	62,35
Jambi	38,92	42,62	58,58
Sumatera Selatan	46,23	59,90	61,80
Bengkulu	39,70	41,45	49,08
Lampung	56,90	61,59	70,65
Kep. Bangka Belitung	48,20	53,28	52,69
Kepulauan Riau	32,58	32,05	38,22
DKI Jakarta	74,53	85,77	68,91
Jawa Barat	70,40	73,63	73,76
Jawa Tengah	42,30	47,38	47,53
DI Yogyakarta	62,79	64,61	67,12
Jawa Timur	44,31	48,48	46,13
Banten	63,71	69,57	71,13
Bali	27,93	28,21	35,47
Nusa Tenggara Barat	59,13	68,54	63,87
Nusa Tenggara Timur	20,63	22,14	25,74
Kalimantan Barat	26,28	30,73	37,81
Kalimantan Tengah	24,48	26,07	35,66
Kalimantan Selatan	41,00	44,27	46,12
Kalimantan Timur	23,75	34,50	43,93
Kalimantan Utara*	-	12,94	27,80
Sulawesi Utara	32,72	36,82	38,36
Sulawesi Tengah	22,42	29,10	38,47
Sulawesi Selatan	37,22	39,80	42,93
Sulawesi Tenggara	17,02	21,52	31,14
Gorontalo	15,60	24,32	34,47
Sulawesi Barat	23,51	26,39	30,00
Maluku	14,45	20,68	21,45
Maluku Utara	16,31	24,83	29,43
Papua Barat	7,85	9,51	11,42
Papua	25,64	19,79	25,25
<b>INDONESIA</b>	<b>36,78</b>	<b>41,05</b>	<b>45,01</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 18 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/ Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	2,27	3,52	5,47
Sumatera Utara	3,92	6,19	8,35
Sumatera Barat	8,13	12,05	16,00
Riau	7,43	11,12	12,53
Jambi	5,25	7,03	11,52
Sumatera Selatan	4,71	10,32	8,80
Bengkulu	4,90	5,03	7,00
Lampung	8,77	10,79	15,90
Kep. Bangka Belitung	21,33	16,27	14,07
Kepulauan Riau	7,08	9,40	10,82
DKI Jakarta	11,24	37,45	23,22
Jawa Barat	15,66	18,63	19,93
Jawa Tengah	9,53	11,10	11,52
DI Yogyakarta	25,57	21,92	27,63
Jawa Timur	9,01	11,77	12,95
Banten	14,85	14,64	18,81
Bali	5,17	5,87	7,54
Nusa Tenggara Barat	12,36	11,92	15,57
Nusa Tenggara Timur	2,90	4,98	4,59
Kalimantan Barat	4,27	6,69	7,16
Kalimantan Tengah	2,68	6,05	4,57
Kalimantan Selatan	6,30	7,47	8,57
Kalimantan Timur	3,96	8,19	8,77
Kalimantan Utara*	-	2,09	5,81
Sulawesi Utara	5,43	4,85	7,51
Sulawesi Tengah	5,23	5,39	7,08
Sulawesi Selatan	7,34	10,07	15,02
Sulawesi Tenggara	2,03	3,83	6,67
Gorontalo	4,24	4,76	7,63
Sulawesi Barat	4,23	4,17	9,54
Maluku	4,00	4,78	3,95
Maluku Utara	2,04	4,10	4,35
Papua Barat	1,81	2,36	2,77
Papua	9,38	6,04	7,17
<b>INDONESIA</b>	<b>7,13</b>	<b>8,81</b>	<b>10,27</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 19 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi	Tahun		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (4)
A c e h	0,25	0,74	0,49
Sumatera Utara	0,91	0,87	0,99
Sumatera Barat	2,32	1,57	2,12
Riau	1,03	4,25	3,20
Jambi	0,66	1,68	1,79
Sumatera Selatan	0,69	0,93	1,66
Bengkulu	0,80	0,98	0,53
Lampung	0,37	0,42	0,75
Kep. Bangka Belitung	2,22	1,57	0,51
Kepulauan Riau	1,13	2,41	3,13
DKI Jakarta	2,25	3,75	1,12
Jawa Barat	0,44	0,91	0,96
Jawa Tengah	0,23	0,45	0,43
DI Yogyakarta	-	1,14	1,14
Jawa Timur	0,32	0,80	0,77
Banten	0,33	0,84	0,39
Bali	0,28	0,98	1,26
Nusa Tenggara Barat	1,11	1,23	1,14
Nusa Tenggara Timur	1,89	3,00	2,98
Kalimantan Barat	0,71	1,09	1,78
Kalimantan Tengah	0,20	2,17	2,16
Kalimantan Selatan	0,65	0,90	1,59
Kalimantan Timur	0,55	1,07	1,16
Kalimantan Utara*	-	2,09	2,07
Sulawesi Utara	0,65	0,93	0,60
Sulawesi Tengah	0,83	1,06	0,79
Sulawesi Selatan	0,67	1,06	0,92
Sulawesi Tenggara	0,09	0,40	0,64
Gorontalo	0,41	0,68	1,23
Sulawesi Barat	0,31	0,93	0,77
Maluku	0,68	0,83	1,53
Maluku Utara	0,46	0,59	1,84
Papua Barat	0,35	0,51	0,86
Papua	2,09	1,25	3,28
<b>INDONESIA</b>	<b>0,66</b>	<b>1,06</b>	<b>1,25</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 20 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	0,02	0,03	0,05
Sumatera Utara	0,12	0,18	0,08
Sumatera Barat	-	-	0,08
Riau	0,36	0,11	0,32
Jambi	-	-	0,19
Sumatera Selatan	0,03	0,15	0,18
Bengkulu	0,07	0,13	0,07
Lampung	0,08	0,04	0,23
Kep. Bangka Belitung	0,55	0,52	1,02
Kepulauan Riau	1,13	0,48	0,48
DKI Jakarta	-	0,75	0,00
Jawa Barat	0,56	0,42	0,29
Jawa Tengah	0,14	0,13	0,04
DI Yogyakarta	0,23	-	0,00
Jawa Timur	0,19	0,13	0,16
Banten	0,07	0,13	0,39
Bali	-	0,14	0,00
Nusa Tenggara Barat	0,18	0,18	0,26
Nusa Tenggara Timur	0,24	0,43	0,81
Kalimantan Barat	0,15	0,33	0,00
Kalimantan Tengah	-	0,19	0,06
Kalimantan Selatan	0,05	-	0,05
Kalimantan Timur	0,20	-	0,10
Kalimantan Utara*	-	0,21	0,00
Sulawesi Utara	0,47	0,33	0,33
Sulawesi Tengah	-	0,05	0,00
Sulawesi Selatan	0,03	0,13	0,07
Sulawesi Tenggara	-	0,04	0,00
Gorontalo	-	0,14	0,00
Sulawesi Barat	-	-	0,00
Maluku	0,10	0,09	0,08
Maluku Utara	-	-	0,00
Papua Barat	-	-	0,00
Papua	0,15	0,04	0,09
<b>INDONESIA</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 21 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

<b>Provinsi</b>	<b>Tahun</b>		
	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>2018</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	7,17	7,80	18,62
Sumatera Utara	9,37	16,92	29,27
Sumatera Barat	16,65	14,67	37,73
Riau	10,27	17,17	36,43
Jambi	4,88	10,77	24,78
Sumatera Selatan	6,91	12,64	24,00
Bengkulu	2,58	4,83	7,60
Lampung	5,03	7,07	17,56
Kep. Bangka Belitung	11,08	15,22	28,64
Kepulauan Riau	6,80	6,51	15,14
DKI Jakarta	27,72	47,19	34,46
Jawa Barat	8,59	9,36	15,98
Jawa Tengah	2,87	3,07	5,78
DI Yogyakarta	13,47	8,45	16,67
Jawa Timur	6,41	7,52	17,42
Banten	8,21	9,99	16,69
Bali	2,65	4,75	9,08
Nusa Tenggara Barat	4,61	8,15	18,90
Nusa Tenggara Timur	0,44	0,55	0,27
Kalimantan Barat	3,05	2,89	11,28
Kalimantan Tengah	2,49	5,16	14,53
Kalimantan Selatan	9,55	15,54	33,62
Kalimantan Timur	6,01	14,42	29,00
Kalimantan Utara*	-	6,68	19,50
Sulawesi Utara	0,53	1,36	3,05
Sulawesi Tengah	2,98	7,25	15,64
Sulawesi Selatan	2,82	4,22	16,60
Sulawesi Tenggara	0,38	1,10	3,57
Gorontalo	1,50	2,85	5,86
Sulawesi Barat	1,25	3,09	9,23
Maluku	1,56	1,38	2,26
Maluku Utara	1,11	1,76	2,34
Papua Barat	0,14	0,51	1,71
Papua	0,48	0,45	2,63
<b>INDONESIA</b>	<b>5,22</b>	<b>7,22</b>	<b>14,99</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.2. 22 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	3,73	6,16	9,19
Sumatera Utara	24,55	27,28	31,75
Sumatera Barat	23,14	23,32	35,92
Riau	14,26	17,93	27,20
Jambi	8,89	10,12	19,01
Sumatera Selatan	10,20	21,10	20,29
Bengkulu	3,45	4,37	7,07
Lampung	9,29	14,93	20,57
Kep. Bangka Belitung	15,79	18,64	15,35
Kepulauan Riau	5,95	7,47	11,54
DKI Jakarta	12,73	31,09	13,11
Jawa Barat	8,43	11,61	13,03
Jawa Tengah	7,51	8,98	13,47
DI Yogyakarta	15,98	13,47	16,89
Jawa Timur	14,43	17,67	15,24
Banten	11,01	11,61	14,88
Bali	21,51	11,31	9,36
Nusa Tenggara Barat	12,45	17,35	17,94
Nusa Tenggara Timur	5,93	8,96	11,60
Kalimantan Barat	10,68	14,37	19,47
Kalimantan Tengah	7,46	15,93	13,77
Kalimantan Selatan	10,45	14,09	11,45
Kalimantan Timur	7,65	12,57	13,97
Kalimantan Utara	-	8,14	9,13
Sulawesi Utara	10,10	20,53	16,32
Sulawesi Tengah	13,22	16,97	14,70
Sulawesi Selatan	8,72	12,44	15,02
Sulawesi Tenggara	5,14	5,55	9,98
Gorontalo	8,21	15,76	15,67
Sulawesi Barat	5,64	14,66	9,23
Maluku	10,25	15,17	10,08
Maluku Utara	6,49	12,29	7,78
Papua Barat	2,22	3,64	3,07
Papua	5,17	7,31	10,59
<b>INDONESIA</b>	<b>10,16</b>	<b>13,48</b>	<b>15,30</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012



**DATA POTENSI DESA  
(KONFLIK MASSAL)**

**Tabel 2.3. 1 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

<b>Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal</b>	<b>2011</b>		<b>2014</b>		<b>2018</b>	
	<b>N</b> <b>(1)</b>	<b>%</b> <b>(2)</b>	<b>N</b> <b>(4)</b>	<b>%</b> <b>(5)</b>	<b>N</b> <b>(6)</b>	<b>%</b> <b>(7)</b>
<b>A. Keberadaan Kejadian Perkelahian Massal</b>						
1. Ada kejadian	2 562	3,26	2 779	3,38	3 147	3,75
2. Tidak ada kejadian	76 047	96,74	79 411	96,47	80 784	96,25
Total desa/kelurahan	78 609	100,00	82 190	100,00	83 931	100,00
<b>B. Jenis Perkelahian Massal</b>						
1. Antar Kelompok Warga	1 348	1,71	1 404	1,71	1 674	1,99
2. Warga Antar Desa/ Kelurahan	1 054	1,34	1 128	1,37	1 078	1,28
3. Warga dengan Aparat Keamanan	120	0,15	108	0,13	91	0,11
4. Warga dengan Aparat Pemerintah	102	0,13	99	0,12	132	0,16
5. Antar Pelajar/Mahasiswa	210	0,27	327	0,40	548	0,65
6. Antar Suku	102	0,13	70	0,09	112	0,13
7. Lainnya	149	0,19	160	0,19	171	0,20
<b>C. Penyelesaian Perkelahian Massal</b>						
1. Diselesaikan secara damai	2 314	90,32	2 564	92,26	2 961	94,09
2. Tidak dapat diselesaikan	248	9,68	215	7,74	186	5,91
Total desa/kelurahan yang ada kejadian perkelahian massal	2 562	100,00	2 779	100,00	3 147	100,00

Sumber: Diolah dari Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

**Tabel 2.3. 2 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi	2011		2014		2018	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	69	1,06	61	0,94	90	1,38
Sumatera Utara	119	2,05	118	1,93	176	2,87
Sumatera Barat	50	4,84	45	3,93	80	6,27
Riau	47	2,84	38	2,07	51	2,72
Jambi	47	3,43	40	2,58	41	2,62
Sumatera Selatan	51	1,60	67	2,07	37	1,13
Bengkulu	24	1,59	27	1,76	28	1,85
Lampung	40	1,62	34	1,29	44	1,66
Kep. Bangka Belitung	28	7,76	24	6,30	3	0,77
Kepulauan Riau	7	1,98	3	0,72	4	0,96
DKI Jakarta	61	22,85	72	26,97	55	20,60
Jawa Barat	195	3,30	259	4,34	291	4,89
Jawa Tengah	194	2,26	252	2,94	233	2,72
DI Yogyakarta	13	2,97	12	2,74	14	3,20
Jawa Timur	162	1,91	132	1,55	185	2,18
Banten	80	5,21	40	2,58	58	3,74
Bali	12	1,68	6	0,84	5	0,70
Nusa Tenggara Barat	68	6,27	76	6,66	81	7,09
Nusa Tenggara Timur	183	6,17	174	5,32	205	6,11
Kalimantan Barat	27	1,37	39	1,85	30	1,40
Kalimantan Tengah	25	1,64	36	2,29	13	0,83
Kalimantan Selatan	13	0,65	26	1,29	21	1,05
Kalimantan Timur	43	2,94	20	1,95	17	1,64
Kalimantan Utara *)	-	-	6	1,25	5	1,04
Sulawesi Utara	101	5,97	165	8,99	111	6,04
Sulawesi Tengah	65	3,58	149	7,50	98	4,85
Sulawesi Selatan	113	3,79	145	4,79	130	4,26
Sulawesi Tenggara	54	2,55	73	3,21	84	3,57
Gorontalo	21	2,87	24	3,26	18	2,45
Sulawesi Barat	9	1,41	14	2,16	15	2,31
Maluku	146	14,26	160	14,71	199	16,05
Maluku Utara	110	10,19	186	15,55	164	13,71
Papua Barat	79	5,49	59	3,77	114	5,74
Papua	306	7,80	197	4,04	447	8,05
<b>INDONESIA</b>	<b>2 562</b>	<b>3,26</b>	<b>2 779</b>	<b>3,38</b>	<b>3 147</b>	<b>3,75</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 2.3. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011**

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	34	29	4	2
Sumatera Utara	69	39	10	3
Sumatera Barat	21	24	-	1
Riau	23	15	5	4
Jambi	14	29	3	1
Sumatera Selatan	25	25	5	7
Bengkulu	9	11	4	1
Lampung	12	19	5	1
Kep. Bangka Belitung	11	14	2	-
Kepulauan Riau	2	3	1	2
DKI Jakarta	27	16	2	1
Jawa Barat	102	56	5	6
Jawa Tengah	97	99	2	3
DI Yogyakarta	4	-	-	-
Jawa Timur	88	66	4	4
Banten	42	21	2	-
Bali	9	3	-	-
Nusa Tenggara Barat	40	31	2	4
Nusa Tenggara Timur	79	93	7	3
Kalimantan Barat	13	6	3	1
Kalimantan Tengah	18	4	-	-
Kalimantan Selatan	1	8	-	1
Kalimantan Timur	22	11	1	4
Sulawesi Utara	47	65	3	2
Sulawesi Tengah	22	40	6	1
Sulawesi Selatan	53	58	4	3
Sulawesi Tenggara	25	25	1	2
Gorontalo	7	5	4	3
Sulawesi Barat	6	-	1	1
Maluku	94	55	5	10
Maluku Utara	52	64	5	7
Papua Barat	56	27	3	5
Papua	224	93	21	19
<b>INDONESIA</b>	<b>1 348</b>	<b>1 054</b>	<b>120</b>	<b>102</b>

Sumber: Diolah dari Podes 2011

**Lanjutan Tabel 2.3.3**

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	4	1	3
Sumatera Utara	4	2	13
Sumatera Barat	9	-	2
Riau	1	3	3
Jambi	6	2	2
Sumatera Selatan	5	2	3
Bengkulu	4	1	1
Lampung	2	1	1
Kep. Bangka Belitung	1	-	1
Kepulauan Riau	-	-	1
DKI Jakarta	23	-	5
Jawa Barat	44	3	22
Jawa Tengah	4	1	8
DI Yogyakarta	8	1	-
Jawa Timur	8	-	10
Banten	12	1	13
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	2	3	4
Nusa Tenggara Timur	10	6	11
Kalimantan Barat	1	3	6
Kalimantan Tengah	-	-	3
Kalimantan Selatan	-	1	2
Kalimantan Timur	2	3	4
Sulawesi Utara	2	-	-
Sulawesi Tengah	3	2	2
Sulawesi Selatan	16	3	3
Sulawesi Tenggara	1	1	2
Gorontalo	2	1	6
Sulawesi Barat	1	-	3
Maluku	11	2	-
Maluku Utara	4	1	4
Papua Barat	2	1	2
Papua	18	57	9
<b>INDONESIA</b>	<b>210</b>	<b>102</b>	<b>149</b>

Sumber: Diolah dari Podes 2011

**Tabel 2.3. 4 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2014**

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	26	24	1	2
Sumatera Utara	58	43	10	7
Sumatera Barat	29	10	5	-
Riau	14	13	3	1
Jambi	8	22	-	1
Sumatera Selatan	34	23	9	4
Bengkulu	7	8	-	-
Lampung	11	20	1	1
Kep. Bangka Belitung	12	11	-	1
Kepulauan Riau	2	-	-	-
DKI Jakarta	34	7	-	-
Jawa Barat	103	91	4	4
Jawa Tengah	120	120	4	5
DI Yogyakarta	5	4	-	-
Jawa Timur	62	51	3	2
Banten	14	12	1	-
Bali	3	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	33	42	4	2
Nusa Tenggara Timur	90	64	1	12
Kalimantan Barat	29	8	3	-
Kalimantan Tengah	27	1	1	-
Kalimantan Selatan	9	11	-	1
Kalimantan Timur	12	1	1	2
Kalimantan Utara	3	3	-	-
Sulawesi Utara	83	99	8	4
Sulawesi Tengah	54	102	2	1
Sulawesi Selatan	71	68	5	-
Sulawesi Tenggara	34	44	5	3
Gorontalo	14	7	2	4
Sulawesi Barat	6	8	-	-
Maluku	99	68	5	7
Maluku Utara	125	76	5	5
Papua Barat	36	23	6	2
Papua	137	44	19	28
<b>INDONESIA</b>	<b>1 404</b>	<b>1 128</b>	<b>108</b>	<b>99</b>

Sumber: Diolah dari Podes 2014

**Lanjutan Tabel 2.3.4**

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	7	2	4
Sumatera Utara	8	2	11
Sumatera Barat	7	1	2
Riau	1	2	8
Jambi	10	1	2
Sumatera Selatan	7	-	4
Bengkulu	11	1	2
Lampung	1	2	3
Kep. Bangka Belitung	2	1	1
Kepulauan Riau	1	1	-
DKI Jakarta	47	-	2
Jawa Barat	89	3	19
Jawa Tengah	11	-	10
DI Yogyakarta	2	1	5
Jawa Timur	12	-	9
Banten	12	-	2
Bali	-	-	3
Nusa Tenggara Barat	9	3	3
Nusa Tenggara Timur	10	6	8
Kalimantan Barat	4	-	2
Kalimantan Tengah	6	-	4
Kalimantan Selatan	2	-	4
Kalimantan Timur	6	-	2
Kalimantan Utara	-	-	1
Sulawesi Utara	10	1	4
Sulawesi Tengah	3	2	8
Sulawesi Selatan	18	1	5
Sulawesi Tenggara	3	-	1
Gorontalo	3	-	1
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	8	2	1
Maluku Utara	7	2	13
Papua Barat	1	4	3
Papua	9	32	13
<b>INDONESIA</b>	<b>327</b>	<b>70</b>	<b>160</b>

Sumber: Diolah dari Podes 2014

**Tabel 2.3. 5 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2018**

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	43	39	4	8
Sumatera Utara	95	64	3	9
Sumatera Barat	27	14	1	-
Riau	17	18	3	3
Jambi	7	22	-	2
Sumatera Selatan	16	11	2	-
Bengkulu	8	8	-	1
Lampung	21	16	1	1
Kep. Bangka Belitung	1	-	-	-
Kepulauan Riau	1	1	1	-
DKI Jakarta	32	18	-	-
Jawa Barat	122	60	4	8
Jawa Tengah	107	99	1	2
DI Yogyakarta	5	1	-	-
Jawa Timur	82	58	7	3
Banten	25	20	1	2
Bali	5	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	36	48	3	2
Nusa Tenggara Timur	123	78	3	4
Kalimantan Barat	16	9	-	1
Kalimantan Tengah	8	4	-	-
Kalimantan Selatan	9	12	3	2
Kalimantan Timur	7	3	-	-
Kalimantan Utara	2	1	-	-
Sulawesi Utara	65	50	4	6
Sulawesi Tengah	46	50	-	-
Sulawesi Selatan	71	39	2	1
Sulawesi Tenggara	34	46	1	-
Gorontalo	4	11	1	1
Sulawesi Barat	13	2	1	-
Maluku	117	80	10	13
Maluku Utara	71	85	6	11
Papua Barat	85	28	8	8
Papua	353	83	21	44
<b>INDONESIA</b>	<b>1 674</b>	<b>1 078</b>	<b>91</b>	<b>132</b>

Sumber: Diolah dari Podes 2018

**Lanjutan Tabel 2.3.5**

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	10	2	6
Sumatera Utara	25	-	12
Sumatera Barat	41	1	5
Riau	18	-	2
Jambi	11	1	4
Sumatera Selatan	9	-	4
Bengkulu	10	-	2
Lampung	6	-	4
Kep. Bangka Belitung	1	1	-
Kepulauan Riau	1	-	-
DKI Jakarta	18	-	-
Jawa Barat	118	5	21
Jawa Tengah	36	-	15
DI Yogyakarta	5	1	2
Jawa Timur	18	3	28
Banten	14	1	4
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	12	-	-
Nusa Tenggara Timur	37	5	10
Kalimantan Barat	3	-	3
Kalimantan Tengah	1	-	-
Kalimantan Selatan	1	-	1
Kalimantan Timur	6	-	2
Kalimantan Utara	-	-	2
Sulawesi Utara	9	-	5
Sulawesi Tengah	13	-	2
Sulawesi Selatan	33	2	4
Sulawesi Tenggara	15	-	4
Gorontalo	3	-	-
Sulawesi Barat	2	-	-
Maluku	29	1	3
Maluku Utara	26	1	2
Papua Barat	8	12	4
Papua	9	76	20
<b>INDONESIA</b>	<b>548</b>	<b>112</b>	<b>171</b>

Sumber: Diolah dari Podes 2018

**Tabel 2.3. 6 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011**

<b>Provinsi</b>	<b>Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi</b>			
	<b>Antar Kelompok Warga</b>	<b>Warga Antar Desa</b>	<b>Warga dengan Aparat Keamanan</b>	<b>Warga dengan Aparat Pemerintah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,52	0,45	0,06	0,03
Sumatera Utara	1,19	0,67	0,17	0,05
Sumatera Barat	2,03	2,32	-	0,10
Riau	1,39	0,91	0,30	0,24
Jambi	1,02	2,11	0,22	0,07
Sumatera Selatan	0,78	0,78	0,16	0,22
Bengkulu	0,60	0,73	0,27	0,07
Lampung	0,49	0,77	0,20	0,04
Kep. Bangka Belitung	3,05	3,88	0,55	-
Kepulauan Riau	0,57	0,85	0,28	0,57
DKI Jakarta	10,11	5,99	0,75	0,37
Jawa Barat	1,73	0,95	0,08	0,10
Jawa Tengah	1,13	1,15	0,02	0,03
DI Yogyakarta	0,91	-	-	-
Jawa Timur	1,04	0,78	0,05	0,05
Banten	2,74	1,37	0,13	-
Bali	1,26	0,42	-	-
Nusa Tenggara Barat	3,69	2,86	0,18	0,37
Nusa Tenggara Timur	2,66	3,14	0,24	0,10
Kalimantan Barat	0,66	0,31	0,15	0,05
Kalimantan Tengah	1,18	0,26	-	-
Kalimantan Selatan	0,05	0,40	-	0,05
Kalimantan Timur	1,50	0,75	0,07	0,27
Sulawesi Utara	2,78	3,84	0,18	0,12
Sulawesi Tengah	1,21	2,20	0,33	0,06
Sulawesi Selatan	1,78	1,95	0,13	0,10
Sulawesi Tenggara	1,18	1,18	0,05	0,09
Gorontalo	0,96	0,68	0,55	0,41
Sulawesi Barat	0,94	-	0,16	0,16
Maluku	9,18	5,37	0,49	0,98
Maluku Utara	4,82	5,93	0,46	0,65
Papua Barat	3,89	1,88	0,21	0,35
Papua	5,71	2,37	0,54	0,48
<b>INDONESIA</b>	<b>1,71</b>	<b>1,34</b>	<b>0,15</b>	<b>0,13</b>

Sumber: Diolah dari Podes 2011

**Lanjutan Tabel 2.3.6**

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,06	0,02	0,05
Sumatera Utara	0,07	0,03	0,22
Sumatera Barat	0,87	-	0,19
Riau	0,06	0,18	0,18
Jambi	0,44	0,15	0,15
Sumatera Selatan	0,16	0,06	0,09
Bengkulu	0,27	0,07	0,07
Lampung	0,08	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	0,28	-	0,28
Kepulauan Riau	-	-	0,28
DKI Jakarta	8,61	-	1,87
Jawa Barat	0,75	0,05	0,37
Jawa Tengah	0,05	0,01	0,09
DI Yogyakarta	1,83	0,23	-
Jawa Timur	0,09	-	0,12
Banten	0,78	0,07	0,85
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	0,18	0,28	0,37
Nusa Tenggara Timur	0,34	0,20	0,37
Kalimantan Barat	0,05	0,15	0,31
Kalimantan Tengah	-	-	0,20
Kalimantan Selatan	-	0,05	0,10
Kalimantan Timur	0,14	0,20	0,27
Sulawesi Utara	0,12	-	-
Sulawesi Tengah	0,17	0,11	0,11
Sulawesi Selatan	0,54	0,10	0,10
Sulawesi Tenggara	0,05	0,05	0,09
Gorontalo	0,27	0,14	0,82
Sulawesi Barat	0,16	-	0,47
Maluku	1,07	0,20	-
Maluku Utara	0,37	0,09	0,37
Papua Barat	0,14	0,07	0,14
Papua	0,46	1,45	0,23
<b>INDONESIA</b>	<b>0,27</b>	<b>0,13</b>	<b>0,19</b>

Sumber: Diolah dari Podes 2011

**Tabel 2.3. 7 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2014**

<b>Provinsi</b>	<b>Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi</b>			
	<b>Antar Kelompok Warga</b>	<b>Warga Antar Desa</b>	<b>Warga dengan Aparat Keamanan</b>	<b>Warga dengan Aparat Pemerintah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,40	0,37	0,02	0,03
Sumatera Utara	0,95	0,70	0,16	0,11
Sumatera Barat	2,53	0,87	0,44	-
Riau	0,76	0,71	0,16	0,05
Jambi	0,52	1,42	-	0,06
Sumatera Selatan	1,05	0,71	0,28	0,12
Bengkulu	0,46	0,52	-	-
Lampung	0,42	0,76	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	3,15	2,89	-	0,26
Kepulauan Riau	0,48	-	-	-
DKI Jakarta	12,73	2,62	-	-
Jawa Barat	1,73	1,53	0,07	0,07
Jawa Tengah	1,40	1,40	0,05	0,06
DI Yogyakarta	1,14	0,91	-	-
Jawa Timur	0,73	0,60	0,04	0,02
Banten	0,90	0,77	0,06	-
Bali	0,42	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	2,89	3,68	0,35	0,18
Nusa Tenggara Timur	2,75	1,96	0,03	0,37
Kalimantan Barat	1,38	0,38	0,14	-
Kalimantan Tengah	1,72	0,06	0,06	-
Kalimantan Selatan	0,45	0,55	-	0,05
Kalimantan Timur	1,17	0,10	0,10	0,19
Kalimantan Utara	0,63	0,63	-	-
Sulawesi Utara	4,52	5,39	0,44	0,22
Sulawesi Tengah	2,72	5,14	0,10	0,05
Sulawesi Selatan	2,34	2,24	0,17	-
Sulawesi Tenggara	1,50	1,94	0,22	0,13
Gorontalo	1,90	0,95	0,27	0,54
Sulawesi Barat	0,93	1,23	-	-
Maluku	9,10	6,25	0,46	0,64
Maluku Utara	10,45	6,35	0,42	0,42
Papua Barat	2,30	1,47	0,38	0,13
Papua	2,81	0,90	0,39	0,57
<b>INDONESIA</b>	<b>1,71</b>	<b>1,37</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Lanjutan Tabel 2.3.7

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Kelompok Warga (6)	Warga Antar Desa (7)	Warga dengan Aparat Keamanan (8)
(1)			
A c e h	0,11	0,03	0,06
Sumatera Utara	0,13	0,03	0,18
Sumatera Barat	0,61	0,09	0,17
Riau	0,05	0,11	0,44
Jambi	0,64	0,06	0,13
Sumatera Selatan	0,22	-	0,12
Bengkulu	0,72	0,07	0,13
Lampung	0,04	0,08	0,11
Kep. Bangka Belitung	0,52	0,26	0,26
Kepulauan Riau	0,24	0,24	-
DKI Jakarta	17,60	-	0,75
Jawa Barat	1,49	0,05	0,32
Jawa Tengah	0,13	-	0,12
DI Yogyakarta	0,46	0,23	1,14
Jawa Timur	0,14	-	0,11
Banten	0,77	-	0,13
Bali	-	-	0,42
Nusa Tenggara Barat	0,79	0,26	0,26
Nusa Tenggara Timur	0,31	0,18	0,24
Kalimantan Barat	0,19	-	0,09
Kalimantan Tengah	0,38	-	0,25
Kalimantan Selatan	0,10	-	0,20
Kalimantan Timur	0,58	-	0,19
Kalimantan Utara	-	-	0,21
Sulawesi Utara	0,54	0,05	0,22
Sulawesi Tengah	0,15	0,10	0,40
Sulawesi Selatan	0,59	0,03	0,17
Sulawesi Tenggara	0,13	-	0,04
Gorontalo	0,41	-	0,14
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	0,74	0,18	0,09
Maluku Utara	0,59	0,17	1,09
Papua Barat	0,06	0,26	0,19
Papua	0,18	0,66	0,27
<b>INDONESIA</b>	<b>0,40</b>	<b>0,09</b>	<b>0,19</b>

Sumber: Diolah dari Podes 2014

**Tabel 2.3. 8 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2018**

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,66	0,60	0,06	0,12
Sumatera Utara	1,55	1,04	0,05	0,15
Sumatera Barat	2,12	1,10	0,08	-
Riau	0,91	0,96	0,16	0,16
Jambi	0,45	1,41	-	0,13
Sumatera Selatan	0,49	0,34	0,06	-
Bengkulu	0,53	0,53	-	0,07
Lampung	0,79	0,60	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	0,26	-	-	-
Kepulauan Riau	0,24	0,24	0,24	-
DKI Jakarta	11,99	6,74	-	-
Jawa Barat	2,05	1,01	0,07	0,13
Jawa Tengah	1,25	1,16	0,01	0,02
DI Yogyakarta	1,14	0,23	-	-
Jawa Timur	0,97	0,68	0,08	0,04
Banten	1,61	1,29	0,06	0,13
Bali	0,70	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	3,15	4,20	0,26	0,17
Nusa Tenggara Timur	3,67	2,33	0,09	0,12
Kalimantan Barat	0,75	0,42	-	0,05
Kalimantan Tengah	0,51	0,25	-	-
Kalimantan Selatan	0,45	0,60	0,15	0,10
Kalimantan Timur	0,67	0,29	-	-
Kalimantan Utara	0,41	0,21	-	-
Sulawesi Utara	3,54	2,72	0,22	0,33
Sulawesi Tengah	2,28	2,48	-	-
Sulawesi Selatan	2,33	1,28	0,07	0,03
Sulawesi Tenggara	1,44	1,95	0,04	-
Gorontalo	0,54	1,50	0,14	0,14
Sulawesi Barat	2,00	0,31	0,15	-
Maluku	9,44	6,45	0,81	1,05
Maluku Utara	5,94	7,11	0,50	0,92
Papua Barat	4,28	1,41	0,40	0,40
Papua	6,36	1,49	0,38	0,79
<b>INDONESIA</b>	<b>1,99</b>	<b>1,28</b>	<b>0,11</b>	<b>0,16</b>

Sumber: Diolah dari Podes 2018

**Lanjutan Tabel 2.3.8**

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,15	0,03	0,09	-
Sumatera Utara	0,41	-	0,20	-
Sumatera Barat	3,22	0,08	0,39	-
Riau	0,96	-	0,11	-
Jambi	0,70	0,06	0,26	-
Sumatera Selatan	0,28	-	0,12	-
Bengkulu	0,66	-	0,13	-
Lampung	0,23	-	0,15	-
Kep. Bangka Belitung	0,26	0,26	-	-
Kepulauan Riau	0,24	-	-	-
DKI Jakarta	6,74	-	-	-
Jawa Barat	1,98	0,08	0,35	-
Jawa Tengah	0,42	-	0,18	-
DI Yogyakarta	1,14	0,23	0,46	-
Jawa Timur	0,21	0,04	0,33	-
Banten	0,90	0,06	0,26	-
Bali	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	1,05	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	1,10	0,15	0,30	-
Kalimantan Barat	0,14	-	0,14	-
Kalimantan Tengah	0,06	-	-	-
Kalimantan Selatan	0,05	-	0,05	-
Kalimantan Timur	0,58	-	0,19	-
Kalimantan Utara	-	-	0,41	-
Sulawesi Utara	0,49	-	0,27	-
Sulawesi Tengah	0,64	-	0,10	-
Sulawesi Selatan	1,08	0,07	0,13	-
Sulawesi Tenggara	0,64	-	0,17	-
Gorontalo	0,41	-	-	-
Sulawesi Barat	0,31	-	-	-
Maluku	2,34	0,08	0,24	-
Maluku Utara	2,17	0,08	0,17	-
Papua Barat	0,40	0,60	0,20	-
Papua	0,16	1,37	0,36	-
<b>INDONESIA</b>	<b>0,65</b>	<b>0,13</b>	<b>0,20</b>	-

Sumber: Diolah dari Podes 2018

**Tabel 2.3. 9 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaikannya Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi	2011		2014		2018	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	66	95,65	54	88,52	70	77,78
Sumatera Utara	101	84,87	103	87,29	170	96,59
Sumatera Barat	31	62,00	44	97,78	72	90,00
Riau	40	85,11	32	84,21	44	86,27
Jambi	42	89,36	39	97,50	38	92,68
Sumatera Selatan	47	92,16	62	92,54	33	89,19
Bengkulu	18	75,00	24	88,89	28	100,00
Lampung	27	67,50	30	88,24	41	93,18
Kep. Bangka Belitung	27	96,43	24	100,00	3	100,00
Kepulauan Riau	5	71,43	2	66,67	4	100,00
DKI Jakarta	57	93,44	69	95,83	52	94,55
Jawa Barat	180	92,31	246	94,98	280	96,22
Jawa Tengah	183	94,33	237	94,05	226	96,58
DI Yogyakarta	11	84,62	12	100,00	14	100,00
Jawa Timur	150	92,59	121	91,67	179	96,76
Banten	73	91,25	36	90,00	56	96,55
Bali	10	83,33	5	83,33	4	80,00
Nusa Tenggara Barat	64	94,12	73	96,05	78	96,30
Nusa Tenggara Timur	152	83,06	143	82,18	184	89,76
Kalimantan Barat	21	77,78	38	97,44	28	93,33
Kalimantan Tengah	23	92,00	33	91,67	14	100,00
Kalimantan Selatan	11	84,62	24	92,31	18	85,71
Kalimantan Timur	38	88,37	15	75,00	18	105,88
Kalimantan Utara *)	-	-	6	100,00	4	80,00
Sulawesi Utara	94	93,07	151	91,52	106	95,50
Sulawesi Tengah	64	98,46	142	95,30	96	97,96
Sulawesi Selatan	107	94,69	140	96,55	118	90,77
Sulawesi Tenggara	49	90,74	68	93,15	80	95,24
Gorontalo	19	90,48	19	79,17	18	100,00
Sulawesi Barat	7	77,78	10	71,43	14	93,33
Maluku	126	86,30	147	91,88	185	92,96
Maluku Utara	103	93,64	178	95,70	157	95,73
Papua Barat	73	92,41	56	94,92	106	92,98
Papua	295	96,41	181	91,88	426	95,30
<b>INDONESIA</b>	<b>2 314</b>	<b>90,32</b>	<b>2 564</b>	<b>92,26</b>	<b>2 964</b>	<b>94,13</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :\* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

## DATA SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL

**Tabel 3.1. 1 Persentase Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang di Alami, Tahun 2016 dan 2017**

Kategori Jenis Kejahatan (1)		
	2016 (2)	2017 (3)
1. Pencurian	85,41	84,47
2. Penganiayaan	2,81	5,12
3. Pencurian dengan kekerasan	2,31	3,31
4. Pelecehan Seksual	0,90	1,76
5. Lainnya	11,49	14,99
6. Mengalami lebih dari 1 jenis kejahatan	2,93	9,66

Sumber: Diolah dari Susenas 2017 dan 2018

**Tabel 3.1.1 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, Tahun 2016-2017**

<b>Provinsi</b> <b>(1)</b>	<b>2016<sup>1)</sup></b> <b>(2)</b>	<b>2017<sup>2)</sup></b> <b>(3)</b>
A c e h	0,85	0,99
Sumatera Utara	1,36	1,09
Sumatera Barat	1,02	1,01
Riau	1,28	1,29
Jambi	1,06	1,14
Sumatera Selatan	1,48	1,52
Bengkulu	1,50	1,29
Lampung	1,43	1,48
Kep. Bangka Belitung	0,58	0,86
Kepulauan Riau	1,72	1,20
DKI Jakarta	1,20	1,10
Jawa Barat	1,36	1,29
Jawa Tengah	1,05	1,04
DI Yogyakarta	1,13	1,50
Jawa Timur	1,03	1,02
Banten	1,12	0,98
Bali	0,84	0,63
Nusa Tenggara Barat	1,92	2,14
Nusa Tenggara Timur	1,34	1,14
Kalimantan Barat	0,71	0,80
Kalimantan Tengah	0,64	0,76
Kalimantan Selatan	0,98	0,96
Kalimantan Timur	1,39	1,29
Kalimantan Utara	1,83	2,19
Sulawesi Utara	1,31	1,23
Sulawesi Tengah	1,77	1,84
Sulawesi Selatan	1,43	1,31
Sulawesi Tenggara	1,52	1,66
Gorontalo	1,25	1,20
Sulawesi Barat	0,84	0,72
Maluku	1,46	1,30
Maluku Utara	1,22	1,47
Papua Barat	1,83	1,88
Papua	1,89	1,55
<b>INDONESIA</b>	<b>1,22</b>	<b>1,08</b>

Sumber : Diolah dari Susenas 2017 dan 2018

Keterangan :

- 1) Data Susenas 2017 (tahun survei) menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu Maret 2016 – Februari 2017.
- 2) Data Susenas 2018 (tahun survei) menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari – 31 Desember 2017.
- 3) Hal ini berbeda dengan Publikasi Statistik Kriminal 2017. Dimana angka tahun 2016 (tahun survei) menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu Maret 2015 – Februari 2016.

**Tabel 3.1. 3 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2016-2017**

Provinsi (1)	2016		2017	
	L (2)	P (3)	L (4)	P (5)
A c e h	65,89	34,11	64,88	35,12
Sumatera Utara	60,64	39,36	63,07	36,93
Sumatera Barat	50,20	49,80	52,94	47,06
Riau	68,24	31,76	65,57	34,43
Jambi	63,81	36,19	67,03	32,97
Sumatera Selatan	74,33	25,67	70,48	29,52
Bengkulu	65,72	34,28	74,32	25,68
Lampung	70,60	29,40	72,57	27,43
Kep. Bangka Belitung	82,25	17,75	76,70	23,30
Kepulauan Riau	62,85	37,15	64,85	35,15
DKI, Jakarta	50,77	49,23	57,15	42,85
Jawa Barat	63,94	36,06	65,68	34,32
Jawa Tengah	61,68	38,32	56,32	43,68
DI,Yogyakarta	66,00	34,00	56,14	43,86
Jawa Timur	57,53	42,47	63,59	36,41
Banten	68,05	31,95	66,37	33,63
Bali	51,34	48,66	65,14	34,86
Nusa Tenggara Barat	65,20	34,80	56,19	43,81
Nusa Tenggara Timur	68,38	31,62	70,09	29,91
Kalimantan Barat	66,48	33,52	64,09	35,91
Kalimantan Tengah	66,78	33,22	66,57	33,43
Kalimantan Selatan	62,75	37,25	61,90	38,10
Kalimantan Timur	61,91	38,09	73,37	26,63
Kalimantan Utara	69,66	30,34	68,16	31,84
Sulawesi Utara	69,90	30,10	66,47	33,53
Sulawesi Tengah	59,92	40,08	57,65	42,35
Sulawesi Selatan	55,60	44,40	55,05	44,95
Sulawesi Tenggara	61,54	38,46	61,57	38,43
Gorontalo	53,29	46,71	53,40	46,60
Sulawesi Barat	72,95	27,05	62,58	37,42
Maluku	65,91	34,09	57,10	42,90
Maluku Utara	66,58	33,42	66,19	33,81
Papua Barat	71,46	28,54	67,20	32,80
Papua	60,36	39,64	67,73	32,27
<b>INDONESIA</b>	<b>62,61</b>	<b>37,39</b>	<b>63,25</b>	<b>36,75</b>

Sumber : Diolah dari Susenas 2017 dan 2018

Keterangan : L=Laki-laki; P=Perempuan

**Tabel 3.1. 4 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, Tahun 2016-2017**

Provinsi	2016		2017	
	Anak (1)	Dewasa (2)	Anak (3)	Dewasa (4)
A c e h	6,39	93,61	6,21	93,79
Sumatera Utara	6,24	93,76	7,98	92,02
Sumatera Barat	11,80	88,20	9,89	90,11
Riau	7,35	92,65	7,84	92,16
Jambi	9,84	90,16	6,81	93,19
Sumatera Selatan	5,35	94,65	8,38	91,62
Bengkulu	6,14	93,86	5,10	94,90
Lampung	7,28	92,72	8,33	91,67
Kep. Bangka Belitung	0,87	99,13	3,65	96,35
Kepulauan Riau	12,86	87,14	3,11	96,89
DKI Jakarta	11,73	88,27	6,36	93,64
Jawa Barat	7,13	92,87	6,65	93,35
Jawa Tengah	7,03	92,97	6,88	93,12
DI Yogyakarta	8,23	91,77	6,22	93,78
Jawa Timur	5,06	94,94	8,02	91,98
Banten	7,48	92,52	4,18	95,82
Bali	6,93	93,07	2,54	97,46
Nusa Tenggara Barat	6,08	93,92	5,29	94,71
Nusa Tenggara Timur	3,26	96,74	9,62	90,38
Kalimantan Barat	6,47	93,53	8,53	91,47
Kalimantan Tengah	6,25	93,75	8,15	91,85
Kalimantan Selatan	5,00	95,00	8,25	91,75
Kalimantan Timur	4,81	95,19	1,51	98,49
Kalimantan Utara	7,13	92,87	5,97	94,03
Sulawesi Utara	7,85	92,15	6,69	93,31
Sulawesi Tengah	7,74	92,26	8,29	91,71
Sulawesi Selatan	6,14	93,86	8,89	91,11
Sulawesi Tenggara	6,25	93,75	11,13	88,87
Gorontalo	9,47	90,53	3,95	96,05
Sulawesi Barat	9,18	90,82	7,65	92,35
Maluku	11,28	88,72	10,47	89,53
Maluku Utara	9,10	90,90	8,79	91,21
Papua Barat	7,81	92,19	8,01	91,99
Papua	10,66	89,34	5,04	94,96
<b>INDONESIA</b>	<b>7,00</b>	<b>93,00</b>	<b>7,11</b>	<b>92,89</b>

Sumber : Diolah dari Susenas 2017 dan 2018

**Tabel 3.1. 5 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, Tahun 2016-2017**

Provinsi (1)	2016 (2)	2017 (3)
A c e h	91,25	90,00
Sumatera Utara	88,07	89,59
Sumatera Barat	84,51	86,86
Riau	91,84	91,79
Jambi	91,51	90,51
Sumatera Selatan	89,54	87,96
Bengkulu	89,16	93,13
Lampung	87,13	86,64
Kep. Bangka Belitung	95,29	87,43
Kepulauan Riau	80,52	82,00
DKI Jakarta	85,69	82,04
Jawa Barat	84,01	85,14
Jawa Tengah	77,22	79,08
DI Yogyakarta	80,55	71,25
Jawa Timur	82,95	80,20
Banten	92,18	92,91
Bali	79,89	80,75
Nusa Tenggara Barat	91,07	86,93
Nusa Tenggara Timur	85,16	85,96
Kalimantan Barat	88,26	86,61
Kalimantan Tengah	86,72	85,76
Kalimantan Selatan	86,95	82,42
Kalimantan Timur	91,31	85,89
Kalimantan Utara	89,36	89,57
Sulawesi Utara	83,45	86,93
Sulawesi Tengah	90,98	87,24
Sulawesi Selatan	87,78	84,45
Sulawesi Tenggara	88,06	77,57
Gorontalo	83,10	86,88
Sulawesi Barat	93,35	78,16
Maluku	90,99	90,45
Maluku Utara	91,07	85,01
Papua Barat	87,65	85,25
Papua	86,65	78,78
<b>INDONESIA</b>	<b>85,41</b>	<b>84,47</b>

Sumber : Diolah dari Susenas 2015, 2016, 2017 dan 2018

\*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

**Tabel 3.1. 6 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Penganiayaan Menurut Provinsi, Tahun 2016-2017**

Provinsi (1)	2016 (2)	2017 (3)
A c e h	3,29	4,65
Sumatera Utara	3,38	4,81
Sumatera Barat	2,17	6,25
Riau	2,16	3,08
Jambi	3,68	4,55
Sumatera Selatan	2,13	2,14
Bengkulu	2,84	2,10
Lampung	1,26	5,01
Kep. Bangka Belitung	2,38	2,55
Kepulauan Riau	3,82	5,05
DKI Jakarta	4,43	4,45
Jawa Barat	2,20	3,86
Jawa Tengah	2,32	5,65
DI Yogyakarta	3,88	7,22
Jawa Timur	2,10	3,65
Banten	3,12	5,09
Bali	0,57	3,45
Nusa Tenggara Barat	2,92	7,67
Nusa Tenggara Timur	6,85	10,39
Kalimantan Barat	2,46	3,89
Kalimantan Tengah	3,88	4,54
Kalimantan Selatan	2,70	4,29
Kalimantan Timur	0,02	0,93
Kalimantan Utara*	2,69	2,47
Sulawesi Utara	8,92	11,89
Sulawesi Tengah	3,31	10,57
Sulawesi Selatan	2,59	5,55
Sulawesi Tenggara	3,34	13,09
Gorontalo	10,26	8,34
Sulawesi Barat	2,56	5,01
Maluku	4,73	6,99
Maluku Utara	6,20	11,42
Papua Barat	8,41	13,82
Papua	5,17	12,71
<b>INDONESIA</b>	<b>2,81</b>	<b>5,12</b>

Sumber : Diolah dari Susenas 2017 dan 2018

\*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

**Tabel 3.1. 7 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2016-2017**

Provinsi (1)	2016 (2)	2017 (3)
A c e h	0,66	0,76
Sumatera Utara	4,13	3,98
Sumatera Barat	2,66	3,78
Riau	0,52	0,65
Jambi	2,14	3,21
Sumatera Selatan	3,95	3,86
Bengkulu	3,16	2,36
Lampung	6,29	4,04
Kep. Bangka Belitung	-	-
Kepulauan Riau	2,57	2,63
DKI Jakarta	2,89	3,83
Jawa Barat	1,21	4,85
Jawa Tengah	1,65	2,10
DI Yogyakarta	3,54	4,98
Jawa Timur	2,52	3,67
Banten	2,81	1,30
Bali	1,56	2,37
Nusa Tenggara Barat	1,12	3,70
Nusa Tenggara Timur	2,14	0,63
Kalimantan Barat	1,74	1,80
Kalimantan Tengah	0,18	3,76
Kalimantan Selatan	1,68	3,69
Kalimantan Timur	1,22	-
Kalimantan Utara*	-	0,79
Sulawesi Utara	1,04	1,00
Sulawesi Tengah	1,53	2,34
Sulawesi Selatan	4,24	4,24
Sulawesi Tenggara	0,98	0,77
Gorontalo	0,55	1,65
Sulawesi Barat	-	1,18
Maluku	0,29	1,33
Maluku Utara	-	1,39
Papua Barat	3,55	1,92
Papua	5,00	8,23
INDONESIA	2,31	3,31

Sumber : Diolah dari Susenas 2017 dan 2018

\*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

**Tabel 3.1. 8 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dengan Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2016-2017**

Provinsi (1)	2016 (2)	2017 (3)
A c e h	0,66	0,35
Sumatera Utara	1,81	0,93
Sumatera Barat	1,60	2,09
Riau	1,18	0,57
Jambi	1,74	3,85
Sumatera Selatan	0,00	0,44
Bengkulu	0,73	3,00
Lampung	0,16	0,99
Kep. Bangka Belitung	-	1,47
Kepulauan Riau	4,75	0,98
DKI Jakarta	1,73	0,55
Jawa Barat	0,97	2,32
Jawa Tengah	0,09	1,68
DI Yogyakarta	3,56	4,36
Jawa Timur	0,71	2,56
Banten	1,66	1,08
Bali	1,36	0,00
Nusa Tenggara Barat	0,59	2,21
Nusa Tenggara Timur	0,30	1,54
Kalimantan Barat	0,47	1,21
Kalimantan Tengah	1,17	2,77
Kalimantan Selatan	0,76	2,17
Kalimantan Timur	0,49	0,00
Kalimantan Utara*	-	1,08
Sulawesi Utara	1,13	1,59
Sulawesi Tengah	0,91	2,15
Sulawesi Selatan	-	2,11
Sulawesi Tenggara	0,36	1,45
Gorontalo	2,83	2,45
Sulawesi Barat	-	1,67
Maluku	0,79	0,74
Maluku Utara	-	1,25
Papua Barat	0,80	0,39
Papua	1,40	1,87
<b>INDONESIA</b>	<b>0,90</b>	<b>1,76</b>

Sumber : Diolah dari Susenas 2017 dan 2018

\*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

**Tabel 3.1. 9 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Lainnya Menurut Provinsi, Tahun 2016-2017**

Provinsi (1)	2016 (2)	2017 (3)
A c e h	6,31	9,83
Sumatera Utara	6,93	5,36
Sumatera Barat	9,19	11,17
Riau	6,86	6,83
Jambi	6,97	13,88
Sumatera Selatan	4,82	12,32
Bengkulu	5,90	6,12
Lampung	6,81	10,62
Kep. Bangka Belitung	2,33	11,86
Kepulauan Riau	9,89	12,66
DKI Jakarta	12,51	20,78
Jawa Barat	14,88	16,47
Jawa Tengah	20,32	18,84
DI Yogyakarta	18,99	24,98
Jawa Timur	14,60	21,63
Banten	6,90	15,60
Bali	17,04	16,12
Nusa Tenggara Barat	7,07	12,14
Nusa Tenggara Timur	7,77	10,09
Kalimantan Barat	8,74	14,95
Kalimantan Tengah	9,28	16,89
Kalimantan Selatan	7,91	16,71
Kalimantan Timur	8,41	14,74
Kalimantan Utara	7,95	14,78
Sulawesi Utara	8,99	4,13
Sulawesi Tengah	4,09	6,20
Sulawesi Selatan	6,27	14,21
Sulawesi Tenggara	8,69	9,64
Gorontalo	4,92	11,42
Sulawesi Barat	4,08	17,22
Maluku	4,46	5,13
Maluku Utara	3,69	7,33
Papua Barat	2,76	7,81
Papua	8,78	11,11
<b>INDONESIA</b>	<b>11,49</b>	<b>14,99</b>

Sumber : Diolah dari Susenas 2017 dan 2018

\*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

**Tabel 3.1. 10 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2016-2017**

Provinsi (1)	2016 (2)	2017 (3)
A c e h	13,29	15,21
Sumatera Utara	16,51	21,94
Sumatera Barat	20,69	25,70
Riau	23,03	19,34
Jambi	17,99	20,30
Sumatera Selatan	21,24	22,37
Bengkulu	19,55	20,44
Lampung	18,07	20,23
Kep. Bangka Belitung	21,93	19,18
Kepulauan Riau	20,07	15,28
DKI Jakarta	24,22	33,73
Jawa Barat	22,05	26,07
Jawa Tengah	16,52	19,42
DI Yogyakarta	32,72	25,67
Jawa Timur	15,76	23,86
Banten	32,92	30,45
Bali	10,25	19,38
Nusa Tenggara Barat	9,35	17,19
Nusa Tenggara Timur	13,43	13,05
Kalimantan Barat	18,72	26,42
Kalimantan Tengah	14,34	26,19
Kalimantan Selatan	13,33	28,44
Kalimantan Timur	20,40	30,53
Kalimantan Utara	22,74	18,56
Sulawesi Utara	18,73	27,66
Sulawesi Tengah	16,66	20,91
Sulawesi Selatan	19,46	25,66
Sulawesi Tenggara	12,85	20,19
Gorontalo	12,08	20,45
Sulawesi Barat	10,09	20,27
Maluku	11,60	14,16
Maluku Utara	10,06	20,93
Papua Barat	21,51	35,66
Papua	10,07	26,26
<b>INDONESIA</b>	<b>18,90</b>	<b>23,44</b>

Sumber : Diolah dari Susenas 2017 dan 2018

\*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

**Tabel 3.1. 11 Persentase Penduduk yang Pernah Melapor dan Mendapat Penanganan Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2016-2017**

Provinsi (1)	2016 (2)	2017 (3)
A c e h	86,88	84,87
Sumatera Utara	82,18	76,38
Sumatera Barat	93,04	78,80
Riau	73,88	81,94
Jambi	90,77	87,46
Sumatera Selatan	81,30	77,19
Bengkulu	87,94	83,09
Lampung	91,59	77,16
Kep. Bangka Belitung	100,00	91,89
Kepulauan Riau	98,80	82,24
DKI Jakarta	79,51	79,85
Jawa Barat	86,19	77,29
Jawa Tengah	81,44	81,44
DI Yogyakarta	84,61	77,66
Jawa Timur	90,94	77,60
Banten	74,30	74,54
Bali	90,76	87,86
Nusa Tenggara Barat	76,04	83,51
Nusa Tenggara Timur	83,75	82,65
Kalimantan Barat	94,00	86,60
Kalimantan Tengah	92,81	84,40
Kalimantan Selatan	78,07	78,66
Kalimantan Timur	82,40	83,49
Kalimantan Utara	77,33	85,20
Sulawesi Utara	92,52	79,98
Sulawesi Tengah	87,26	80,73
Sulawesi Selatan	80,70	77,36
Sulawesi Tenggara	84,42	77,73
Gorontalo	95,77	92,68
Sulawesi Barat	90,02	88,94
Maluku	95,86	82,58
Maluku Utara	100,00	69,17
Papua Barat	86,94	75,95
Papua	80,67	82,85
<b>INDONESIA</b>	<b>84,40</b>	<b>79,03</b>

Sumber : Diolah dari Susenas 2017 dan 2018

\*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

**Tabel 3.1. 12 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi  
Menurut Jenis Kejahatan dan Provinsi, Tahun 2017**

Provinsi	Pencurian	Penganiayaan	Pencurian dengan Kekerasan	Pelecehan Seksual	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A c e h	11,77	0,64	0,35	0,35	3,53
Sumatera Utara	19,23	1,81	1,25	0,17	0,64
Sumatera Barat	21,37	2,12	0,88	1,11	1,51
Riau	17,37	0,85	0,15	0,00	1,18
Jambi	17,38	3,01	3,21	3,12	4,15
Sumatera Selatan	18,01	0,33	3,02	0,15	2,69
Bengkulu	15,39	0,61	1,84	2,47	3,03
Lampung	15,52	2,70	2,60	0,90	1,75
Kep. Bangka Belitung	17,11	2,07	0,00	0,00	1,33
Kepulauan Riau	11,61	0,38	0,00	0,00	3,67
DKI Jakarta	30,47	1,84	1,08	0,55	4,10
Jawa Barat	22,61	1,87	2,75	1,60	4,27
Jawa Tengah	13,93	3,06	0,94	0,59	3,86
DI Yogyakarta	13,97	4,62	2,84	1,60	9,48
Jawa Timur	19,17	1,95	2,53	1,61	4,49
Banten	29,74	2,58	1,08	1,08	1,57
Bali	15,50	0,45	2,37	0,00	1,06
Nusa Tenggara Barat	12,03	2,83	1,56	1,23	4,85
Nusa Tenggara Timur	7,16	4,79	0,30	0,46	3,02
Kalimantan Barat	19,71	2,45	1,57	0,92	5,46
Kalimantan Tengah	20,92	4,05	2,55	2,77	7,79
Kalimantan Selatan	19,25	3,79	3,31	1,40	7,38
Kalimantan Timur	25,94	0,83	0,00	0,00	5,01
Kalimantan Utara	16,00	0,69	0,79	1,08	2,26
Sulawesi Utara	18,17	6,75	0,50	0,37	2,07
Sulawesi Tengah	14,26	4,84	1,13	1,08	1,43
Sulawesi Selatan	19,30	2,70	1,98	1,08	4,08
Sulawesi Tenggara	9,81	6,99	0,77	0,67	3,16
Gorontalo	11,73	3,41	0,91	2,45	4,69
Sulawesi Barat	17,14	0,00	0,00	0,00	3,13
Maluku	10,75	3,72	0,31	0,31	1,01
Maluku Utara	12,06	7,05	0,53	0,97	1,64
Papua Barat	25,20	9,16	0,35	0,12	6,32
Papua	17,72	5,19	2,55	1,62	4,93
INDONESIA	<b>18,79</b>	<b>2,46</b>	<b>1,81</b>	<b>1,05</b>	<b>3,65</b>

Sumber : Diolah dari Susenas 2018

\*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk



**DATA MODUL KETAHANAN SOSIAL**

**Tabel 4.1. 1 Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, Tahun 2017**

Provinsi	2017
(1)	(2)
A c e h	50,93
Sumatera Utara	50,62
Sumatera Barat	43,32
Riau	51,15
Jambi	54,90
Sumatera Selatan	52,35
Bengkulu	66,47
Lampung	58,75
Kep. Bangka Belitung	47,80
Kepulauan Riau	71,43
DKI Jakarta	50,57
Jawa Barat	43,72
Jawa Tengah	63,50
DI Yogyakarta	64,62
Jawa Timur	58,18
Banten	42,24
Bali	73,43
Nusa Tenggara Barat	52,71
Nusa Tenggara Timur	46,47
Kalimantan Barat	54,74
Kalimantan Tengah	46,04
Kalimantan Selatan	59,02
Kalimantan Timur	55,42
Kalimantan Utara*	56,58
Sulawesi Utara	52,05
Sulawesi Tengah	50,43
Sulawesi Selatan	48,28
Sulawesi Tenggara	58,24
Gorontalo	34,28
Sulawesi Barat	66,10
Maluku	55,08
Maluku Utara	58,92
Papua Barat	46,95
Papua	58,69
<b>INDONESIA</b>	<b>53,32</b>

Sumber : Diolah dari Modul Ketahanan Sosial Tahun 2017

**Tabel 4.1. 2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kekhawatiran Ketika Melakukan Perjalanan dari dan Menuju Tempat Kerja/Aktivitas Menurut Provinsi, Tahun 2017**

Provinsi (1)	Khawatir (2)	Tidak Khawatir (3)
A c e h	19,12	80,88
Sumatera Utara	23,66	76,34
Sumatera Barat	22,37	77,63
Riau	18,25	81,75
Jambi	24,43	75,57
Sumatera Selatan	25,23	74,77
Bengkulu	13,89	86,11
Lampung	24,14	75,86
Kep. Bangka Belitung	31,57	68,43
Kepulauan Riau	19,95	80,05
DKI Jakarta	34,36	65,64
Jawa Barat	29,88	70,12
Jawa Tengah	16,16	83,84
DI Yogyakarta	16,58	83,42
Jawa Timur	18,66	81,34
Banten	37,64	62,36
Bali	10,24	89,76
Nusa Tenggara Barat	18,96	81,04
Nusa Tenggara Timur	23,64	76,36
Kalimantan Barat	19,16	80,84
Kalimantan Tengah	26,13	73,87
Kalimantan Selatan	10,69	89,31
Kalimantan Timur	23,15	76,85
Kalimantan Utara	17,84	82,16
Sulawesi Utara	28,68	71,32
Sulawesi Tengah	28,88	71,12
Sulawesi Selatan	30,30	69,70
Sulawesi Tenggara	25,02	74,98
Gorontalo	36,61	63,39
Sulawesi Barat	16,24	83,76
Maluku	25,29	74,71
Maluku Utara	22,72	77,28
Papua Barat	31,89	68,11
Papua	15,51	84,49
<b>INDONESIA</b>	<b>23,45</b>	<b>76,55</b>

Sumber : Diolah dari Modul Ketahanan Sosial Tahun 2017

**Tabel 4.1. 3 Persentase Rumah Tangga Menurut Kekhawatiran Ketika Meninggalkan Rumah dalam Keadaan Tidak Berpenghuni Menurut Provinsi, Tahun 2017**

Provinsi (1)	Khawatir (2)	Tidak Khawatir (3)
A c e h	64,21	35,79
Sumatera Utara	63,12	36,88
Sumatera Barat	56,52	43,48
Riau	59,33	40,67
Jambi	67,79	32,21
Sumatera Selatan	64,94	35,06
Bengkulu	53,44	46,56
Lampung	65,83	34,17
Kep. Bangka Belitung	61,39	38,61
Kepulauan Riau	43,04	56,96
DKI Jakarta	69,89	30,11
Jawa Barat	65,41	34,59
Jawa Tengah	50,89	49,11
DI Yogyakarta	39,88	60,12
Jawa Timur	54,06	45,94
Banten	65,82	34,18
Bali	33,74	66,26
Nusa Tenggara Barat	49,94	50,06
Nusa Tenggara Timur	64,21	35,79
Kalimantan Barat	61,03	38,97
Kalimantan Tengah	64,31	35,69
Kalimantan Selatan	48,81	51,19
Kalimantan Timur	59,59	40,41
Kalimantan Utara	48,28	51,72
Sulawesi Utara	61,47	38,53
Sulawesi Tengah	64,26	35,74
Sulawesi Selatan	61,77	38,23
Sulawesi Tenggara	61,91	38,09
Gorontalo	79,47	20,53
Sulawesi Barat	53,42	46,58
Maluku	50,73	49,27
Maluku Utara	54,14	45,86
Papua Barat	58,76	41,24
Papua	47,18	52,82
<b>INDONESIA</b>	<b>58,85</b>	<b>41,15</b>

Sumber : Diolah dari Modul Ketahanan Sosial Tahun 2017

**Tabel 4.1. 4 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Pengamanan yang Digunakan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, Tahun 2017**

Provinsi	Portal	Penerangan Jalan	Hansip/Satpam
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	1,76	69,98	2,47
Sumatera Utara	6,97	63,32	5,54
Sumatera Barat	2,85	48,62	1,84
Riau	10,28	58,00	6,08
Jambi	4,86	48,60	3,81
Sumatera Selatan	5,79	55,18	14,56
Bengkulu	3,84	31,38	14,76
Lampung	3,90	62,21	19,10
Kep. Bangka Belitung	1,73	39,69	5,33
Kepulauan Riau	28,01	60,49	28,72
DKI Jakarta	42,64	86,42	61,16
Jawa Barat	12,70	66,67	30,81
Jawa Tengah	4,84	83,69	8,57
DI Yogyakarta	10,93	93,84	3,76
Jawa Timur	7,47	81,83	9,77
Banten	11,30	68,59	20,38
Bali	1,01	69,44	5,32
Nusa Tenggara Barat	2,13	50,12	2,49
Nusa Tenggara Timur	0,22	11,84	3,78
Kalimantan Barat	3,46	41,28	1,00
Kalimantan Tengah	5,75	43,60	8,52
Kalimantan Selatan	3,33	61,80	4,59
Kalimantan Timur	8,41	62,10	11,17
Kalimantan Utara	1,73	47,55	1,47
Sulawesi Utara	6,85	66,13	20,97
Sulawesi Tengah	0,70	42,12	11,26
Sulawesi Selatan	6,50	53,16	5,98
Sulawesi Tenggara	0,40	22,28	1,51
Gorontalo	0,72	47,81	0,39
Sulawesi Barat	0,34	27,77	2,94
Maluku	1,20	40,77	3,19
Maluku Utara	0,57	46,72	4,62
Papua Barat	0,69	34,10	5,00
Papua	0,70	21,66	5,77
<b>INDONESIA</b>	<b>8,67</b>	<b>66,62</b>	<b>15,26</b>

Sumber : Diolah dari Modul Ketahanan Sosial Tahun 2017

**Lanjutan Tabel 4.1.4**

<b>Provinsi</b>	<b>Penerapan Wajib Lapor Bagi Pendatang</b>	<b>Siskamling/ Ronda</b>	<b>Sarana/Tata Cara Lainnya</b>
(1)	(5)	(6)	(7)
A c e h	64,11	7,99	0,26
Sumatera Utara	38,15	18,44	0,30
Sumatera Barat	35,90	16,57	0,08
Riau	61,79	24,43	0,06
Jambi	61,43	33,37	0,00
Sumatera Selatan	54,34	34,70	0,49
Bengkulu	59,37	21,82	0,00
Lampung	73,62	67,80	0,05
Kep. Bangka Belitung	73,05	15,58	0,12
Kepulauan Riau	81,59	18,73	0,11
DKI Jakarta	90,79	52,99	0,33
Jawa Barat	75,58	61,99	0,78
Jawa Tengah	74,37	36,95	0,27
DI Yogyakarta	83,04	79,14	3,04
Jawa Timur	67,01	23,67	0,38
Banten	66,12	54,21	0,81
Bali	55,24	7,75	0,09
Nusa Tenggara Barat	21,95	18,63	0,05
Nusa Tenggara Timur	23,11	1,55	0,99
Kalimantan Barat	42,04	8,77	0,65
Kalimantan Tengah	59,87	12,22	0,47
Kalimantan Selatan	64,65	17,63	0,22
Kalimantan Timur	85,93	34,73	0,22
Kalimantan Utara	82,44	10,56	0,00
Sulawesi Utara	76,97	27,28	2,48
Sulawesi Tengah	32,22	11,54	0,08
Sulawesi Selatan	20,04	11,31	0,33
Sulawesi Tenggara	21,78	4,83	0,57
Gorontalo	36,13	0,42	0,01
Sulawesi Barat	13,24	14,99	0,00
Maluku	17,03	2,78	0,12
Maluku Utara	25,70	2,95	0,08
Papua Barat	16,75	6,88	0,00
Papua	7,72	10,34	1,16
<b>INDONESIA</b>	<b>62,67</b>	<b>35,16</b>	<b>0,48</b>

Sumber : Diolah dari Modul Ketahanan Sosial Tahun 2017

**Tabel 4.1. 5 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Pengamanan yang Digunakan di Tempat Tinggal/Rumah, Tahun 2017**

Provinsi	Gembok/Kunci/ Palang Pintu yang Berlapis	Teralis Pintu/Jendela	Pagar yang Tinggi (minimal 2 Meter)	Kawat berduri/Paku/ Pecahan Kaca di Atas Pagar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	51,96	20,33	3,81	1,29
Sumatera Utara	72,93	44,85	4,86	1,21
Sumatera Barat	61,30	25,35	4,97	0,89
Riau	80,87	36,18	6,32	1,32
Jambi	81,99	29,40	5,40	1,08
Sumatera Selatan	80,52	35,50	6,83	1,14
Bengkulu	69,47	30,81	4,78	1,98
Lampung	74,04	28,50	7,39	0,77
Kep. Bangka Belitung	65,38	29,18	6,11	1,53
Kepulauan Riau	77,50	40,07	9,53	0,61
DKI Jakarta	63,82	29,03	14,16	1,97
Jawa Barat	62,60	17,33	8,76	0,48
Jawa Tengah	56,13	12,19	4,51	0,40
DI Yogyakarta	58,20	21,32	7,01	0,43
Jawa Timur	59,54	15,65	8,01	0,82
Banten	57,63	22,77	6,03	0,54
Bali	12,06	12,07	20,29	0,64
Nusa Tenggara Barat	47,03	21,99	6,30	1,79
Nusa Tenggara Timur	38,33	10,39	3,74	0,41
Kalimantan Barat	56,54	14,38	2,96	0,21
Kalimantan Tengah	85,85	18,87	3,86	0,53
Kalimantan Selatan	61,34	14,25	2,90	0,46
Kalimantan Timur	81,65	32,36	8,44	0,99
Kalimantan Utara	71,46	20,99	3,39	0,00
Sulawesi Utara	55,89	19,10	9,60	0,56
Sulawesi Tengah	59,43	22,50	8,57	0,96
Sulawesi Selatan	60,23	27,35	12,10	2,15
Sulawesi Tenggara	46,35	17,38	3,87	0,94
Gorontalo	38,61	22,26	6,53	1,86
Sulawesi Barat	68,43	15,95	3,13	0,54
Maluku	37,85	10,52	0,88	0,26
Maluku Utara	48,37	13,99	4,06	0,66
Papua Barat	52,31	14,26	6,99	2,23
Papua	53,94	17,00	10,96	1,27
INDONESIA	<b>61,21</b>	<b>20,92</b>	<b>7,32</b>	<b>0,83</b>

Sumber : Diolah dari Modul Ketahanan Sosial Tahun 2017

**Lanjutan Tabel 4.1.5**

<b>Provinsi</b>	<b>Alarm</b>	<b>Kamera CCTV</b>	<b>Hewan Penjaga (Anjing/Angsa)</b>	<b>Petugas Keamanan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
A c e h	0,02	0,27	1,08	0,06
Sumatera Utara	0,46	1,29	5,79	1,27
Sumatera Barat	0,11	0,16	6,89	0,29
Riau	0,29	0,93	3,11	0,55
Jambi	0,05	0,57	2,76	0,42
Sumatera Selatan	0,15	0,88	4,58	1,02
Bengkulu	1,26	0,46	5,20	1,98
Lampung	0,07	0,32	1,20	1,25
Kep. Bangka Belitung	0,15	0,59	4,60	0,32
Kepulauan Riau	1,61	4,03	2,32	14,83
DKI Jakarta	1,54	3,27	2,41	3,96
Jawa Barat	0,52	0,61	0,57	0,16
Jawa Tengah	0,09	0,45	0,59	0,64
DI Yogyakarta	0,00	0,96	2,01	0,58
Jawa Timur	0,26	0,39	0,75	0,58
Banten	0,34	0,86	0,53	5,57
Bali	0,21	0,68	31,79	0,53
Nusa Tenggara Barat	0,09	0,04	3,32	0,89
Nusa Tenggara Timur	0,03	0,43	29,23	0,12
Kalimantan Barat	0,22	0,80	7,27	0,18
Kalimantan Tengah	0,04	0,23	4,56	0,00
Kalimantan Selatan	0,20	0,88	1,40	0,87
Kalimantan Timur	0,14	2,10	2,25	2,20
Kalimantan Utara	0,00	0,40	6,02	0,22
Sulawesi Utara	0,04	0,39	21,33	0,69
Sulawesi Tengah	0,00	0,33	10,15	0,63
Sulawesi Selatan	1,26	1,96	9,89	1,81
Sulawesi Tenggara	0,07	0,35	2,85	0,14
Gorontalo	0,00	0,30	6,34	0,21
Sulawesi Barat	0,00	0,18	7,05	1,60
Maluku	0,02	0,02	7,98	0,09
Maluku Utara	0,08	0,16	4,98	0,00
Papua Barat	0,18	0,71	17,09	0,12
Papua	0,12	0,38	23,97	0,65
<b>INDONESIA</b>	<b>0,35</b>	<b>0,76</b>	<b>3,67</b>	<b>1,09</b>

Sumber : Diolah dari Modul Ketahanan Sosial Tahun 2017

## DATA POTENSI DESA

**Tabel 4.2. 1 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Jenis Upaya yang Dilakukan untuk Menjaga Keamanan	2011		2014		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling)	31 145	39,62	41 611	50,63	46 752	55,70
2. Membentuk Regu Keamanan Lingkungan	31 288	39,80	35 629	43,35	39 585	47,16
3. Menambah Jumlah Anggota Hansip	1 262	16,05	19 299	23,48	20 869	24,86
4. Memeriksa Setiap Orang Asing	34 982	44,50	-	-	-	-
5. Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan *)	-	-	48 357	58,84	52 240	62,24

Sumber : Diolah dari Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Keterangan : \*) Pada Podes 2014 pertanyaan Memeriksa Setiap Orang Asing diubah menjadi Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan

**Tabel 4.2. 2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga keamanan Tahun 2011**

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun	Membentuk	Menambah	Memeriksa
	Poskamling	Regu Kamling	Anggota Hansip	Setiap Orang Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	2 797	2 154	657	3 587
Sumatera Utara	1 561	1 785	363	1 907
Sumatera Barat	624	491	128	527
Riau	842	784	365	814
Jambi	625	469	130	486
Sumatera Selatan	1 536	1 478	533	1 426
Bengkulu	667	663	231	623
Lampung	1 359	1 591	572	1 263
Kep. Bangka Belitung	142	170	57	154
Kepulauan Riau	141	181	102	182
DKI Jakarta	186	232	171	181
Jawa Barat	3 833	3 829	1 889	4 041
Jawa Tengah	2 574	3 395	1 297	4 467
DI Yogyakarta	272	257	114	167
Jawa Timur	3 119	3 602	145	4 611
Banten	977	971	380	880
Bali	189	164	84	484
Nusa Tenggara Barat	605	587	129	415
Nusa Tenggara Timur	955	916	545	858
Kalimantan Barat	470	503	195	623
Kalimantan Tengah	775	545	231	564
Kalimantan Selatan	664	419	151	537
Kalimantan Timur	738	620	300	525
Sulawesi Utara	803	857	490	129
Sulawesi Tengah	780	816	394	806
Sulawesi Selatan	1 685	1 353	440	1 303
Sulawesi Tenggara	978	923	283	790
Gorontalo	181	288	168	328
Sulawesi Barat	358	271	86	193
Maluku	185	259	110	268
Maluku Utara	175	217	161	250
Papua Barat	99	146	104	121
Papua	250	352	310	311
<b>INDONESIA</b>	<b>31 145</b>	<b>31 288</b>	<b>1 262</b>	<b>34 982</b>

Sumber : Diolah dari Podes 2011

**Tabel 4.2. 3 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Tahun 2014**

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)
	(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	2 819	1 927	656	5 375
Sumatera Utara	1 368	1 056	324	2 248
Sumatera Barat	813	563	236	770
Riau	1 083	915	357	1 118
Jambi	101	750	328	1 002
Sumatera Selatan	1 902	1 636	738	2 044
Bengkulu	1 118	1 019	402	1 003
Lampung	2 032	1 933	1 118	1 982
Kep. Bangka Belitung	210	157	113	272
Kepulauan Riau	193	176	165	294
DKI Jakarta	227	223	138	245
Jawa Barat	4 976	461	2 445	5 029
Jawa Tengah	5 098	4 595	2 269	6 218
DI Yogyakarta	365	310	195	329
Jawa Timur	5 171	4 469	289	6 268
Banten	1 181	906	497	1 044
Bali	374	445	97	499
Nusa Tenggara Barat	826	677	324	597
Nusa Tenggara Timur	772	858	622	746
Kalimantan Barat	548	488	433	952
Kalimantan Tengah	991	734	467	1 035
Kalimantan Selatan	1 167	640	368	1 124
Kalimantan Timur	758	664	351	796
Kalimantan Utara	177	134	73	250
Sulawesi Utara	109	1 166	611	1 517
Sulawesi Tengah	1 105	1 129	612	1 296
Sulawesi Selatan	1 941	1 256	792	1 322
Sulawesi Tenggara	104	802	403	885
Gorontalo	253	401	254	483
Sulawesi Barat	342	227	173	258
Maluku	183	200	188	470
Maluku Utara	159	197	183	450
Papua Barat	132	145	143	213
Papua	187	221	334	223
<b>INDONESIA</b>	<b>41 611</b>	<b>35 629</b>	<b>19 299</b>	<b>48 357</b>

Sumber : Diolah dari Podes 2014

**Tabel 4.2. 4 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Tahun 2018**

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	2 329	1 404	614	5 083
Sumatera Utara	1 903	1 396	594	2 516
Sumatera Barat	971	723	351	962
Riau	1 196	985	416	1 292
Jambi	1 112	749	426	1 029
Sumatera Selatan	2 243	2 003	917	2 201
Bengkulu	1 051	888	323	1 089
Lampung	2 198	2 071	863	2 114
Kep. Bangka Belitung	245	209	128	304
Kepulauan Riau	194	181	108	309
DKI Jakarta	190	199	125	242
Jawa Barat	5 409	4 709	2 375	5 134
Jawa Tengah	5 999	5 140	2 511	6 437
DI Yogyakarta	392	347	222	376
Jawa Timur	6 321	5 245	3 086	6 614
Banten	1 280	1 035	602	1 258
Bali	395	380	123	556
Nusa Tenggara Barat	916	724	400	634
Nusa Tenggara Timur	1 085	1 244	867	979
Kalimantan Barat	963	838	521	1 208
Kalimantan Tengah	1 042	911	464	1 028
Kalimantan Selatan	1 243	799	425	1 240
Kalimantan Timur	744	594	267	742
Kalimantan Utara	241	177	101	286
Sulawesi Utara	1 167	1 136	429	1 636
Sulawesi Tengah	1 168	1 155	518	1 347
Sulawesi Selatan	1 896	1 325	825	1 623
Sulawesi Tenggara	1 055	901	522	947
Gorontalo	254	281	255	500
Sulawesi Barat	358	230	168	314
Maluku	252	316	226	647
Maluku Utara	248	348	317	723
Papua Barat	251	295	185	239
Papua	441	647	595	631
<b>INDONESIA</b>	<b>46 752</b>	<b>39 585</b>	<b>20 869</b>	<b>52 240</b>

Sumber : Diolah dari Podes 2018

**Tabel 4.2. 5 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2011**

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan				
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Memeriksa Setiap Orang Asing	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A c e h	43,14	33,23	10,13	55,33	
Sumatera Utara	26,93	30,79	6,26	32,90	
Sumatera Barat	60,41	47,53	12,39	51,02	
Riau	50,88	47,37	22,05	49,18	
Jambi	45,55	34,18	9,48	35,42	
Sumatera Selatan	48,21	46,39	16,73	44,76	
Bengkulu	44,20	43,94	15,31	41,29	
Lampung	55,15	64,57	23,21	51,26	
Kep. Bangka Belitung	39,34	47,09	15,79	42,66	
Kepulauan Riau	39,94	51,27	28,90	51,56	
DKI Jakarta	69,66	86,89	64,04	67,79	
Jawa Barat	64,91	64,84	31,99	68,43	
Jawa Tengah	30,01	39,58	15,12	52,08	
DI Yogyakarta	62,10	58,68	26,03	38,13	
Jawa Timur	36,69	42,37	17,05	54,23	
Banten	63,65	63,26	24,76	57,33	
Bali	26,40	22,91	11,73	67,60	
Nusa Tenggara Barat	55,81	54,15	11,90	38,28	
Nusa Tenggara Timur	32,20	30,88	18,37	28,93	
Kalimantan Barat	23,89	25,57	9,91	31,67	
Kalimantan Tengah	50,72	35,67	15,12	36,91	
Kalimantan Selatan	33,20	20,95	7,55	26,85	
Kalimantan Timur	50,38	42,32	20,48	35,84	
Sulawesi Utara	47,43	50,62	28,94	76,20	
Sulawesi Tengah	42,98	44,96	21,71	44,41	
Sulawesi Selatan	56,51	45,37	14,76	43,70	
Sulawesi Tenggara	46,11	43,52	13,34	37,25	
Gorontalo	24,76	39,40	22,98	44,87	
Sulawesi Barat	56,11	42,48	13,48	30,25	
Maluku	18,07	25,29	10,74	26,17	
Maluku Utara	16,22	20,11	14,92	23,17	
Papua Barat	6,88	10,15	7,23	8,41	
Papua	6,37	8,97	7,90	7,93	
<b>INDONESIA</b>	<b>39,62</b>	<b>39,80</b>	<b>16,05</b>	<b>44,50</b>	

Sumber : Diolah dari Podes 2011

**Tabel 4.2. 6 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2014**

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan				
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Aceh	43,29	29,59	10,07	82,54	
Sumatera Utara	22,41	17,30	5,31	36,83	
Sumatera Barat	71,00	49,17	20,61	67,25	
Riau	59,02	49,86	19,46	60,93	
Jambi	65,12	48,36	21,15	64,60	
Sumatera Selatan	58,76	50,54	22,80	63,14	
Bengkulu	72,98	66,51	26,24	65,47	
Lampung	77,20	73,44	42,48	75,30	
Kep. Bangka Belitung	55,12	41,21	29,66	71,39	
Kepulauan Riau	46,51	42,41	39,76	70,84	
DKI Jakarta	85,02	83,52	51,69	91,76	
Jawa Barat	83,46	77,32	41,01	84,35	
Jawa Tengah	59,43	53,57	26,45	72,49	
DI Yogyakarta	83,33	70,78	44,52	75,11	
Jawa Timur	60,82	52,56	33,99	73,72	
Banten	76,14	58,41	32,04	67,31	
Bali	52,23	62,15	13,55	69,69	
Nusa Tenggara Barat	72,39	59,33	28,40	52,32	
Nusa Tenggara Timur	23,61	26,24	19,02	22,81	
Kalimantan Barat	25,98	23,14	20,53	45,14	
Kalimantan Tengah	63,16	46,78	29,76	65,97	
Kalimantan Selatan	58,12	31,87	18,33	55,98	
Kalimantan Timur	73,88	64,72	34,21	77,58	
Kalimantan Utara	36,95	27,97	15,24	52,19	
Sulawesi Utara	59,37	63,51	33,28	82,63	
Sulawesi Tengah	55,64	56,85	30,82	65,26	
Sulawesi Selatan	64,06	41,45	26,14	43,63	
Sulawesi Tenggara	45,77	35,30	17,74	38,95	
Gorontalo	34,38	54,48	34,51	65,63	
Sulawesi Barat	52,78	35,03	26,70	39,81	
Maluku	16,82	18,38	17,28	43,20	
Maluku Utara	13,29	16,47	15,30	37,63	
Papua Barat	8,42	9,25	9,13	13,59	
Papua	3,84	4,54	6,86	4,58	
<b>INDONESIA</b>	<b>50,63</b>	<b>43,35</b>	<b>23,48</b>	<b>58,84</b>	

Sumber : Diolah dari Podes 2014

**Tabel 4.2. 7 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2018**

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
(1)	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)
A c e h	35.79	21.57	9.43	78.10
Sumatera Utara	31.03	22.77	9.69	41.03
Sumatera Barat	76.16	56.71	27.53	75.45
Riau	63.79	52.53	22.19	68.91
Jambi	71.19	47.95	27.27	65.88
Sumatera Selatan	68.76	61.40	28.11	67.47
Bengkulu	69.42	58.65	21.33	71.93
Lampung	82.82	78.03	32.52	79.65
Kep. Bangka Belitung	62.66	53.45	32.74	77.75
Kepulauan Riau	46.63	43.51	25.96	74.28
DKI Jakarta	71.16	74.53	46.82	90.64
Jawa Barat	90.80	79.05	39.87	86.18
Jawa Tengah	70.09	60.05	29.34	75.21
DI Yogyakarta	89.50	79.22	50.68	85.84
Jawa Timur	74.40	61.73	36.32	77.85
Banten	82.47	66.69	38.79	81.06
Bali	55.17	53.07	17.18	77.65
Nusa Tenggara Barat	80.14	63.34	35.00	55.47
Nusa Tenggara Timur	32.36	37.10	25.86	29.20
Kalimantan Barat	45.06	39.21	24.38	56.53
Kalimantan Tengah	66.12	57.80	29.44	65.23
Kalimantan Selatan	61.90	39.79	21.17	61.75
Kalimantan Timur	71.68	57.23	25.72	71.48
Kalimantan Utara	50.00	36.72	20.95	59.34
Sulawesi Utara	63.49	61.81	23.34	89.01
Sulawesi Tengah	57.82	57.18	25.64	66.68
Sulawesi Selatan	62.18	43.46	27.06	53.23
Sulawesi Tenggara	44.82	38.28	22.18	40.23
Gorontalo	34.60	38.28	34.74	68.12
Sulawesi Barat	55.08	35.38	25.85	48.31
Maluku	20.32	25.48	18.23	52.18
Maluku Utara	20.74	29.10	26.51	60.45
Papua Barat	12.63	14.85	9.31	12.03
Papua	7.94	11.65	10.72	11.37
<b>INDONESIA</b>	<b>55.70</b>	<b>47.16</b>	<b>24.86</b>	<b>62.24</b>

Sumber : Diolah dari Podes 2014

**Tabel 4.2. 8 Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Menurut Provinsi, Tahun 2011,2014, dan 2018**

Provinsi	Jumlah			Percentase		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)	2011 (5)	2014 (6)	2018 (7)
A c e h	2 797	2 819	2 329	10,13	43,29	35,79
Sumatera Utara	1 561	1 368	1 903	6,26	22,41	31,03
Sumatera Barat	624	813	971	12,39	71,00	76,16
Riau	842	1 083	1 196	22,05	59,02	63,79
Jambi	625	101	1 112	9,48	65,12	71,19
Sumatera Selatan	1 536	1 902	2 243	16,73	58,76	68,76
Bengkulu	667	1 118	1 051	15,31	72,98	69,42
Lampung	1 359	2 032	2 198	23,21	77,20	82,82
Kep. Bangka Belitung	142	210	245	15,79	55,12	62,66
Kepulauan Riau	141	193	194	28,90	46,51	46,63
DKI Jakarta	186	227	190	64,04	85,02	71,16
Jawa Barat	3 833	4 976	5 409	31,99	83,46	90,80
Jawa Tengah	2 574	5 098	5 999	15,12	59,43	70,09
DI Yogyakarta	272	365	392	26,03	83,33	89,50
Jawa Timur	3 119	5 171	6 321	17,05	60,82	74,40
Banten	977	1 181	1 280	24,76	76,14	82,47
Bali	189	374	395	11,73	52,23	55,17
Nusa Tenggara Barat	605	826	916	11,90	72,39	80,14
Nusa Tenggara Timur	955	772	1 085	18,37	23,61	32,36
Kalimantan Barat	470	548	963	9,91	25,98	45,06
Kalimantan Tengah	775	991	1 042	15,12	63,16	66,12
Kalimantan Selatan	664	1 167	1 243	7,55	58,12	61,90
Kalimantan Timur	738	758	744	20,48	73,88	71,68
Kalimantan Utara	-	177	241	-	36,95	50,00
Sulawesi Utara	803	109	1 167	47,43	59,37	63,49
Sulawesi Tengah	780	1 105	1 168	42,98	55,64	57,82
Sulawesi Selatan	1 685	1 941	1 896	56,51	64,06	62,18
Sulawesi Tenggara	978	104	1 055	46,11	45,77	44,82
Gorontalo	181	253	254	24,76	34,38	34,60
Sulawesi Barat	358	342	358	56,11	52,78	55,08
Maluku	185	183	252	18,07	16,82	20,32
Maluku Utara	175	159	248	16,22	13,29	20,74
Papua Barat	99	132	251	6,88	8,42	12,63
Papua	250	187	441	6,37	3,84	7,94
<b>INDONESIA</b>	<b>31 145</b>	<b>41 611</b>	<b>46 752</b>	<b>39,62</b>	<b>50,63</b>	<b>55,70</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan : \* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 4.2. 9 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)	2011 (4)	2014 (6)	2018 (7)
A c e h	2 154	2 819	1 404	33,23	29,59	21,57
Sumatera Utara	1 785	1 368	1 396	30,79	17,30	22,77
Sumatera Barat	491	813	723	47,53	49,17	56,71
Riau	784	1 083	985	47,37	49,86	52,53
Jambi	469	101	749	34,18	48,36	47,95
Sumatera Selatan	1 478	1 902	2 003	46,39	50,54	61,40
Bengkulu	663	1 118	888	43,94	66,51	58,65
Lampung	1 591	2 032	2 071	64,57	73,44	78,03
Kep. Bangka Belitung	170	210	209	47,09	41,21	53,45
Kepulauan Riau	181	193	181	51,27	42,41	43,51
DKI Jakarta	232	227	199	86,89	83,52	74,53
Jawa Barat	3 829	4 976	4 709	64,84	77,32	79,05
Jawa Tengah	3 395	5 098	5 140	39,58	53,57	60,05
DI Yogyakarta	257	365	347	58,68	70,78	79,22
Jawa Timur	3 602	5 171	5 245	42,37	52,56	61,73
Banten	971	1 181	1 035	63,26	58,41	66,69
Bali	164	374	380	22,91	62,15	53,07
Nusa Tenggara Barat	587	826	724	54,15	59,33	63,34
Nusa Tenggara Timur	916	772	1 244	30,88	26,24	37,10
Kalimantan Barat	503	548	838	25,57	23,14	39,21
Kalimantan Tengah	545	991	911	35,67	46,78	57,80
Kalimantan Selatan	419	1 167	799	20,95	31,87	39,79
Kalimantan Timur	620	758	594	42,32	64,72	57,23
Kalimantan Utara	-	177	177	-	27,97	36,72
Sulawesi Utara	857	109	1 136	50,62	63,51	61,81
Sulawesi Tengah	816	1 105	1 155	44,96	56,85	57,18
Sulawesi Selatan	1 353	1 941	1 325	45,37	41,45	43,46
Sulawesi Tenggara	923	104	901	43,52	35,30	38,28
Gorontalo	288	253	281	39,40	54,48	38,28
Sulawesi Barat	271	342	230	42,48	35,03	35,38
Maluku	259	183	316	25,29	18,38	25,48
Maluku Utara	217	159	348	20,11	16,47	29,10
Papua Barat	146	132	295	10,15	9,25	14,85
Papua	352	187	647	8,97	4,54	11,65
<b>INDONESIA</b>	<b>31 288</b>	<b>41 611</b>	<b>39 585</b>	<b>39,80</b>	<b>43,35</b>	<b>47,16</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan : \* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 4.2. 10 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Menambah Anggota Hansip/Linmas Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)	2011 (5)	2014 (6)	2018 (7)
A c e h	657	656	656	10,13	10,07	9,43
Sumatera Utara	363	324	324	6,26	5,31	9,69
Sumatera Barat	128	236	236	12,39	20,61	27,53
Riau	365	357	357	22,05	19,46	22,19
Jambi	130	328	328	9,48	21,15	27,27
Sumatera Selatan	533	738	738	16,73	22,80	28,11
Bengkulu	231	402	402	15,31	26,24	21,33
Lampung	572	1 118	1 118	23,21	42,48	32,52
Kep. Bangka Belitung	57	113	113	15,79	29,66	32,74
Kepulauan Riau	102	165	165	28,90	39,76	25,96
DKI Jakarta	171	138	138	64,04	51,69	46,82
Jawa Barat	1 889	2 445	2 445	31,99	41,01	39,87
Jawa Tengah	1 297	2 269	2 269	15,12	26,45	29,34
DI Yogyakarta	114	195	195	26,03	44,52	50,68
Jawa Timur	145	289	289	17,05	33,99	36,32
Banten	380	497	497	24,76	32,04	38,79
Bali	84	97	97	11,73	13,55	17,18
Nusa Tenggara Barat	129	324	324	11,90	28,40	35,00
Nusa Tenggara Timur	545	622	622	18,37	19,02	25,86
Kalimantan Barat	195	433	433	9,91	20,53	24,38
Kalimantan Tengah	231	467	467	15,12	29,76	29,44
Kalimantan Selatan	151	368	368	7,55	18,33	21,17
Kalimantan Timur	300	351	351	20,48	34,21	25,72
Kalimantan Utara	-	73	73	-	15,24	20,95
Sulawesi Utara	490	611	611	28,94	33,28	23,34
Sulawesi Tengah	394	612	612	21,71	30,82	25,64
Sulawesi Selatan	440	792	792	14,76	26,14	27,06
Sulawesi Tenggara	283	403	403	13,34	17,74	22,18
Gorontalo	168	254	254	22,98	34,51	34,74
Sulawesi Barat	86	173	173	13,48	26,70	25,85
Maluku	110	188	188	10,74	17,28	18,23
Maluku Utara	161	183	183	14,92	15,30	26,51
Papua Barat	104	143	143	7,23	9,13	9,31
Papua	310	334	334	7,90	6,86	10,72
<b>INDONESIA</b>	<b>1 262</b>	<b>19 299</b>	<b>19 299</b>	<b>16,05</b>	<b>23,48</b>	<b>24,86</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan : \* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 4.2. 11 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan\*) Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018**

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)	2011 (5)	2014 (6)	2018 (7)
A c e h	3 587	5 375	5 083	55,33	82,54	78,10
Sumatera Utara	1 907	2 248	2 516	32,90	36,83	41,03
Sumatera Barat	527	770	962	51,02	67,25	75,45
Riau	814	1 118	1 292	49,18	60,93	68,91
Jambi	486	1 002	1 029	35,42	64,60	65,88
Sumatera Selatan	1 426	2 044	2 201	44,76	63,14	67,47
Bengkulu	623	1 003	1 089	41,29	65,47	71,93
Lampung	1 263	1 982	2 114	51,26	75,30	79,65
Kep. Bangka Belitung	154	272	304	42,66	71,39	77,75
Kepulauan Riau	182	294	309	51,56	70,84	74,28
DKI Jakarta	181	245	242	67,79	91,76	90,64
Jawa Barat	4 041	5 029	5 134	68,43	84,35	86,18
Jawa Tengah	4 467	6 218	6 437	52,08	72,49	75,21
DI Yogyakarta	167	329	376	38,13	75,11	85,84
Jawa Timur	4 611	6 268	6 614	54,23	73,72	77,85
Banten	880	1 044	1 258	57,33	67,31	81,06
Bali	484	499	556	67,60	69,69	77,65
Nusa Tenggara Barat	415	597	634	38,28	52,32	55,47
Nusa Tenggara Timur	858	746	979	28,93	22,81	29,20
Kalimantan Barat	623	952	1 208	31,67	45,14	56,53
Kalimantan Tengah	564	1 035	1 028	36,91	65,97	65,23
Kalimantan Selatan	537	1 124	1 240	26,85	55,98	61,75
Kalimantan Timur	525	796	742	35,84	77,58	71,48
Kalimantan Utara	-	250	286	-	52,19	59,34
Sulawesi Utara	129	1 517	1 636	76,20	82,63	89,01
Sulawesi Tengah	806	1 296	1 347	44,41	65,26	66,68
Sulawesi Selatan	1 303	1 322	1 623	43,70	43,63	53,23
Sulawesi Tenggara	790	885	947	37,25	38,95	40,23
Gorontalo	328	483	500	44,87	65,63	68,12
Sulawesi Barat	193	258	314	30,25	39,81	48,31
Maluku	268	470	647	26,17	43,20	52,18
Maluku Utara	250	450	723	23,17	37,63	60,45
Papua Barat	121	213	239	8,41	13,59	12,03
Papua	311	223	631	7,93	4,58	11,37
<b>INDONESIA</b>	<b>34 982</b>	<b>48 357</b>	<b>52 240</b>	<b>44,50</b>	<b>58,84</b>	<b>62,24</b>

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan : \* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

**Tabel 4.2. 12 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2014**

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	355	6 157	1 118	4 353	582	104
Sumatera Utara	432	5 672	786	3 485	1 114	287
Sumatera Barat	210	935	201	650	66	18
Riau	380	1 455	295	891	243	26
Jambi	202	1 349	287	894	145	23
Sumatera Selatan	313	2 924	393	2 162	329	40
Bengkulu	105	1 427	290	940	175	22
Lampung	269	2 363	386	1 649	282	46
Kep. Bangka Belitung	69	312	103	198	10	1
Kepulauan Riau	101	314	77	168	55	14
DKI Jakarta	182	85	42	43	-	-
Jawa Barat	813	5 149	1 163	3 583	365	38
Jawa Tengah	755	7 823	1 949	5 641	213	20
DI Yogyakarta	117	321	125	196	-	-
Jawa Timur	949	7 553	2 472	4 835	220	26
Banten	201	135	295	887	150	18
Bali	144	572	230	342	-	-
Nusa Tenggara Barat	156	985	294	596	72	23
Nusa Tenggara Timur	310	296	350	1 487	900	223
Kalimantan Barat	294	1 815	176	884	577	178
Kalimantan Tengah	187	1 382	115	692	457	118
Kalimantan Selatan	217	1 791	350	1 193	210	38
Kalimantan Timur	180	846	153	387	239	67
Kalimantan Utara	61	418	44	164	139	71
Sulawesi Utara	168	1 668	463	1 007	165	33
Sulawesi Tengah	277	1 709	350	975	275	109
Sulawesi Selatan	360	267	632	1 566	361	111
Sulawesi Tenggara	167	2 105	404	1 298	324	79
Gorontalo	59	677	226	365	68	18
Sulawesi Barat	59	589	94	266	163	66
Maluku	125	963	118	392	328	125
Maluku Utara	107	1 089	212	481	292	104
Papua Barat	108	1 459	127	416	648	268
Papua	280	4 591	247	966	1 602	1 776
<b>INDONESIA</b>	<b>8 712</b>	<b>73 478</b>	<b>14 567</b>	<b>44 052</b>	<b>10 769</b>	<b>409</b>

Sumber : Statistik Podes 2014

**Tabel 4.2. 13 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2018**

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	353	6 155	940	4 769	399	47
Sumatera Utara	481	5 651	621	3 629	1 215	186
Sumatera Barat	226	1 049	259	729	53	8
Riau	550	1 325	232	888	190	15
Jambi	207	1 355	270	906	159	20
Sumatera Selatan	381	2 881	320	2 135	391	35
Bengkulu	130	1 384	299	918	151	16
Lampung	280	2 374	402	1 698	244	30
Kep. Bangka Belitung	91	300	112	183	5	-
Kepulauan Riau	113	303	49	182	63	9
DKI Jakarta	222	45	30	15	-	-
Jawa Barat	910	5 047	1 085	3 666	294	2
Jawa Tengah	930	7 629	1 994	5 511	120	4
DI Yogyakarta	114	324	105	219	-	-
Jawa Timur	1 127	7 369	2 250	4 941	168	10
Banten	209	1 343	258	939	135	11
Bali	140	576	236	340	-	-
Nusa Tenggara Barat	176	967	241	659	53	14
Nusa Tenggara Timur	327	3 026	250	1 734	949	93
Kalimantan Barat	283	1 854	189	906	600	159
Kalimantan Tengah	201	1 375	121	748	421	85
Kalimantan Selatan	235	1 773	388	1 206	145	34
Kalimantan Timur	203	835	134	432	253	16
Kalimantan Utara	66	416	47	155	124	90
Sulawesi Utara	174	1 664	445	1 082	126	11
Sulawesi Tengah	293	1 727	316	1 087	265	59
Sulawesi Selatan	381	2 668	660	1 628	319	61
Sulawesi Tenggara	205	2 149	391	1 406	315	37
Gorontalo	77	657	183	381	88	5
Sulawesi Barat	62	588	86	299	152	51
Maluku	135	1 105	115	493	350	147
Maluku Utara	121	1 075	161	549	298	67
Papua Barat	113	1 874	127	619	752	376
Papua	243	5 309	205	1 323	1 960	1 821
<b>INDONESIA</b>	<b>9 759</b>	<b>74 172</b>	<b>13 521</b>	<b>46 375</b>	<b>10 757</b>	<b>3 519</b>

Sumber : Diolah dari Podes 2018

**Tabel 4.2. 14 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2014**

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kelurahan yang Tidak ada Pos Polisi)				
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit	
			(4)	(5)	(6)	(7)	
A c e h	5,45	94,55	17,17	66,85	8,94	1,60	
Sumatera Utara	7,08	92,92	12,88	57,09	18,25	4,70	
Sumatera Barat	18,34	81,66	17,55	56,77	5,76	1,57	
Riau	20,71	79,29	16,08	48,56	13,24	1,42	
Jambi	13,02	86,98	18,50	57,64	9,35	1,48	
Sumatera Selatan	9,67	90,33	12,14	66,79	10,16	1,24	
Bengkulu	6,85	93,15	18,93	61,36	11,42	1,44	
Lampung	10,22	89,78	14,67	62,65	10,71	1,75	
Kep. Bangka Belitung	18,11	81,89	27,03	51,97	2,62	0,26	
Kepulauan Riau	24,34	75,66	18,55	40,48	13,25	3,37	
DKI Jakarta	68,16	31,84	15,73	16,10	-	-	
Jawa Barat	13,64	86,36	19,51	60,10	6,12	0,64	
Jawa Tengah	8,80	91,20	22,72	65,76	2,48	0,23	
DI Yogyakarta	26,71	73,29	28,54	44,75	-	-	
Jawa Timur	11,16	88,84	29,08	56,87	2,59	0,31	
Banten	12,96	87,04	19,02	57,19	9,67	1,16	
Bali	20,11	79,89	32,12	47,77	-	-	
Nusa Tenggara Barat	13,67	86,33	25,77	52,23	6,31	2,02	
Nusa Tenggara Timur	9,48	90,52	10,70	45,47	27,52	6,82	
Kalimantan Barat	13,94	86,06	8,35	41,92	27,36	8,44	
Kalimantan Tengah	11,92	88,08	7,33	44,10	29,13	7,52	
Kalimantan Selatan	10,81	89,19	17,43	59,41	10,46	1,89	
Kalimantan Timur	17,54	82,46	14,91	37,72	23,29	6,53	
Kalimantan Utara	12,73	87,27	9,19	34,24	29,02	14,82	
Sulawesi Utara	9,15	90,85	25,22	54,85	8,99	1,80	
Sulawesi Tengah	13,95	86,05	17,62	49,09	13,85	5,49	
Sulawesi Selatan	11,88	88,12	20,86	51,68	11,91	3,66	
Sulawesi Tenggara	7,35	92,65	17,78	57,13	14,26	3,48	
Gorontalo	8,02	91,98	30,71	49,59	9,24	2,45	
Sulawesi Barat	9,10	90,90	14,51	41,05	25,15	10,19	
Maluku	11,49	88,51	10,85	36,03	30,15	11,49	
Maluku Utara	8,95	91,05	17,73	40,22	24,41	8,70	
Papua Barat	6,89	93,11	8,10	26,55	41,35	17,10	
Papua	5,75	94,25	5,07	19,83	32,89	36,46	
<b>INDONESIA</b>	<b>10,60</b>	<b>89,40</b>	<b>17,72</b>	<b>53,60</b>	<b>13,10</b>	<b>4,98</b>	

Sumber : Diolah dari Podes 2014

**Tabel 4.2. 15 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2018**

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	5.42	94.58	15.27	77.48	6.48	0.76
Sumatera Utara	7.84	92.16	10.99	64.22	21.50	3.29
Sumatera Barat	17.73	82.27	24.69	69.49	5.05	0.76
Riau	29.33	70.67	17.51	67.02	14.34	1.13
Jambi	13.25	86.75	19.93	66.86	11.73	1.48
Sumatera Selatan	11.68	88.32	11.11	74.11	13.57	1.21
Bengkulu	8.59	91.41	21.60	66.33	10.91	1.16
Lampung	10.55	89.45	16.93	71.52	10.28	1.26
Kep. Bangka Belitung	23.27	76.73	37.33	61.00	1.67	0.00
Kepulauan Riau	27.16	72.84	16.17	60.07	20.79	2.97
DKI Jakarta	83.15	16.85	66.67	33.33	0.00	0.00
Jawa Barat	15.28	84.72	21.50	72.64	5.83	0.04
Jawa Tengah	10.87	89.13	26.14	72.24	1.57	0.05
DI Yogyakarta	26.03	73.97	32.41	67.59	0.00	0.00
Jawa Timur	13.27	86.73	30.53	67.05	2.28	0.14
Banten	13.47	86.53	19.21	69.92	10.05	0.82
Bali	19.55	80.45	40.97	59.03	0.00	0.00
Nusa Tenggara Barat	15.40	84.60	24.92	68.15	5.48	1.45
Nusa Tenggara Timur	9.75	90.25	8.26	57.30	31.36	3.07
Kalimantan Barat	13.24	86.76	10.19	48.87	32.36	8.58
Kalimantan Tengah	12.75	87.25	8.80	54.40	30.62	6.18
Kalimantan Selatan	11.70	88.30	21.88	68.02	8.18	1.92
Kalimantan Timur	19.56	80.44	16.05	51.74	30.30	1.92
Kalimantan Utara	13.69	86.31	11.30	37.26	29.81	21.63
Sulawesi Utara	9.47	90.53	26.74	65.02	7.57	0.66
Sulawesi Tengah	14.50	85.50	18.30	62.94	15.34	3.42
Sulawesi Selatan	12.50	87.50	24.74	61.02	11.96	2.29
Sulawesi Tenggara	8.71	91.29	18.19	65.43	14.66	1.72
Gorontalo	10.49	89.51	27.85	57.99	13.39	0.76
Sulawesi Barat	9.54	90.46	14.63	50.85	25.85	8.67
Maluku	10.89	89.11	10.41	44.62	31.67	13.30
Maluku Utara	10.12	89.88	14.98	51.07	27.72	6.23
Papua Barat	5.69	94.31	6.78	33.03	40.13	20.06
Papua	4.38	95.62	3.86	24.92	36.92	34.30
<b>INDONESIA</b>	<b>11.63</b>	<b>88.37</b>	<b>18.23</b>	<b>62.52</b>	<b>14.50</b>	<b>4.74</b>

Sumber : Diolah dari Podes 2018

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710  
Telp (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046  
Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)

ISSN 2089-5291

